



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kepulauan Riau

TRIWULAN II 2024





KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kepulauan Riau

TRIWULAN II 2024



Kata Pengantar

KEPALA KANTOR

Para Stakeholders dan Pembaca yang terhormat,

Segegap puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. KFR sebagai output Regional Chief Economist (RCE) disusun dalam memenuhi kebutuhan informasi stakeholders eksternal maupun internal yang menyajikan potret perkembangan ekonomi daerah, kondisi fiskal atau keuangan pemerintah pusat dan daerah, pengembangan ekonomi daerah, serta rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi para menyusun kebijakan serta seluruh stakeholders dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah.

Penyusunan kajian juga menghadirkan sinergi antar stakeholders untuk bersama-sama berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. KFR Triwulan II Tahun 2024 mencakup informasi Perkembangan Ekonomi Regional, Kinerja Fiskal Regional (APBN, APBD dan Konsolidasian), serta analisis tematik atas "Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya".

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Gubernur Kepulauan Riau, Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Khusus Provinsi Kepulauan Riau, KPU BC Batam, KPKNL Batam, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, OJK Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Suyono Saputro selaku Local Expert dan akademisi dari Universitas Internasional Batam, dan seluruh jajaran pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap kedepannya sinergi yang telah terbangun dengan baik ini dapat semakin ditingkatkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun pelaporan KFR masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kajian kedepannya. Besar harapan kami bahwa KFR yang disusun dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Agustus 2024

Indra Soeparjanto

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau



Tim Penyusun

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Penanggung Jawab

Indra Soeparjanto

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Ketua Tim

Anisah Alfada

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Tim Penyusun

Rolly Indra

Kepala Seksi PPA II-A

Muhadi

Kepala Seksi PPA II-B

Budi Indrawan

Kepala Seksi PPA II-C

Lorensia Kristina Br. S.

Erika Krissanta

Muhammad Rizki Firdaus

Design and Layout

Erika Krissanta

Stakeholders Terkait

- Local Expert Mitra Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
- Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kepulauan Riau
- Kemenkeu Satu Regional Kepulauan Riau (DJP, Kanwil DJBC, KPU BC, PSO BC, DJKN)
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau
- Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Kepri
- Akademisi (UMRAH dan UIB)
- Satuan Kerja dan BLU Wilayah Provinsi Kepri
- BMKG Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- BPKP Perwakilan Kepri
- KPPN Batam dan KPPN Tanjungpinang

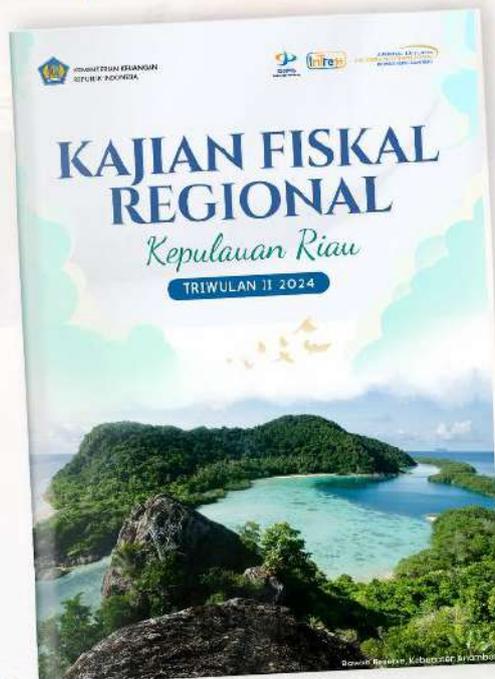


Cahaya Pagi Menyinari Pantai
Kajian Fiskal Memandu Arah
Kepulauan Riau Makin Berseri
Ekonomi maju, Harapan Terus Melangkah

Local
Economic
Development

Climate
Change
Responses

Policy Responses



Fiscal
Growth
Performance

Regional
Economics
Reviews



Korespondensi

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Sultan Muhammad Syah Dompok
Kota Tanjungpinang, Prov. Kep. Riau, 29124
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/

 @djpbkepri

 Kanwil DJPb Kepulauan Riau

 @djpbkepri

Table of Content

DAFTAR ISI

Pembukaan

- | | | | |
|-----------|--------------------|------------|---------------------|
| ii | Kata Pengantar | vii | Daftar Grafik |
| v | Daftar Isi | ix | Daftar Istilah |
| vi | Daftar Tabel | xv | Dashboard |
| vi | Daftar Special Box | xix | Ringkasan Eksekutif |

BAB I

01 Analisis Ekonomi Regional

- 3** Analisis Indikator Makro Ekonomi
- 11** Analisis Indikator Kesejahteraan

BAB II

20 Analisis Fiskal Regional

- 22** Analisis Laporan Realisasi Anggaran
- 54** Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan II 2024

BAB III

56 Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

- 59** Pendahuluan
- 59** Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik dan DAK Fisik pada 6 Bidang
- 65** Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L
- 68** Kendala dan Tantangan Pelaksanaan DAK Fisik Pada 6 Bidang
- 69** Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

BAB IV

72 Analisis Tematik: Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya

- 77** Analisis Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kinerja Sektor Perekonomian Regional
- 80** Analisis Policy Responses Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim
- 85** Evaluasi atas Policy Response Pemerintah Dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

BAB V

89 Kesimpulan dan Rekomendasi

- 91** Analisis Laporan Realisasi Anggaran
- 99** Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan II 2024

Daftar Pustaka



List of Tables

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 – Rincian Andil Infasi Bulan Juni 2024 per Komoditas (%yoy)	4
Tabel 2.1 – Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri Triwulan II, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	22
Tabel 2.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan II, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	24
Tabel 2.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	25
Tabel 2.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	26
Tabel 2.5 - Kontribusi Realisasi Pajak Sektor terhadap PDRB Kepri Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	27
Tabel 2.6 – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	28
Tabel 2.7 - Realisasi Bea Masuk per Sektor Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam (dalam Miliar Rupiah)	29
Tabel 2.8 - Realisasi Bea Keluar per Sektor Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam (dalam Miliar Rupiah)	29
Tabel 2.9 – Perkembangan PNBPN di Kepri Triwulan II, 2024 (dalam Miliar Rupiah)	29
Tabel 2.10 – Perkembangan Tax Ratio 2021 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	30
Tabel 2.11 – Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun (dalam Miliar Rupiah)	30
Tabel 2.12 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	33
Tabel 2.13 – Tabel 2.13 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	35
Tabel 2.14 – Kontribusi Belanja Pemerintah Triwulan II, 2023-2024 terhadap PDRB (dalam Miliar Rupiah)	37
Tabel 2.15 – Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita Triwulan II, 2023 – 2024 (dalam rupiah)	38
Tabel 2.16 – Capaian Output pada Belanja Sektor/Program Strategis, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	38
Tabel 2.17 – Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	41
Tabel 2.18 – Pagu dan Realisasi I-Account APBD di Kepri Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	43
Tabel 2.19 – Rasio Perpajakan Daerah Kepri terhadap PDRB Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	48
Tabel 2.20 – Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	53
Tabel 2.21 - Realisasi Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	54
Tabel 3.1 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L (RO Harmonis) dan TKD Dak Fisik Tahun 2024 (dalam Rp)	60
Tabel 3.2 – Pagu K/L yang Mendukung DAK Fisik RO Harmonis (dalam Rp)	61
Tabel 3.3 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L per Subbidang RO Harmonis Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	61
Tabel 3.4 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L per Subbidang RO Harmonis Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	62

List of Special Box

DAFTAR SPECIAL BOX

Special Box I	Pulau Terindah, Surga di Ujung Utara Indonesia
Special Box II	Peluang Investasi di Kabupaten Anambas
Special Box III	<i>Green Bonds</i> : Solusi Transformasi <i>Climate Change</i> Negara-Negara Berkembang
Special Box IV	Program Antisipasi Perubahan Iklim – Implementasi Program Antisipasi Perubahan Iklim di Jepang



List of Graphs

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 – Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 – Q2 2024 (%yoy)	3
Grafik 1.2 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 – Q2 2024 (% qtq)	3
Grafik 1.3 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2024 (% ctc)	3
Grafik 1.4 – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan II 2024 (%ctc)	3
Grafik 1.5 – Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kepulauan Riau Tahun 2019-Q2 2024	4
Grafik 1.6 – Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan II 2024 (%yoy)	4
Grafik 1.7 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan II 2024 (%yoy)	5
Grafik 1.8 – Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Kepri Triwulan II 2024	7
Grafik 1.9 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)	7
Grafik 1.10 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%mtm)	8
Grafik 1.11 – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2024 (%yoy)	8
Grafik 1.12 – Neraca Perdagangan di Kepri Tahun 2022-2024 (US\$ Juta/mtm)	9
Grafik 1.13 – Perkembangan Ekspor Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)	10
Grafik 1.14 – Perkembangan Impor Provinsi Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (mtm)	10
Grafik 1.15 – Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepri Tahun 2019-2024 (ribu jiwa)	11
Grafik 1.16 – Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Kepri Tahun 2020-2024	11
Grafik 1.17 – Perkembangan Indeks P1 dan P2 Kepri Tahun 2020-2024 (persen)	12
Grafik 1.18 – Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Regional Sumatera Tahun 2020-2024 (persen)	12
Grafik 1.19 – Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri per Tahun 2020-2024	13
Grafik 1.20 – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera bulan Februari 2024 (persen)	13
Grafik 1.21 – Porsi Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha di Kepri Tahun 2023-2024 (persen)	13
Grafik 1.22 – Rasio Gini di Kepri Tahun 2020-2024	14
Grafik 1.23 – Ketimpangan di Regional Sumatera per Februari 2024 (persen)	14
Grafik 1.24 – Perkembangan NTP di Kepulauan Riau Tahun 2022 – Q2 2024	15
Grafik 1.25 – Perkembangan NTN di Kepri Tahun 2022 – sems 1 2024	15
Grafik 1.26 – Perkembangan IPM Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2023	16
Grafik 1.27 – Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2023	17
Grafik 1.28 – Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kepri per Kategori IPM Tahun 2020 – 2023	17
Grafik 1.29 – Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2023	18
Grafik 2.1 – Realisasi Pendapatan Negara Triwulan II, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	23
Grafik 2.2 – Porsi Realisasi Pendapatan Negara Triwulan II 2024	23
Grafik 2.3 – Realisasi Pendapatan Perpajakan Triwulan II, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)	24
Grafik 2.4 – Porsi Penerimaan Perpajakan Triwulan II, 2024	24
Grafik 2.5 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	32
Grafik 2.6 – Realisasi Belanja Triwulan II, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)	32
Grafik 2.7 – Perbandingan Realisasi BPP dan TKD, Triwulan II 2024	32
Grafik 2.8 – Porsi Realisasi BPP, Triwulan II 2024	32
Grafik 2.9 – Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	34
Grafik 2.10 – Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per K/L, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	36
Grafik 2.11 – Realisasi Belanja TKD Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	36
Grafik 2.12 – Realisasi Belanja TKD per Pemda, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	37



List of Graphs

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.13 – Pagu dan Realisasi Belanja TKD per Jenis TKD, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	37
Grafik 2.14 – Pagu dan Realisasi PAD Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	44
Grafik 2.15 – Breakdown Realisasi PAD per Kab/Kota, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	44
Grafik 2.16 – Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	47
Grafik 2.17 – Pagu dan Realisasi LLPdYS Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	48
Grafik 2.18 – Indeks Kemandirian Fiskal I Tahunan, 2017 - 2023	48
Grafik 2.19 - Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I, Triwulan II 2024	50
Grafik 2.20 – Indeks Kemandirian Fiskal II, 2017 - 2023	50
Grafik 2.21 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II, Triwulan II 2024	51
Grafik 2.22 – Porsi Realisasi Belanja Daerah, Triwulan II 2024	52
Grafik 2.23 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)	52
Grafik 2.24 – Breakdown Realisasi Belanja per Kab/Kota, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)	53
Grafik 3.1 - Kendala dan Tantangan Keseluruhan Bidang	65
Grafik 3.2 - Kendala dan Tantangan – Bidang Jalan	66
Grafik 3.3 - Kendala dan Tantangan Bidang Pendidikan	66
Grafik 3.4 - Kendala dan Tantangan – Bidang Kesehatan dan KB	67
Grafik 3.5 - Kendala dan Tantangan – Bidang Kesehatan dan KB	67
Grafik 3.6 - Kendala dan Tantangan Bidang Pertanian	67
Grafik 3.7 - Kendala dan Tantangan Bidang Sanitasi	68
Grafik 4.1 – Perubahan Suhu Udara Rata-Rata Kota Tanjungpinang Tahun 1981 - 2023	77
Grafik 4.2 – Suhu Udara Tertinggi dan Terendah di Kepri Tahun 2013 – 2021 (°C)	77
Grafik 4.3 – Tren Perubahan Curah Hujan di Tanjungpinang Tahun 1981 - 2023	78
Grafik 4.4 - Persentase Tingkat Kenyamanan berdasarkan Temperature Humidity Index Kepri	79
Grafik 4.5 – Alokasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim: Program Konektivitas Infrastruktur Tahun 2023-2024 (Rp Miliar)	81
Grafik 4.6 – Alokasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim: Pencegahan Perubahan Iklim Tahun 2023-2024 (Rp Miliar)	81
Grafik 4.7 – Realisasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim sampai dengan Juni Tahun 2023 dan 2024 (Rp Miliar)	81
Grafik 4.8 – Alokasi Anggaran Adaptasi Perubahan Iklim di Kepri 2023 – 2024	82
Grafik 4.9 – Realisasi Adaptasi Perubahan Iklim sampai dengan Juni Tahun 2023 dan 2024 (Rp Miliar)	82
Grafik 4.10 – Realisasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim sampai dengan Juni Tahun 2023 dan 2024 (Rp Miliar)	84
Grafik 4.11 – Realisasi Adaptasi Perubahan Iklim sampai dengan Juni Tahun 2023 dan 2024 (Rp Miliar)	85
Grafik 4.12 – Penanganan Sampah di Kepulauan Riau Tahun 2022-2023 (Ton/Tahun)	85
Grafik 4.13 – Nilai PDRB ADHK Berdasarkan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Periode Q1 tahun 2020-2024	86
Grafik 4.14 – Jumlah Kasus Positif Dengue di Kepri Tahun 2023-2024	86



Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD, perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Layanan Umum (BLU) instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

Bea Masuk (BM)/Impor Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negara tertentu dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

Bea Keluar (BK)/Export Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaan bea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasi ekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

Cumulative to Cumulative (ctc) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2021)

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar, dan lain sebagainya).



Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM,

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

Defisit/Surplus Anggaran adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih besar dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplus anggaran.

Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD) merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

High Base-effect adalah kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Industri Kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri Menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.



Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu..

Ketimpangan Fiskal Vertikal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Ketimpangan Fiskal Horizontal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD) merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) merupakan pos penerimaan Pemda untuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputi hibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

Month to Month (mtm) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022.

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pajak Daerah/Local Tax adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

Pajak Penghasilan (PPH)/Income Tax adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Pajak Perdagangan Internasional (PPI) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke



Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPAD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita) merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakan sebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

Quarter to Quarter (qtq) mengacu pada perubahan atau pertumbuhan antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contohnya adalah pada saat melihat pertumbuhan PDRB dari Triwulan II ke Triwulan III.



Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminal dan sebagainya.

Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

Scatterplot adalah diagram matematika yang menggunakan koordinat Cartesian untuk menampilkan nilai dari dua variabel yang khas dalam satu kumpulan data.

Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Skala Ekonomi/Economy of Scale merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Tax Ratio adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalan potensi pajak.

Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak peluang pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah atau industri pada suatu waktu tertentu.



Abbreviations

DAFTAR ISTILAH

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk pelaksanaannya, diberikan dana tugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.

Vokasional dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yang lebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam bekerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

Volatilitas/Volatility dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabel untuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah-ubah.

Year on Year (yoy) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).





DASHBOARD

Perkembangan Ekonomi Regional

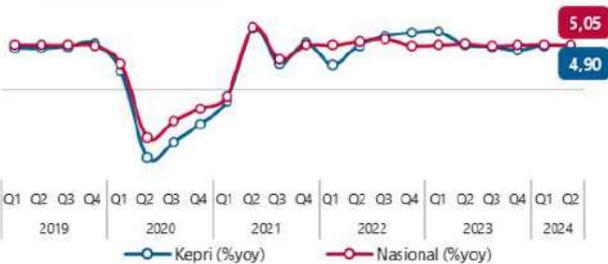
INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan Ekonomi

0,62% q1q 4,96% ctc

4,90% yoy

2^o %ctc in Sumatera



Nominal PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku
Rp86.764,16 M

Atas Dasar Harga Konstan
Rp51.566,15 M



Distribusi PDRB di Regional Sumatera
7,15%

Share PDRB

Share by Production (%yoy)

Industri Pengolahan
40,97%

Konstruksi
19,64%

Perdagangan Besar & Eceran
9,46%

Share by Expenditure (%yoy)

PMTB
44,33%

PK-RT
42,75%

Net Ekspor
6,40%

INFLASI, NTP & TNT



Tingkat Inflasi

Juni 2024

3,54% yoy 0,28% mtm

Beras 0,44%

Cabai Merah 0,37%

Perhiasan Emas 0,31%

Nilai Tukar Petani

105,55

Juni 2024

Nilai Tukar Nelayan

104,05

Juni 2024

NERACA PERDAGANGAN

Nilai Ekspor

USD 9.280,25 juta

Nilai Impor

USD 7.935,63 juta

Neraca Perdagangan Pangsa Ekspor Kepri



Jan - Jun 2024

306,87% ctc

US\$1.344,62 juta

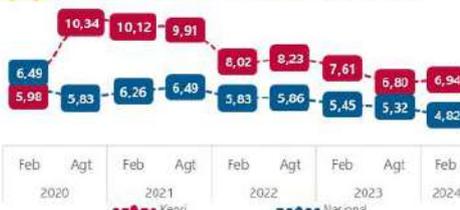


INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka 6,94%



#2 in Indonesia



Tingkat Ketimpangan 0,349



Tingkat Kemiskinan 5,37%

138,30 Ribu Jiwa

↓ 0,32 poin persen
Mar 2023 - Mar 2024

Pedesaan: 9,94%

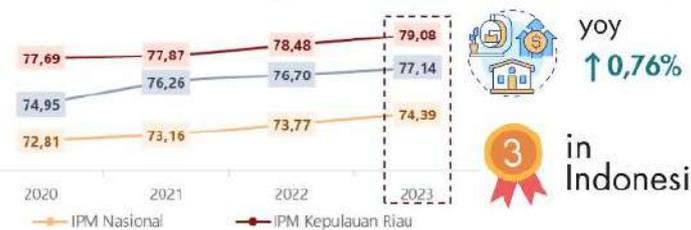
26,03 Ribu Jiwa

Perkotaan: 4,85%

112,28 Ribu Jiwa



Indeks Pembangunan Manusia 79,08



DASHBOARD

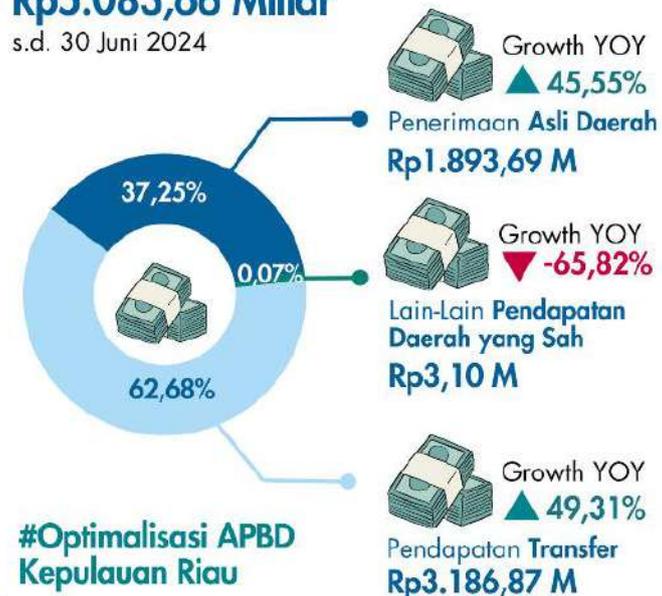
Kinerja Fiskal Regional



PAGU DAN REALISASI APBN



PAGU DAN REALISASI APBD



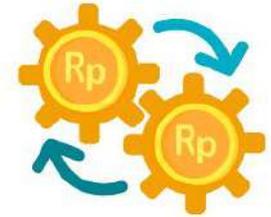


DASHBOARD

Pengembangan Ekonomi Daerah

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah



6 (enam) Rincian Output (RO) yang telah diselaraskan menghasilkan realisasi anggaran serta capaian RO Harmonis telah digunakan secara efektif.



	Pendidikan		Air Minum
	Kesehatan		Sanitasi
	Jalan		Pertanian

Tantangan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan



Penganggaran

- Blokir Automatic Adjustment
- Revisi Anggaran

Penyaluran DAK Fisik

- Juknis Kemenkes yang muncul di bulan Juni
- Kendala Spesifikasi TKDN
- Terlambatnya proses Reviu dan Upload Dokumen

Faktor SDM

- Kemampuan SDM dalam
 - Perencanaan Kegiatan
 - Bidang pekerjaan
 - Penggunaan Aplikasi

Kegiatan PBJ

- Terhambatnya proses lelang
- Kurangnya variasi penyedia
- Kurangnya spesifikasi barang
- Gangguan pada e-catalog dan Sistem PDN

Faktor Eksternal

- Cuaca buruk yang memengaruhi proses pengerjaan
- Letak geografis yang menyulitkan mobilitas

Upaya Penyelesaian Tantangan



Mencermati proses penganggaran dan berkoordinasi antar Pemda dan K/L

Pemda berkoordinasi percepatan pemenuhan dokumen DAK Fisik. Serta berkoordinasi dengan Kemenkes terkait Juknis

Melakukan workshop dan pelatihan bagi SDM serta Transfer Knowledge

Pemda dan K/L bersinergi untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan harmonisasi

Koordinasi dengan BMKG untuk menyiapkan mitigasi perubahan iklim

DASHBOARD

Analisis Tematik: Climate Change



ANALISIS TEMATIK



Analisis Tematik: Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya

Kenaikan suhu udara merupakan sinyal terjadinya perubahan iklim pada suatu daerah. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya Konsentrasi Gas Rumah Kaca.

Menyebabkan perubahan iklim seperti:



Peningkatan Suhu di Kepri

0,003 °C per tahun



Peningkatan Curah Hujan di Kepri

0,05 mm per Tahun

Dampak Perubahan Iklim di Kepri



Terganggunya Produktivitas Tanaman Pangan akibat naiknya curah hujan



Coral Bleaching dan kurangnya tangkapan ikan akibat kenaikan suhu air laut



Tenggelamnya 26 Pulau di Kepri akibat naiknya permukaan air laut



Sulitnya mobilitas transportasi laut akibat cuaca ekstrem



Meningkatnya epidemi diare dan DBD akibat fenomena La Nina



Terganggunya aktivitas pariwisata akibat kenaikan suhu udara



Policy Responses Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Dampak dan Evaluasi atas Implementasi Policy Responses



Alokasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim

- Belanja Infrastruktur Konektivitas (Pemeliharaan Pelabuhan, Keamanan Transportasi Laut)
- Konservasi kawasan ekosistem sungai dan pengembangan perbenihan tanaman

Kebijakan Alokasi Belanja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim



Komitmen Pemerintah dalam Program Mitigasi dan Adaptasi dan Perubahan Iklim sudah **terrealisasikan dengan baik** dan sesuai dengan kebutuhan program penanganan iklim di Wilayah Kepri.



Alokasi Anggaran Adaptasi Perubahan Iklim

- Peremajaan bangunan
- Pengendalian kerusakan perairan darat
- Pengembangan perbenihan tanaman
- Pembinaan dan edukasi terhadap masyarakat atas perkembangan dan potensi bahaya dari perubahan iklim

Kebijakan Non Belanja Untuk Menangani Perubahan Iklim



Berkurangnya timbulan sampah dan meningkatnya penanganan dan pengelolaan sampah



Meningkatnya jumlah penumpang transportasi laut dan Meningkatnya wisatawan mancanegara



Meningkatnya nilai perekonomian pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan perhutanan 11,51 (%yoy)



Meningkatnya jumlah produksi Air Bersih di Kepri



Kebijakan non Belanja

- Gerakan sedekah sampah di Kepri
- Ketentuan pembuangan sampah limbah
- Pengelolaan pesisir, laut, dan sumber daya laut
- Mencabut izin kawasan simpul transportasi laut
- Promosi ekowisata Kepri
- Edukasi dan penyuluhan terkait perubahan iklim dan pelatihan kesehatan, dan sebagainya.



Berkurangnya jumlah kasus positif Dengue di Kepri 24,71 (%yoy)



Berkurangnya kerusakan properti bangunan akibat banjir dan perubahan cuaca

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Fiskal Regional



Analisis Ekonomi Regional

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau secara kumulatif (*ctc*) tumbuh positif dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan II 2024 tumbuh positif sebesar 4,90 persen (yoy) dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera (*ctc*). Pertumbuhan ekonomi ini dorong oleh fenomena HKBN Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha pada triwulan II, dan momentum libur anak sekolah diakhir bulan Juni 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menyentuh angka Rp86,76 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp51,56 triliun.

Berdasarkan Pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri **didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** atau Investasi dengan share sebesar 44,33 persen. **Dari sisi Lapangan Usaha**, struktur PDRB Kepri masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yakni sektor **Industri Pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar (40,97 persen),

Tekanan inflasi Kepri pada Bulan Juni 2024 mencapai 3,54 persen (*yoy*), tetap stabil dan masih dalam rentang Target Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2024 sebesar 3 ± 1 (*yoy*). Inflasi di bulan Juni 2024 masih didominasi oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memiliki andil inflasi sebesar 1,87 persen (*yoy*), terutama pada komoditas Beras dan Cabai Merah masih dipengaruhi oleh ketidakstabilan iklim di daerah produsen beras yang menyebabkan gagal panen, sedangkan Provinsi Kepri masih mengimpor beras dari daerah produsen beras dari dalam negeri (pulau jawa) dan luar negeri (Thailand).

Neraca perdagangan luar negeri Kepri secara kumulatif hingga bulan Juni 2024 menghasilkan Surplus Perdagangan sebesar US\$171,76 juta. Jika dihitung secara kumulatif, neraca perdagangan Kepri pada periode triwulan II 2024 juga mencapai Surplus Perdagangan sebesar US\$1.309,65 Juta. Angka tersebut diperoleh dari total nilai Ekspor Kepri di bulan Mei dan Juni yang tinggi, khususnya dari golongan barang Komoditas Gas Alam, Hasil Tambang dan Hasil Industri (Non Migas).

Tingkat kemiskinan di Kepri pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 138,30 ribu jiwa atau 5,37 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,32 persen bila dibandingkan dengan bulan Maret 2023 sebesar 142,50 ribu orang. Sementara itu **Gini Ratio** Kepri, per Maret 2024 tercatat sebesar 0,349, meningkat 0,009 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 0,340, angka tersebut masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang berada di angka 0,379. Angka Gini Ratio Kepri per Maret 2024 berada pada peringkat pertama tertinggi di regional Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepri tidak dirasakan secara merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri bulan Februari 2024 tercatat 6,94 persen; dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 67,14 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,67 persen poin dibanding dengan Februari 2023 (*yoy*). Kepri berada pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-dua tertinggi Nasional. Di sisi lain, persentase penurunan TPT Kepri juga menjadi yang terbesar di Sumatera. Adanya penurunan TPT tersebut menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

NTP Kepri pada bulan Juni 2024 sebesar 105,55 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,50 persen (*mtm*). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (118,77), hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian. **NTN Kepri** pada Juni 2024 sebesar 104,05



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Fiskal Regional



mengalami penurunan sebesar 0,73 persen (*mtm*), Turunnya Nilai Tukar Petani subsektor Perikanan disebabkan penurunan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (*It*) sebesar 0,51 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (*Ib*) naik sebesar 0,23 persen.

IPM Kepri tahun 2023, yang dihitung dengan metode perhitungan baru sebesar 79,09. IPM Kepri menjadi IPM tertinggi ke-tiga Nasional sebesar 79,08 dan tumbuh sebesar 0,76 persen (*yoy*). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut.

Analisis Fiskal Regional

Pelaksanaan APBN Kepri Tunjukkan Kinerja Positif. Realisasi Penerimaan Perpajakan sampai dengan triwulan II 2024 sebesar Rp5.368,60 miliar mengalami pertumbuhan 8,83 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut didorong oleh *extra effort* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi PPh di daerah yang tumbuh 20,52 persen (*yoy*).

Realisasi Pendapatan PNB sampai dengan triwulan II 2024 sebesar Rp1.583,22 miliar tumbuh signifikan sebesar 71 persen (*yoy*). Pertumbuhan tertinggi pada Pendapatan BLU sebesar 197,59 persen, dikarenakan meningkatnya kegiatan unit usaha BLU BP Batam. Penerimaan PNB di dorong dari pengelolaan BMN, dengan BMN terbesar, yaitu tanah Waduk Sei Ladi, tanah untuk jalan arteri, dan tanah Waduk Sei Harapan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan II 2024 sebesar Rp3.469,66 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 18,04 persen (*yoy*). Tingginya *growth* BPP pada triwulan II 2024 didorong oleh perayaan HBKN Idul Adha yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. **Realisasi Belanja TKD** dengan persentase penyaluran tertinggi adalah Dana Desa sebesar Rp156,33 miliar (71,44 persen dari Pagu) didorong oleh perubahan mekanisme Dana Desa yang sebelumnya disalurkan 3 tahap pada tahun 2023, menjadi 2 tahap pada tahun 2024.

Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi Terus Menggali Potensi Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar 5.083,67 miliar atau 35 persen dari Target dan mengalami peningkatan 47,59 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp3.186 miliar (62,68 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp1.893,69 miliar (37,25 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu berupaya menggali potensi daerah lainnya agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mencapai kemandirian fiskal di Provinsi Kepri.

Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp1.893,69 miliar atau 39,36 persen dari Target realisasi. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp1.768,82,01 miliar atau 93,40 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar berturut-turut adalah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 55,38 miliar, Retribusi Daerah sebesar 53,83 miliar dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 15,66 miliar.

Pajak Daerah tumbuh sebesar 54,35 persen (*yoy*) didorong oleh pertumbuhan pada realisasi komponen Pajak Daerah sebagai dampak dibentuknya beberapa kebijakan daerah melalui Perkada maupun turunannya, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kepri tumbuh 9,92 persen (*yoy*), BBNKB Kepri tumbuh 19,02 persen (*yoy*), BPHTB Batam tumbuh 23,43 persen (*yoy*), dan Pajak Hiburan Karimun tumbuh 16,36 persen (*yoy*). Meskipun demikian, kontraksi pada Pajak Hotel di Bintan sebesar minus 65,73 persen (*yoy*) perlu menjadi perhatian.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Fiskal Regional



Pendapatan Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp3.186,87 miliar atau hanya 33,16 persen dari Target. Realisasi terbesar terdapat pada DAU yaitu sebesar Rp2.354,62 miliar atau 62,17 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer. DAK menempati posisi kedua dengan realisasi sebesar Rp597,36 miliar atau 15,77 persen total realisasi Pendapatan Transfer, dan DBH SDA pada posisi ketiga sebesar Rp451,73 miliar atau 11,93 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer. Pendapatan Lainnya telah terealisasi sebesar Rp3,10 miliar atau 0,37 persen dari Target.

Rasio Perpajakan Daerah terhadap PDRB sebesar 2,29 persen. Rasio tersebut menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar 0,71 persen. Peningkatan kinerja PAD Pemda juga dilihat dari **Indeks Kemandirian Fiskal I** (PAD/Total Pendapatan) beberapa daerah berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian" dengan angka tertinggi ada pada Provinsi Kepri sebesar 0,48 kemudian Kota Batam sebesar 0,46 dan Kabupaten Karimun sebesar 0,27. Sedangkan Kabupaten Bintan (0,12), Kabupaten Natuna (0,07), Kabupaten Lingga (0,08), Kabupaten Kepulauan Anambas (0,04), dan Kota Tanjungpinang (0,14) berada pada klasifikasi "Belum Mandiri". **Indeks Kemandirian Fiskal II** (PAD+DBH/Total Pendapatan) Kota Batam (0,57) dan Provinsi Kepri (0,53) masuk pada klaster "Mandiri." Adapun Kab. Karimun (0,44), Kab. Natuna (0,31), Kota Tanjungpinang (0,30), Kab. Lingga (0,26), dan Kab. Kep. Anambas (0,26) berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian" sedangkan Kab. Bintan (0,18) berada pada kategori "Belum Mandiri". Dari hasil IKF II periode triwulan II 2024, dapat disimpulkan bahwa banyak kabupaten/kota berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian" dibandingkan pada klasifikasi "Mandiri" dan "Belum Mandiri".

Belanja Daerah dapat direalisasikan Rp5.449,84 miliar atau 35,78 persen dari Pagu. Belanja Daerah tumbuh 24,74 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya hampir seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasi yang tumbuh sebesar 149,30 persen (*yoy*), Belanja Barang dan Jasa yang tumbuh 28,16 persen (*yoy*) dan Belanja Modal yang tumbuh sebesar 14,98 persen (*yoy*). Belanja Pegawai merupakan belanja dengan realisasi berdasarkan nominal tertinggi yaitu sebesar Rp2.772,66 miliar, disisi lain Realisasi Belanja Modal sangat rendah, yaitu sebesar Rp317,03 miliar atau 14,98 persen dari Pagu. Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB meningkat pada triwulan II 2024 sebesar 3,16 persen dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar 2,70 persen (*yoy*).

Konsolidasian pelaksanaan anggaran pusat dan daerah lingkup Kepri menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp9.352,50 miliar dan tumbuh 19,38 persen (*yoy*), jumlah Belanja Konsolidasi sebesar Rp9.083,23 miliar dan tumbuh 19,13 persen (*yoy*), dan jumlah Transfer Konsolidasi sebesar Rp517,16 miliar dan tumbuh 108,47 persen (*yoy*) sehingga terjadi Surplus sebesar Rp242,27 miliar. Jumlah Pembiayaan Konsolidasi sebesar Rp254,38 miliar sehingga terbentuk SiLPA sebesar Rp496,64 miliar.

Pengembangan Ekonomi Daerah

Telah dilakukan monev belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik tahun 2024 dilakukan terhadap 6 (enam) bidang yang telah disinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran. Hingga bulan Juni 2024, Rincian Output (RO) yang telah diselaraskan oleh DJA dan DJPK menunjukkan = realisasi anggaran serta capaian RO Harmonis telah digunakan secara efektif. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan di beberapa bidang harmonis yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu aspek penganggaran, penyaluran DAK Fisik, SDM, pengelolaan kegiatan PBJ, dan faktor eksternal lainnya.

Aspek penganggaran mengalami beberapa tantangan meliputi blokir dan revisi anggaran, blokir *automatic adjustment*, dan kegiatan yang masih memerlukan koordinasi ke unit Eselon 1 karena belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. **Penyaluran DAK Fisik** mengalami beberapa hambatan, yaitu juknis dari Kementerian Kesehatan yang baru terbit bulan Juni, tidak terdapat alat kesehatan yang memenuhi spesifikasi TKDN, Pemko Batam dan Pemkab



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Fiskal Regional



Karimun terlambat melaksanakan revisi RK untuk memaksimalkan Pagu, kurang personil SDM pada APIP untuk melakukan reuiu, OPD yang lambat melakukan upload dokumen penyaluran DAK Fisik.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti kemampuan penggunaan aplikasi, pengetahuan terkait rencana kegiatan dan pemahaman terhadap bidang tugas pekerjaan. **Pengelolaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)** mengalami beberapa tantangan seperti terhambatnya proses lelang karena spesifikasi barang yang belum sesuai dengan kebutuhan, kurangnya variasi pihak penyedia, terdapat gangguan pada sistem PBJ, dan tidak dapat diaksesnya *e-catalog* karena sistem PDN terganggu.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan di lapangan akan dipengaruhi oleh **faktor eksternal** meliputi cuaca dan lokasi yang sulit mobilitasnya, pedoman umum atau juknis yang baru terbit bulan April, Mei, hingga Juni, sehingga menghambat mulainya pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, pelaksanaan yang melibatkan pihak luar perlu dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan.

Analisis Tematik

Analisis Tim Kanwil DJPb Kepri menemukan bahwa *Temperature Humidity Index* (THI) di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2013 -2021 didominasi oleh kategori kurang nyaman atau diakumulasi berlangsung selama hampir 8 tahun (suhu 25-27°C) dan kategori tidak nyaman diakumulasi berlangsung selama 6 bulan (suhu diatas 27°C).

Kenaikan suhu udara merupakan sinyal terjadinya perubahan iklim pada suatu daerah, di Tanjungpinang rata-rata mengalami peningkatan suhu udara mencapai 0,003°C per tahun, hal tersebut disertai dengan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca dan frekuensi intensitas durasi cuaca ekstrem, seperti intensitas hujan wilayah Tanjungpinang, terdapat tren kenaikan curah hujan mencapai 0,05 mm per tahun.

Kenaikan permukaan air laut berpotensi membuat pulau-pulau kecil di Kepri tergenang, bahkan beberapa di antaranya mengalami abrasi yang menyebabkan pulau tenggelam. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terdapat pulau tenggelam di Kepri, meliputi Pulau Terumbu Daun, Lereh, Tikus, Inggit, dan Begonjai.

Peningkatan suhu air laut, keasaman laut, dan perubahan pola arus laut dapat merugikan sektor kelautan perikanan, ekosistem laut, melambatkan pertumbuhan budidaya perikanan dan mengurangi hasil tangkapan perikanan. Hal ini dapat berdampak pada pendapatan nelayan dan industri perikanan regional Kepri.

Faktor perubahan iklim sangat **mempengaruhi infrastruktur transportasi dan mobilitas masyarakat di Kepri** yang mengandalkan transportasi laut untuk mobilitas antar kabupaten/kotanya. Dampak tersebut juga dapat merusak tempat tinggal masyarakat pesisir.

Perubahan iklim meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah, penyakit pernapasan (ISPA), diare dan hepatitis di Kepri. Khusus daerah yang sering mengalami banjir, penyakit diare, demam tipus, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A adalah beberapa penyakit menular yang terbawa air yang harus diwaspadai. Masih banyak masyarakat belum memiliki pengetahuan akan perubahan iklim yang dan dampak yang dapat ditimbulkan di masa mendatang, masih terdapat masyarakat yang kurang "aware" terhadap kelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan dengan baik.

Pemerintah pusat melakukan upaya mengatasi perubahan iklim dengan meningkatkan alokasi anggaran mitigasi perubahan iklim pada satker Satuan Kerja Distrik Navigasi (Disnav), Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), Radio Republik Indonesia (RRI), Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PPLP) dan peningkatan alokasi anggaran adaptasi perubahan iklim pada satker Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan BMKG Tanjungpinang.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Fiskal Regional



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah melaksanakan kebijakan meliputi, **gerakan sedekah sampah** untuk mengurangi sampah anorganik yang tidak dapat terurai, pengelolaan pesisir dan laut untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut, serta promosi ekowisata.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 – 2026, telah dilaksanakan beberapa kebijakan, yaitu pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu untuk mengatasi kerawanan pangan akibat perubahan iklim, program untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, praktik pertanian berkelanjutan untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, pemulihan kawasan hutan.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kepri telah efektif mengurangi dampak perubahan iklim. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya timbulan sampah, meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha pertanian dan perikanan, meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, berkurangnya angka positif DBD, pengembangan investasi bidang infrastruktur dalam pergerakan barang logistik, kapasitas air bersih yang semakin membaik, serta bertambahnya infrastruktur tahan bencana di Kepri.

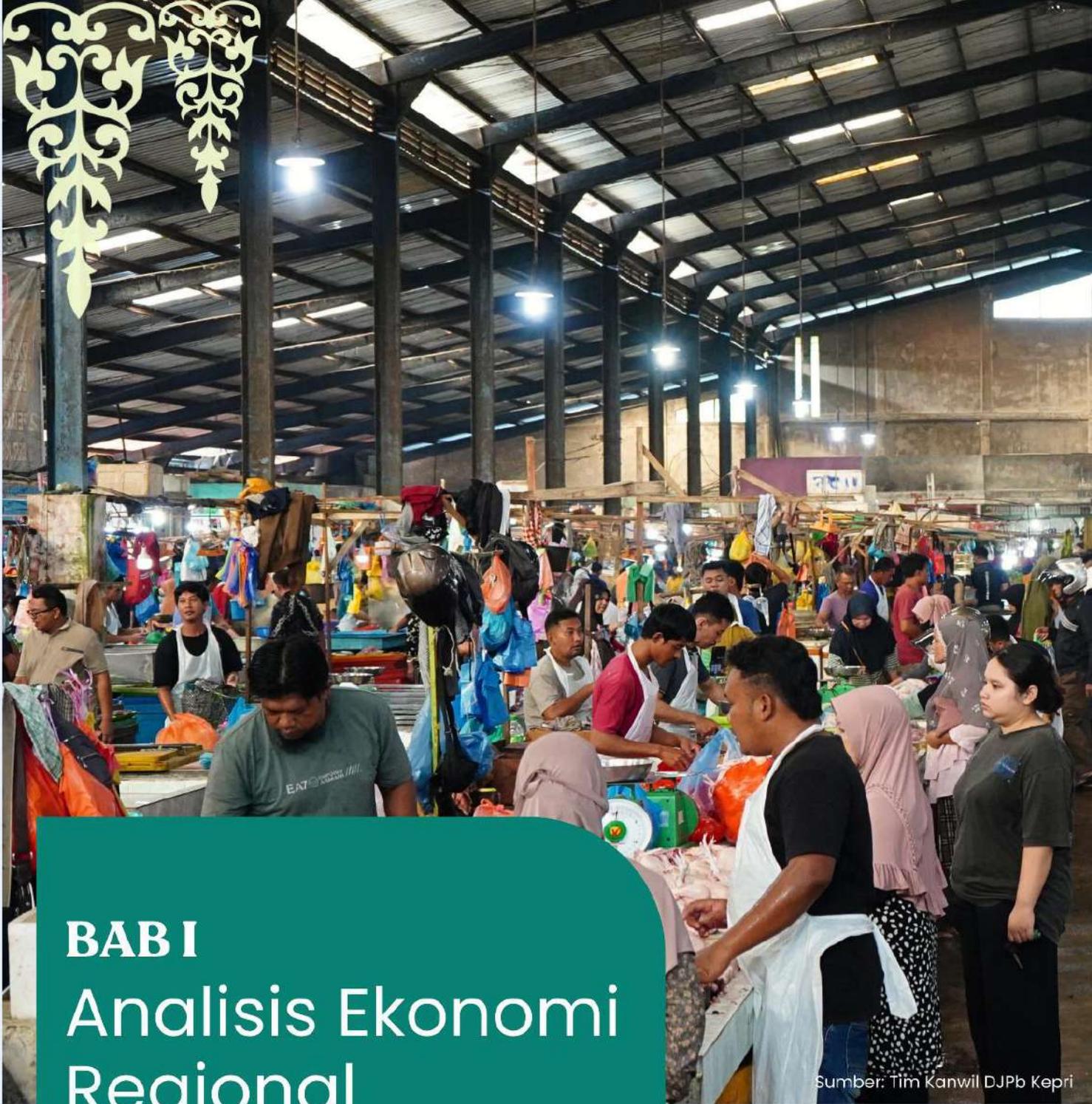


Selayang Pandang Kepulauan Riau



Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.



BAB I

Analisis Ekonomi Regional

Sumber: Tim Kanwil DJPb Kepri

Pasar Bestari Bintang Centre, Kota Tanjungpinang

Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Tanjungpinang. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi yang penting di daerah tersebut, menawarkan berbagai barang mulai dari produk pangan segar, kerajinan lokal, hingga barang kebutuhan sehari-hari. Keberagaman yang ada di Pasar Bestari Bintang Center mencerminkan aktivitas perdagangan yang melibatkan berbagai skala usaha, dari pedagang kecil hingga besar. Hal ini membuat pasar ini tidak hanya menjadi lokasi berbelanja, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dan budaya di Tanjungpinang.





Regional Economic Review

- Produk Domestik Regional Bruto
- Kontribusi Fiskal
- Tingkat Inflasi
- Neraca Perdagangan
- Tingkat Kemiskinan
- Tingkat Pengangguran
- Rasio Gini
- Nilai Tukar Petani
- Nilai Tukar Nelayan
- Indeks Pembangunan Manusia



1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

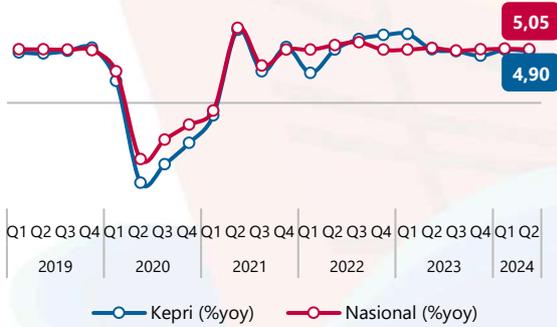
1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Sektor/Lapangan Usaha

1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ketidakpastian global seperti dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar & suku bunga *The FED*), eskalasi perang dagang antara AS – Tiongkok, meningkatnya fragmentasi & proteksionisme, keterbatasan support kebijakan untuk pertumbuhan global, serta lemahnya prospek pertumbuhan global menjadi risiko dan tantangan bagi pertumbuhan perekonomian global di berbagai belahan dunia.

Di tengah ketidakpastian global dan outlook pertumbuhan ekonomi global yang relatif *stagnan*, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya ditulis Kepri) mampu melanjutkan tren pertumbuhan yang positif.

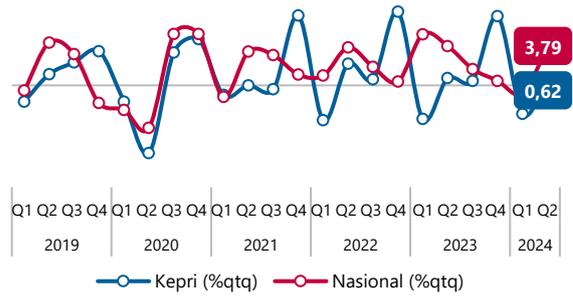
Grafik 1.1 – Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 – Q2 2024 (% yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pada triwulan II 2024, **pertumbuhan ekonomi** Kepri tercatat tumbuh positif sebesar 4,90 persen (*yoy*). Angka pertumbuhan positif tersebut mencerminkan kestabilan perekonomian di Kepri yang tetap menunjukkan kinerja positif. Di sisi lain, bila dibandingkan antara angka pertumbuhan ekonomi Nasional dan Kepri masing-masing sebesar 5,05 persen (*yoy*) dan 4,90 persen (*yoy*), pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh lebih lambat dibandingkan Nasional.

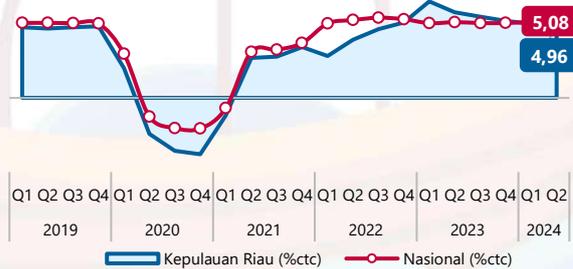
Grafik 1.2 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 – Q2 2024 (% qtq)



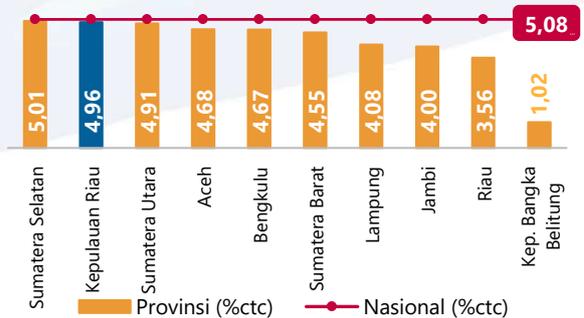
Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Bila dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi periode triwulanan, laju pertumbuhan ekonomi Kepri menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perekonomian Kepri tumbuh sebesar 0,62 persen (*qtq*).

Grafik 1.3 – Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Kepulauan Riau Tahun 2019 - 2024 (% ctc)



Grafik 1.4 – Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan II 2024 (% ctc)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan provinsi di regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (*ctc*) pada triwulan II 2024, Kepri memberikan kontribusi sebesar 7,15





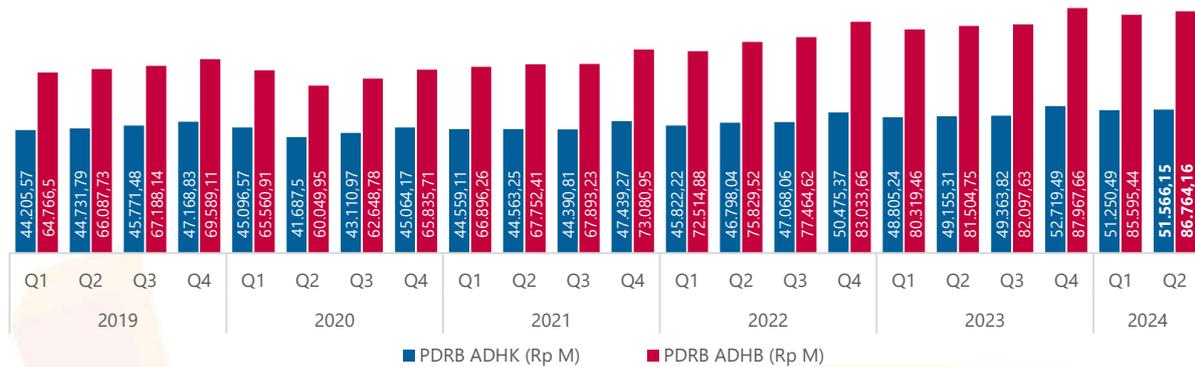
persen dari total pertumbuhan ekonomi di Regional Sumatera.

Capaian kinerja ekonomi tersebut sekaligus menjadikan Kepri sebagai Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi

ke-2 di Sumatera dengan angka pertumbuhan sebesar 4,96 persen (*ctc*) setelah Provinsi Sumatera Selatan 5,01 persen (*ctc*), kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Utara dengan pertumbuhan 4,91 persen (*ctc*).

1.1.1.2 Nominal PDRB

Grafik 1.5 – Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kepulauan Riau Tahun 2019-Q2 2024



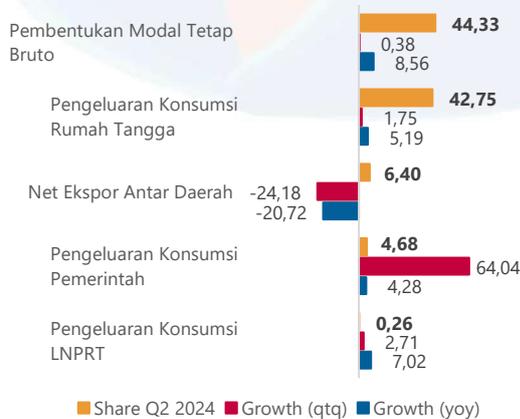
Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi regional ditandai dengan adanya peningkatan terhadap **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**. Secara nominal, PDRB terbagi atas dua kategori, yaitu PDRB Angka Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada triwulan II 2024, perekonomian Kepri tumbuh 4,90 persen (*yoy*) dengan nominal PDRB ADHB sebesar Rp51.566,15 miliar dan PDRB ADHK sebesar Rp86.764,16 miliar.

PDRB berdasarkan Pengeluaran diukur dari penjumlahan nilai barang dan jasa yang dibelanjakan oleh pengguna akhir. Pada triwulan II 2024, PDRB berdasarkan Pengeluaran di Kepri didominasi signifikan dari Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PM-TB) atau Investasi dengan *share* sebesar 44,33 persen dari total PDRB yang tumbuh 8,56 persen (*yoy*).

PDRB berdasarkan Pengeluaran

Grafik 1.6 – Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan II 2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pada triwulan II 2024 kontribusi dan pertumbuhan PMTB mendominasi signifikan perekonomian Kepri dengan *share* sebesar 44,33 persen (*yoy*), berbeda dengan profil PDRB pada provinsi lain maupun nasional yang didominasi pengeluaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan tingginya kemampuan investasi baik PMD maupun PMA di sektor industri sehingga membentuk perekonomian yang cukup stabil. **PMTB menjadi pengungkit untuk perekonomian di Kepri** yang cukup rawan terimbas dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. PMTB tumbuh positif pada kelompok barang modal bangunan & konstruksi, mesin dan





perlengkapan, serta alat transportasi. Pertumbuhan komponen PMTB juga tergambar melalui realisasi Belanja Modal APBN dan Belanja Modal APBD yang mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 39,52 persen (yoy) dan 1,67 persen (yoy).

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)

PKRT pada triwulan II 2024 berkontribusi sebesar 42,75 persen dari PDRB dan tumbuh 5,19 persen (yoy). Pertumbuhan PKRT tersebut tumbuh sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari kegiatan menjelang dan pada masa Hari Raya Idul Fitri dan Idul Hari Raya Idul Adha. Momentum libur anak sekolah pada bulan Juni meningkatkan permintaan di berbagai sektor usaha karena tingginya mobilitas masyarakat sehingga menjadi stimulus aktivitas ekonomi, khususnya pada kelompok transportasi, komunikasi, serta hotel dan restoran.

Net Ekspor

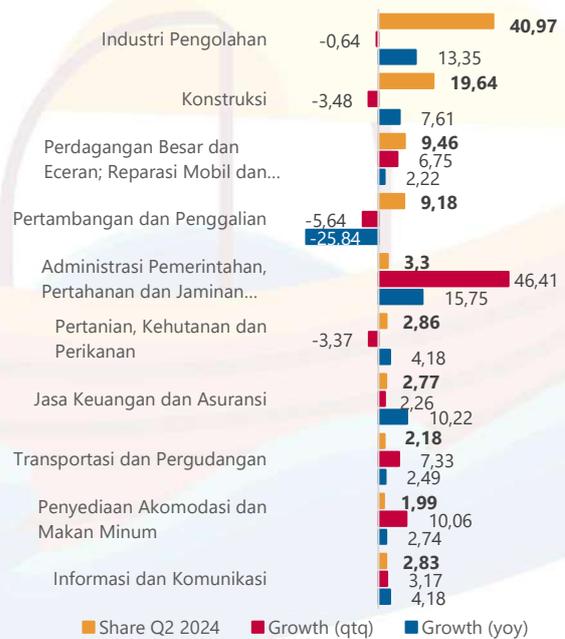
Komponen Net Ekspor triwulan II 2024 berkontribusi sebesar 6,40 persen (yoy) dari total PDRB Kepri. Capaian kinerja Komponen **Pengeluaran Net Ekspor pada triwulan II 2024 mengalami kontraksi** sebesar 20,72 persen (yoy). **Kontraksi Net Ekspor tersebut cukup berpengaruh signifikan terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi Kepri.** Hal ini dipengaruhi turunnya nilai ekspor sektor Migas seperti Hasil Minyak dan Minyak Mentah di Kabupaten Karimun. Selama periode triwulan II 2024, nilai Ekspor Kepri sebesar US\$9.280,25 Juta, aktivitas tersebut didominasi dari sektor Non Migas, terutama dari Kelompok Industri dengan kontribusi sebesar 80,80 persen dari total nilai Ekspor. Di sisi Impor, pada triwulan II 2024 senilai US\$7.935,63 Juta. Capaian tersebut juga didominasi dari sektor Industri dengan kontribusi sebesar 86,79 persen.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)

Komponen Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024 menjadi Komponen Pengeluaran dengan pertumbuhan terbesar yaitu tumbuh 64,04 persen (yoy). PKP berkontribusi sebesar 4,68 persen dari total PDRB Kepri. Tumbuhnya kontribusi PKP dipengaruhi oleh adanya pembayaran THR dan Gaji ke-13, serta telah dimulainya penyaluran DAK Fisik pada bulan Juni 2024. Realisasi Belanja APBN telah mencapai Rp7.248,33 miliar dan tumbuh 11,00 persen (yoy). Realisasi Belanja APBD telah mencapai Rp5.449,84 miliar dan tumbuh 24,74 persen (yoy).

PDRB berdasarkan Lapangan Usaha

Grafik 1.7 – Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan II 2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (LU) dibentuk berdasarkan penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sebagian besar lapangan usaha di Kepri tumbuh positif pada triwulan II 2024. *Leading sectors* ekonomi Kepulauan Riau seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran terus tumbuh.





Pada triwulan II 2024, dari sisi Lapangan Usaha, Industri Pengolahan menjadi penyumbang *share* PDRB Kepri terbesar dengan kontribusi sebesar 40,97 persen dari total PDRB yang tumbuh sebesar 13,35 persen (*yoy*). Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Industri Pengolahan, serta Jasa Keuangan & Asuransi yang tumbuh masing-masing sebesar 15,75 persen (*yoy*), 13,35 persen (*yoy*), dan 10,22 persen (*yoy*) secara berturut-turut.

Industri Pengolahan

Pertumbuhan Industri Pengolahan ditopang dari masih kuatnya permintaan (*demand*) baik dari domestik dan manca negara serta terus bergeraknya aktivitas produksi industri di Kepri. Hal tersebut sejalan dengan kinerja Industri Pengolahan di Kepri yang terus tumbuh setiap tahunnya.

LU Industri Pengolahan di Kepri terus berkembang dengan hadirnya *Foreign Direct Investment* (FDI) dari negara tetangga, khususnya Singapura, Tiongkok, dan Jepang. Investasi pada sektor industri pengolahan di Kepulauan Riau juga didukung oleh peran strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif fiskal, khususnya pada Zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan perkembangan infrastruktur di Kepri.

Konstruksi

LU konstruksi pada triwulan II 2024 menjadi LU dengan pertumbuhan 7,61 persen (*yoy*) berkontribusi sebesar 19,64 persen terhadap PDRB. Perkembangan LU Konstruksi di Kepri sejalan dengan berjalannya 17 Proyek Prioritas dikota Batam, salah satunya adalah pembangunan *Fly Over* Sei Ladi yang sudah mencapai 30 persen serta pembangunan *container yard* dan infrastruktur pendukung Terminal Peti Kemas. Selanjutnya terdapat Jembatan Batam-Bintan yang sudah memulai

proses pengeboran laut. Jembatan ini menjadi mega proyek yang berperan sebagai jalur transportasi dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi horizontal antara Batam dan Bintan.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor tumbuh sebesar 2,22 persen (*yoy*) pada triwulan II 2024 dan berkontribusi 9,46 persen terhadap PDRB Kepri. Kinerja tersebut didorong dengan tumbuhnya sektor perdagangan di Kepri, khususnya dari kelompok mesin dan listrik dan peningkatan konsumsi dari masyarakat terhadap kebutuhan tersier.

Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 9,18 persen dari PDRB Kepri triwulan II 2024. Kinerja Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 25,84 persen (*yoy*) yang disebabkan oleh sisi harga minyak dunia yang berkontraksi di triwulan II 2024 serta terdapat 4 (empat) kontrak perusahaan migas dengan pemerintah daerah yang berhenti (*terminated*) dan akan mulai diperpanjang pada akhir tahun 2024.

1.1.2 Kontribusi Fiskal

Kontribusi fiskal atau pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam pembentukan PDRB. Berdasarkan konsep *Keynesian*, nilai Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh besarnya Pengeluaran Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Net ekspor ($Y=C+I+G+NX$). Artinya, setiap peningkatan pada permintaan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor akan turut meningkatkan pendapatan daerah.

Kontribusi fiskal terhadap perekonomian berperan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi yang secara riil bergerak dalam

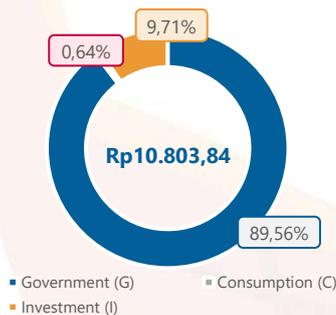




membangun infrastruktur, peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas ekonomi lainnya. Kontribusi fiskal yang bersumber dari peran pemerintah pusat dan daerah tercermin melalui Belanja APBN dan Belanja APBD, yang berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pembentukan PDRB.

Berdasarkan hasil *mapping* atau *proxy* konsolidasi Belanja APBN dan APBD Regional Kepri periode triwulan II 2024 dengan realisasi sebesar Rp10.803,84 miliar terhadap perekonomian triwulan II 2024, diperoleh hasil relasi kontribusi fiskal terhadap pembentukan PDRB pada sektor riil Kepri sebagai berikut:

Grafik 1.8 – Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Kepri Triwulan II 2024



Sumber: Laporan ALCo Regional Kepri Juni 2024, Kanwil DJPb Provinsi Kepri, (diolah)

1. Belanja Pegawai, serta belanja lain seperti Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga/Belanja Lain-Lain, dan Transfer ke Daerah, yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pengeluaran Pemerintah (G) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp9.506,50 miliar (89,65 persen).
2. Belanja Barang, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Konsumsi Pemerintah (C) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp67,86 miliar (0,64 persen).
3. Belanja Modal yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Investasi (I) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp1.029 miliar (9,71 persen).

Selanjutnya, tidak hanya melalui kebijakan belanja APBN dan APBD kontribusi fiskal terhadap perekonomian juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan mobilitas perekonomian di suatu daerah, salah satunya mencakup penggunaan atau komposisi belanja pemerintah terhadap sektor ekonomi.

1.1.3 Tingkat Inflasi

Grafik 1.9 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024, (diolah)

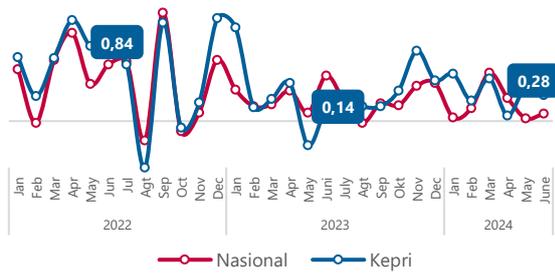
Secara umum, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang secara umum dan berkelanjutan terjadi selama periode tertentu. Analisis inflasi menjadi alat untuk memahami stabilitas ekonomi di suatu regional, khususnya dalam melihat potensi dan kemampuan daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, tekanan inflasi di Kepri dihitung dari 2 kota dan 1 kabupaten (Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun).

Kepri mengalami inflasi sebesar 3,54 persen (*yoy*) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,69. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 3,71 persen dengan IHK sebesar 106,94 dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,79 persen dengan IHK sebesar 106,08. Sementara untuk Kota Tanjungpinang inflasi tercatat sebesar 2,97 persen dengan IHK sebesar 105,53.





Grafik 1.10 – Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2022-2024 (%mtm)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Tingkat inflasi Kepri secara *month to month* bulan Juni 2024 sebesar 0,28 persen (*mtm*), inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,39 pada Mei 2024 menjadi 106,69 pada Juni 2024. Sedangkan tingkat inflasi *year to date* sebesar 1,46 persen (*ytd*).

Tabel 1.1 – Rincian Andil Infasi Bulan Juni 2024 per Komoditas (%yoy)

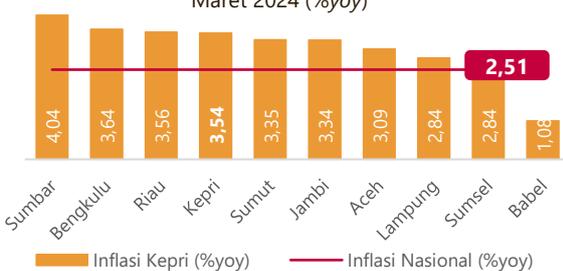
No.	Rincian	Inflasi Juni 2024 (%yoy)	Andil Inflasi Juni 2024 (%yoy)
Inflasi Umum		3,54	3,54
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	6,48	1,87
2	Transportasi	4,04	0,56
3	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,66	0,40
4	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Pendidikan	1,86	0,18
5	Pendidikan	2,49	0,17
6	Pakaian dan Alas Kaki	3,26	0,15
7	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,90	0,14
8	Kesehatan	3,45	0,09
9	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,05	0
10	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,09	0
11	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,41	-0,02

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pada bulan Juni 2024, inflasi yang terjadi di Kepri disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya harga 8 (delapan) indeks kelompok pengeluaran. Tiga kelompok terbesar yang menjadi penyumbang terbesar inflasi pada bulan Juni 2024 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 6,48 persen; kelompok transportasi naik sebesar 4,04 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 4,34 persen.

Inflasi di Kepri pada bulan Juni 2024 berada pada peringkat ke-empat di Regional Sumatera. Selanjutnya, jika dilihat dari rincian komoditas dengan andil inflasi terbesar bulan Juni 2024 (*yoy*) didominasi oleh Beras (0,42 persen), Angkutan Udara (0,32 persen), Cabai Merah (0,31 persen), Tarif Parkir (0,18 persen), dan Emas Perhiasan (0,17 persen). Hal tersebut dipengaruhi oleh HBK Idul Fitri yang meningkatkan aktivitas belanja masyarakat pada komoditas tersebut.

Grafik 1.11 – Inflasi pada Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2024 (%yoy)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestic menjelang Idul Adha. Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.





Upaya pengendalian yang telah dilakukan antara lain:

A. Keterjangkauan Harga

1. Mengoptimalkan Gerai Pangan dan Koperasi mitra TPID untuk penjualan hasil panen petani seperti cabai merah dan sayuran, serta hasil ikan.
2. Melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik di seluruh Kab/Kota di wilayah Kepri, penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah menjelang HBKN sebanyak 25 kali menjelang HBKN Idulfitri di berbagai Kab/Kota di Kepri.

B. Ketersediaan pasokan

1. Melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan pada Bulog, distributor, serta di pasar termasuk mengantisipasi pengoplosan daging sapi segar dengan daging beku baru.
2. Melaksanakan sekolah lapang pertanian cabai yang bekerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama Kepulauan Riau kepada 63 petani disertai pemberian bantuan teknis di lahan seluas 2 Ha.
3. Penanaman Serentak Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di 100 SMA/SMK se-Kepri sebanyak 25.000 bibit.
4. Monitoring budidaya cabai merah di Koperasi Plasma Agri Kundur Kab. Karimun dan menyerahkan bantuan bibit cabai kepada PKK di Kota Batam dan Tanjungpinang masing-masing sebanyak 5.000 bibit yang mendukung pertanian rumah tangga.

C. Kelancaran Distribusi

1. Mengoptimalkan KAD antara lain melalui penguatan peran BUMD dalam pengendalian inflasi dengan mendatangkan cabai dari Sulawesi Utara.
2. Pengawasan dan pemantauan *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota serta pengawasan terhadap jalur distribusi.
3. Memastikan kelancaran transportasi laut dan melakukan pemantauan agar tidak terjadi spekulasi harga angkutan laut
4. Dukungan prioritas bongkar muat kapal angkutan bahan pokok dan penjaminan sertifikasi komoditas pangan yang masuk ke wilayah Kepri dan melaksanakan *business matching* antara distributor di Kepri dengan produsen di daerah lain

D. Komunikasi efektif

1. Melaksanakan koordinasi dan sinergi melalui kegiatan data *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi/Kota/Kab dan melakukan pengendalian ekspektasi masyarakat dengan mendiseminasikan kecukupan pasokan, kewajaran harga serta mengampanyekan Himbauan Belanja Bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer selama periode Ramadan dan HBKN Idulfitri
2. Melaksanakan Koordinasi dan Sinergi Program antara lain melalui kegiatan Musrenbang, Bimbingan Teknis (Bimtek) Kerangka Ekonomi Makro Daerah oleh Bappeda Provinsi Kepri, Rapat Koordinasi, talkshow di media cetak, online serta televisi untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

1.1.4 Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan

Grafik 1.12 – Neraca Perdagangan di Kepri Tahun 2022-2024 (US\$ Juta/mtm)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)





Neraca perdagangan luar negeri Kepri hingga triwulan II 2024 menghasilkan Surplus Perdagangan sebesar US\$1.344,63 Juta. Angka tersebut diperoleh dari total nilai ekspor Kepri hingga bulan Juni 2024 yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impornya, khususnya dari golongan barang Bahan Bakar Mineral (Non Migas).

Pada bulan Juni 2024, secara bulanan, tercatat Surplus Perdagangan Internasional sebesar US\$171,76 miliar. Capaian tersebut tumbuh sebesar 81,46 persen (*mtm*).

Dalam meningkatkan kinerja neraca perdagangan internasional, Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah Kepri terus melakukan upaya terbaik dalam meningkatkan infrastruktur Hub Logistik dalam memajukan perekonomian dan pergerakan ekspor dan impor di Kepri. Dukungan ini diharapkan dapat membentuk keseimbangan antara impor dan ekspor produk demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekspor

Total nilai ekspor Kepri bulan Januari-Juni 2024 senilai US\$9.280,25 Juta. Nilai ekspor tersebut mengalami kontraksi sebesar 3,95 persen (*ctc*). Secara kumulatif, sektor Migas dan Non Migas mengalami kontraksi sebesar 12,81 persen (*ctc*) dan 1,57 persen (*ctc*) secara berturut-turut. Penurunan terbesar secara dominan dipengaruhi oleh turunnya hasil ekspor Hasil Minyak, Minyak Mentah, dan Hasil Tambang.

Grafik 1.13 – Perkembangan Ekspor Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (*mtm*)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Berdasarkan negara tujuan, produk ekspor didominasi dari Singapura US\$1.882,19 juta, USA US\$1.641,08 juta, dan Australia US\$827,21 juta. Ekspor ke Singapura didominasi oleh Produk Bahan Bakar Mineral 39,31 persen, Mesin/Peralatan Listrik 24,61 persen, serta Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik 12,23 persen, dan sisanya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share <7 persen.

Bila dilihat dari sisi fiskal, nilai ekspor yang mengalami pertumbuhan negatif juga berdampak pada sektor fiskal, khususnya Pendapatan Bea Keluar. Sampai dengan bulan Juni 2024, perolehan Bea Keluar mencapai Rp25,99 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 71,99 persen (*yoy*).

Grafik 1.14 – Perkembangan Impor Provinsi Kepri Bulanan Tahun 2022-2024 (*mtm*)



Secara kumulatif, nilai impor Kepri bulan Januari-Juni 2024 sebesar US\$7.935,63 Juta. Nilai impor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 14,96 persen (*ctc*). Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan impor migas sebesar 45,37 persen (*ctc*) dan sektor nonmigas juga mengalami penurunan sebesar 8,30 persen (*ctc*). Berdasarkan negara pemasok impor, impor di Kepri didominasi oleh Tiongkok US\$1.436,62 juta, Singapura US\$991,01 juta, dan Jepang US\$543,70 juta.

Kemudian, bila dilihat dari golongan penggunaan barang, impor di Kepri masih didominasi oleh Barang Baku dan Penolong (83,91 persen), yang disusul oleh Barang Modal (11,39 persen) dan Barang Konsumsi (4,70 persen). Barang Baku dan Penolong yang





menjadi mayoritas produk impor ke Kepri mencerminkan bahwa sektor unggulan di Kepri, ada pada sektor industri manufaktur, khususnya pada produk mesin dan peralatan listrik yang nantinya akan kembali di ekspor ke luar negeri.

Penurunan nilai ekspor secara tidak langsung juga berdampak terhadap Penerimaan Negara. Hingga bulan Juni 2024 Pendapatan Bea Masuk di Kepri mencapai Rp189,89 miliar dan tumbuh negatif sebesar 55,24 persen (yoy).

1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan di suatu daerah diukur dari persentase jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan sendiri merupakan ambang minimum pengeluaran untuk kebutuhan makanan dan non makanan agar tidak dikategorikan miskin. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kepri sebesar Rp787.211 per bulan per kapita. Garis tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.685 atau 6,02 persen (yoy).

Hingga bulan Maret 2024, tingkat Kemiskinan Kepri bulan Maret 2024 sebesar 138,30 ribu jiwa atau 5,37 persen dari total penduduk Kepri. Turun sebesar 2,94 persen (yoy) atau menurun ±4.200 ribu jiwa (yoy).

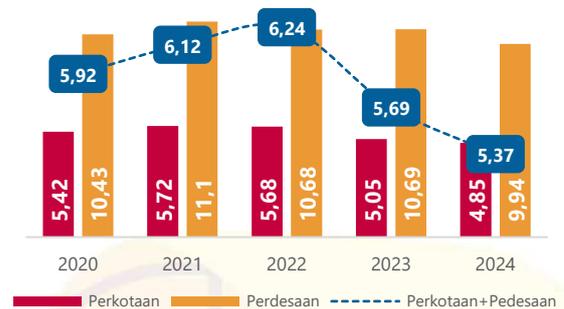
Grafik 1.15 – Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepri Tahun 2019-2024 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Angka ini berada di bawah angka kemiskinan Nasional sebesar 9,03 persen. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kepri yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2024 sebesar 5,69 persen, persentase penduduk miskin di Kepri (5,37 persen) masih berada dalam rentang yang aman dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 1.16 – Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Kepri Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Hingga bulan Maret 2024, penduduk miskin yang tinggal di wilayah perkotaan sejumlah 112,28 ribu atau 4,85 persen dari total penduduk di perkotaan. Kemudian, jumlah penduduk miskin di Kepri yang tinggal di wilayah pedesaan sejumlah 26,03 ribu orang atau 9,94 persen dari total penduduk di pedesaan. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di perkotaan dan pedesaan tersebut turun sebesar 3,96 persen (yoy) dan 7,02 persen (yoy).

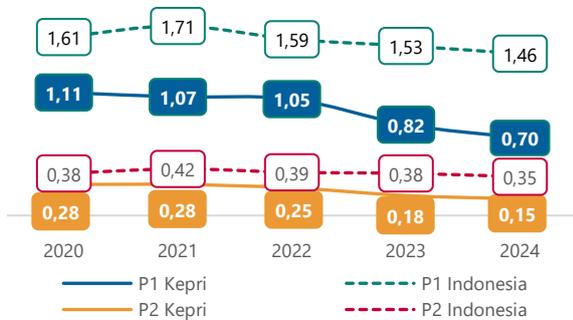
Selain persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan makro juga dapat dilihat dari Tingkat Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P2). P1 menjelaskan tentang ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan, P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.





Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 1.17 – Perkembangan Indeks P1 dan P2 Kepri Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pada bulan Maret 2024, Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) di Kepri sebesar 0,70, mengalami penurunan 14,63 persen (yoy). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kepri sebesar 0,15 juga turun 16,66 persen (yoy).

Penurunan pada P1 menggambarkan semakin dekatnya jarak antara rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinan. Kemudian, penurunan pada P2 menunjukkan semakin dekatnya nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepri.

Grafik 1.18 – Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Regional Sumatera Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, Tingkat Kemiskinan Kepri pada bulan Maret 2024 menempati posisi terendah kedua terbawah sebelum Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (4,55 persen). Kemudian, bila dilihat secara Nasional, Tingkat Kemiskinan Kepri berada di urutan ke-33 se-Indonesia.

Hingga periode triwulan II 2024, Pemerintah Pusat melalui APBN yang berperan sebagai stabilisasi perekonomian telah menjalankan beberapa program yang dapat mengurangi kemiskinan, antara lain melalui Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Realisasi Rp3.024,75 miliar atau 51,81 persen dari Pagu 2024); Pemberian Program subsidi dengan UMKM, serta percepatan Belanja Pemerintah Pusat dalam membangun fasilitas umum yang memberikan *multiplier effects* bagi masyarakat.

Pemerintah Pusat juga turut mendorong daya beli masyarakat, khususnya pada pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan melalui Dana Desa. Pada tahun 2024, Dana Desa di Kepri dialokasikan sebesar Rp218,84 miliar yang diberikan kepada kepada 275 desa di 5 Kabupaten di Kepri (Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, dan Anambas).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengalokasian Dana Desa tersebut diprioritaskan atas Dana Desa (1) *Earmark* Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp34,61 miliar (30,67 persen dari Pagu); (2) *Earmark* Ketahanan Pangan Rp47,45 miliar (42,06 persen dari Pagu); dan (3) *Earmark Stunting* Rp30,76 miliar (27,27) persen dari Pagu).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kepri juga menyiapkan 4 (empat) **upaya pengentasan kemiskinan** antara lain:

1. Penanganan Infrastruktur Dasar (Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, Sanitasi, Air Bersih, dan Listrik);
2. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (JKN, Pemberian Beras Bersubsidi, dan Program Keluarga Harapan (PKH));
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Posyandu, RT/RW, BUMdes, UMKM, Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan).

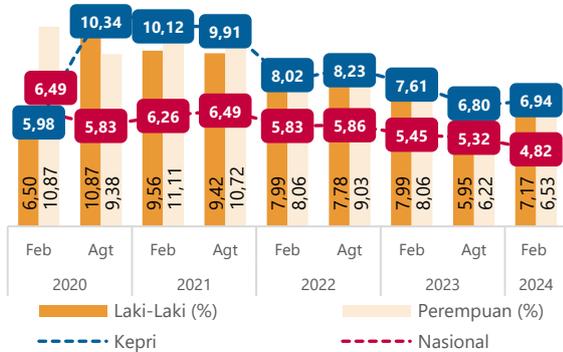




4. Program Pemerian Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu.

1.2.2 Tingkat Pengangguran

Grafik 1.19 – Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri per Tahun 2020-2024

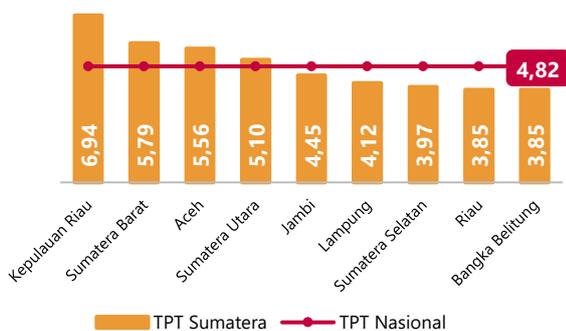


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Penurunan tingkat pengangguran menjadi salah indikator dari perkembangan ekonomi di suatu regional. Pada bulan Februari 2024, Kepri mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,94 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 67,14 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,67 persen poin dibanding dengan Februari 2023 (yoy), hal tersebut mencerminkan adanya pemulihan yang berkelanjutan dalam sektor ketenagakerjaan di Kepri.

Pada bulan Februari 2024, jumlah orang yang bekerja di Kepri tercatat mencapai 1.003,39 ribu orang atau 93,06 persen dari total Angkatan Kerja di Kepri. Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah penduduk, total Angkatan Kerja yang bekerja di bulan Februari 2024 menurun 19,73 ribu orang (yoy).

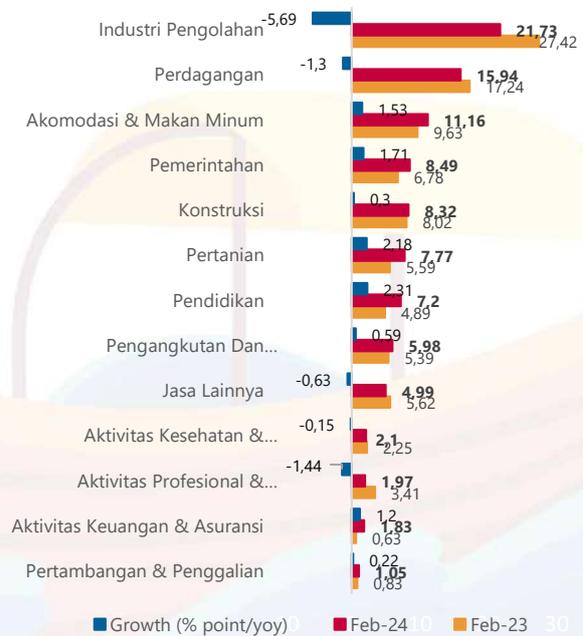
Grafik 1.20 – Angka TPT Per Provinsi di Regional Sumatera bulan Februari 2024 (persen)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Pada bulan Februari 2024, TPT di Kepri berada pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-dua tertinggi Nasional, setelah Banten dengan angka TPT sebesar 7,02. Namun demikian, persentase perubahan penurunan TPT Kepri juga menjadi yang tertinggi ke-dua Nasional sebesar 1,58 persen poin (yoy). Penurunan TPT tersebut juga menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

Grafik 1.21 – Porsi Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha di Kepri Tahun 2023-2024 (persen)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Selama periode Februari 2023 hingga Februari 2024, komposisi tenaga kerja yang ada di Kepri diserap oleh 3 (tiga) sektor Lapangan Usaha, yaitu sektor Industri Pengolahan (21,73 persen), Perdagangan (15,94 persen) dan Akomodasi dan Makanan Minuman (11,16 persen).

Namun demikian, sektor Industri Pengolahan juga menjadi sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar dengan pertumbuhan negatif sebesar 5,69 persen (yoy).





1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

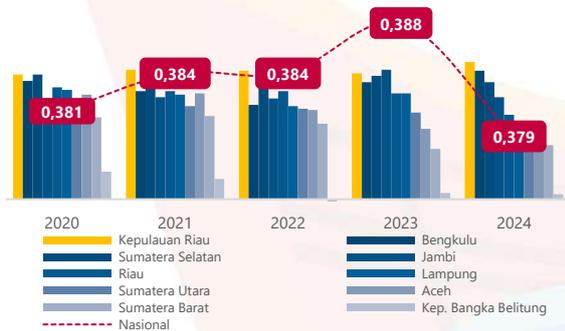
Grafik 1.22 – Rasio Gini di Kepri Tahun 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Pada Maret 2024, Gini Ratio Kepri sebesar 0,349, masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang pada Maret 2023 berada di angka 0,379. Bila dibandingkan dengan periode Maret 2023, Rasio Gini Kepri tercatat meningkat sebesar 0,009 point (yoy).

Grafik 1.23 – Ketimpangan di Regional Sumatera per Februari 2024 (persen)



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Gini Rasio Kepri pada Semester I 2024 (Maret) menjadi yang tertinggi di Regional Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepri yang pada periode Maret 2024 tidak dirasakan secara merata. Artinya, golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam menikmati “kue” suksesnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam memberikan peran hadirnya Pemerintah bagi masyarakat dalam mengurangi tingkat pendapatan masyarakat, terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemda maupun Pempus dalam menurunkan gini ratio yang ada di Provinsi Kepri.

Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi ketimpangan di daerah, di antaranya dengan tetap menyalurkan bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja melalui akselerasi pembangunan, serta perbaikan standar pengupahan yang dibutuhkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

Pemerintah juga hadir dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan pada Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi, yang pada periode Januari-Juni 2024 telah direalisasikan sebesar Rp819,94 miliar.

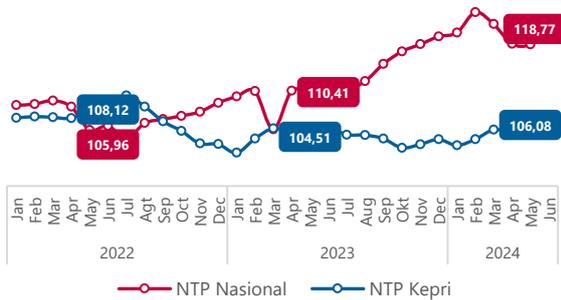
Program tersebut meliputi program pemberdayaan UMKM juga diberikan dalam pemberian subsidi pembiayaan usaha UMKM baik melalui KUR/UMi/dan Program Pembiayaan Bunga nol persen dari Pemprov Kepri. Kemudian, sebagai bantalan sosial, APBN juga telah memberikan BLT kepada para KPM baik melalui TKD ataupun belanja K/L. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan juga terus diberikan baik oleh Pempus maupun Pemda, salah satunya adalah melalui Balai Latihan kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal.





1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Grafik 1.24 – Perkembangan NTP di Kepulauan Riau Tahun 2022 – Q2 2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

NTP merupakan NTP Kepri pada bulan Juni 2024 sebesar 105,55 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,42 persen (yoy). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (118,77), hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) di Kepri bulan Juni 2024 mengalami pertumbuhan negatif 0,50 persen dibandingkan dengan Mei 2024.

Pada periode Juni 2024 sebagian subsektor mengalami penurunan dan sebagian lagi mengalami peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). Subsektor yang mengalami penurunan NTP di Kepri secara berturut-turut adalah subsektor Tanaman Pangan sebesar -0,12 persen (yoy) dan Holtikultura -2,53 persen (yoy). Kemudian subsektor tanaman Perkebunan Rakyat tumbuh 1,20 persen (yoy) dan subsektor peternakan tumbuh 0,64 persen (yoy).

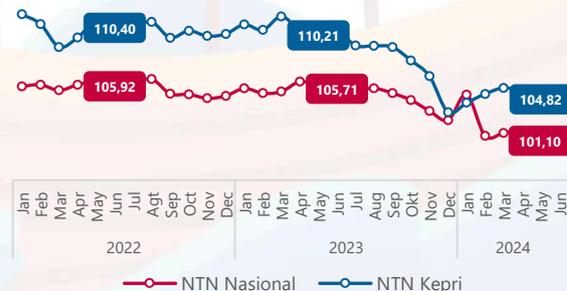
Beberapa tantangan terkait pengembangan sektor pertanian di Kepri antara lain: (1) kurangnya dukungan infrastruktur kegiatan pertanian (irigasi, jalan usaha tani, bangunan pengolahan hasil pertanian); (2) belum optimalnya kapasitas petani dan pelaku perkebunan karena karakteristik geografis Kepri yang dikelilingi oleh bakau dan tanah bauksit sehingga perlu SDM yang cakap dalam mengelola pertanian;

(3) serta perlunya pengembangan penggunaan teknologi pertanian baik dalam pengolahan maupun keberlanjutan pemasaran. Selain itu, lahan pertanian yang tidak terlalu luas juga menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kepri.

Selanjutnya, di tahun 2024 Pemerintah Pusat melalui APBN telah mengalokasikan Pagu Belanja pada Kementerian Pertanian sebesar Rp8.784,82 miliar yang hingga bulan Juni 2024 telah direalisasikan sebesar Rp3.099,48 miliar atau 35,28 persen dari Pagu 2024. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk melaksanakan Kegiatan (1) Penguatan Pembenihan Tanaman Perkebunan; (2) Pengeolahan Dan Pemasaran Hasil Holtikultura; (3) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan; (4) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dan Beberapa Kegiatan Di Bidang Pertanian Lainnya.

1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Grafik 1.25 – Perkembangan NTN di Kepri Tahun 2022 – sems 1 2024



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Kondisi geografis Kepri dengan panjang garis pantai 8.561,33 Km. Dengan kondisi demikian, tentunya Kepri menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Kepri telah memberikan posisi yang cukup kuat dalam membangkitkan kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan untuk kemajuan masyarakat Kepri.

NTN adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk perikanan





tangkap dan budidaya yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghasilkan produksi perikananannya. NTN terdiri atas nilai tukar perikanan tangkap dan nilai tukar perikanan budidaya.

NTN Kepri di bulan Juni 2024 yang tergambar pada Grafik 1.21 sebesar 104,05. Angka NTN tersebut mengalami penurunan sebesar 6,59 persen (*yoy*) dan tumbuh negatif sebesar 0,77 persen (*mtm*) dan berada di atas angka NTN Nasional (101,10).

Namun demikian, capaian NTN tersebut masih berada di bawah sasaran NTN pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan di Kepri yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 116. Maka dari itu pemerintah akan terus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan.

Turunnya Nilai Tukar Nelayan disebabkan penurunan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 0,51 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) naik sebesar 0,23 persen. Penurunan Indeks Harga yang Diterima Nelayan secara garis besar diakibatkan oleh turunnya harga komoditi ikan duri sebesar 6,53 persen; kembung sebesar 5,55 persen; rajungan sebesar 5,06 persen; selar sebesar 5,00 persen; golok-golok sebesar 3,47 persen; baronang sebesar 1,69 persen; dan kakap sebesar 1,13 persen.

Terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan sektor perikanan di Kepri, khususnya tantangan dari segi ekonomi dan industri. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) masih terdapat kasus *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di pulau terluar Kepri seperti di Natuna dan berdampak pada hilangnya hasil laut Kepri yang seharusnya menjadi bagian nelayan lokal; (2) pencemaran

laut oleh pembuangan limbah (minyak hitam) dari kapal internasional di perairan Selat Malaka; (3) lemahnya permodalan dalam menunjang usaha perikanan khususnya, bagi usaha kecil dan menengah; serta (4) teknologi pengolahan perikanan yang masih terbatas dan belum terstandar berstandar ekspor.

Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program.

Sampai dengan triwulan II 2024, Pagu Belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kepri adalah sebesar Rp105,96 miliar. Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp38,18 miliar atau mencapai 36,03 persen dari total pagu TA 2024.

Beberapa kegiatan mendorong pengembangan sektor perikanan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) operasi pengawasan sumber daya alam; (3) dukungan pembinaan UMKM; (4) fasilitasi dan pembinaan industri; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para nelayan untuk meningkatkan kualitas produksinya.

1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Grafik 1.26 - Perkembangan IPM Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan atas capaian hasil pembangunan suatu wilayah/daerah dalam





aspek pembangunan manusia. Tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, IPM juga memiliki esensi dasar sebagai indikator atas kebahagiaan manusia dalam aspek kehidupan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kepri secara perlahan terus meningkat sejalan dengan pencapaian ekonomi nasional dan daerah. Kenaikan IPM Kepri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Angka dari IPM bukan hanya mengukur tingkat kesejahteraan manusia namun juga mengukur tingkat pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan dalam mendapatkan pengetahuan.

Angka IPM terdiri dari 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pendidikan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*) diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) di wilayah yang bersangkutan.

Sejak tahun 2023, terdapat perubahan metode perhitungan IPM, yang sebelumnya menggunakan UHH dengan tahun dasar 2010, saat ini telah menggunakan UHH dengan tahun dasar 2020. Hal tersebut akhirnya menyebabkan adanya perubahan IPM yang berbeda sejak tahun 2020 hingga tahun 2023.

Pembangunan manusia di Kepri terus mengalami kemajuan. Sejak 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level "tinggi". Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, angka **IPM Kepri pada tahun 2023 dengan tingkat IPM tertinggi ke-tiga Nasional** sebesar 79,08 dan tumbuh sebesar 0,76 persen (*yoy*). Bila dilihat per kab/kota di Kepri, di sepanjang tahun 2023 angka IPM tertinggi berada di Kota Batam sebesar 82,64 dan IPM terendah ada di Kabupaten Lingga pada angka 72,23.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, **IPM Kepri berada pada**

peringkat tertinggi selama empat tahun berturut-turut. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung secara berturut-turut.

Grafik 1.27 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2023

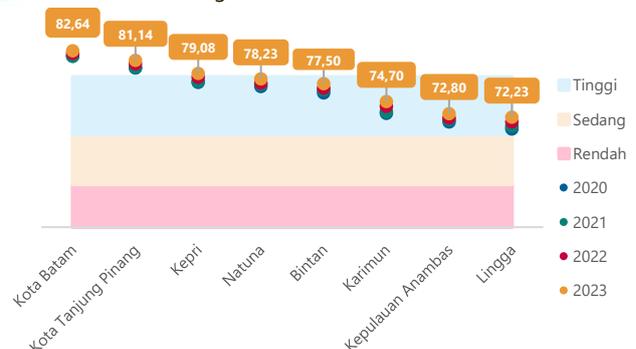


Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dengan IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut. Kemudian, IPM Kepri di tahun 2023 juga telah melampaui angka IPM yang ditargetkan dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yaitu 77,14.

IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, IPM < 60 (rendah), 60 ≤ IPM < 70 (sedang), 70 ≤ IPM < 80 (tinggi), IPM ≥ 80 (sangat tinggi). Bila dilihat berdasarkan Kab/Kota, IPM dengan kategori tertinggi ada di Kota Batam dan Tanjungpinang dengan nilai IPM masing-masing sebesar 82,64 dan 81,14.

Grafik 1.28 – Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kepri per Kategori IPM Tahun 2020 – 2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)





Selanjutnya, berdasarkan kategori IPM yang terdapat pada Grafik 1.28, dapat dilihat bahwa profil IPM disepanjang tahun 2020-2023 pada seluruh kab/kota di Provinsi Kepri terbagi atas kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menjadi Kota dengan kategori IPM "Sangat Tinggi" ≥ 80 dengan IPM di tahun 2023 masing-masing sebesar 82,64 dan 81,14. Kemudian, untuk Kepri, Kab. Natuna, Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Kep. Anambas, dan Lingga berada di kategori IPM "Tinggi". Keberlanjutan peningkatan IPM Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari indikator pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita.

UHH penduduk Kepri di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen (yoy), menjadi 74,90 dari sebelumnya 74,62. Peningkatan UHH dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70,50 tahun.

masyarakat untuk dapat memiliki akses ke pendidikan lebih lama, baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dukungan tersebut antara lain didukung dari adanya penyaluran BOS kepada siswa-siswa di sekolah negeri, peningkatan infrastruktur, serta kesadaran dari masyarakat akan pentingnya Pendidikan.

Peningkatan juga terjadi pada **pengeluaran per kapita** yang tumbuh sebesar 3,66 persen di tahun 2023 (yoy) yang menandakan adanya peningkatan pengeluaran masyarakat Kepri, baik dari sisi konsumsi maupun sisi investasi. Perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepri yang tergambar melalui keempat indikator pembentuk IPM yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya kualitas hidup masyarakat Kepri yang semakin baik.

Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan IPM di Kepri khususnya untuk mendukung Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan.

Grafik 1.29 – Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2023



Sumber Data: BPS, 2024 (diolah)

HLS Kepri pada tahun 2023 meningkat 0,46 persen menjadi 13,05 tahun dari yang sebelumnya 12,99 tahun, peningkatan tersebut memberikan arti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun.

Lebih lanjut, angka **RLS** di Kepri juga mengalami peningkatan yang telah mencapai 10,41 persen, tumbuh 0,39 persen (yoy). Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial budaya dan ekonomi yang turut mendukung

Sampai dengan triwulan II 2024, **Belanja Fungsi Kesehatan** telah direalisasikan sebesar Rp89,14 miliar atau tercapai 41,05 persen dari Pagu tahun 2024. Belanja tersebut difokuskan pada Program Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan dan JKN, Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.





Pada tahun 2024, **Belanja Fungsi Pendidikan** di Kepri difokuskan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi.

Sampai dengan akhir bulan Juni 2024, Belanja Bidang Pendidikan telah direalisasikan sebesar Rp281,34 miliar atau mencapai 31,50 persen dari Pagu tahun 2024. Belanja tersebut difokuskan pada peningkatan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, serta Program Perpustakaan dan Literasi.

Selain itu, melalui **Belanja Transfer ke Daerah** (TKD) tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dengan Pagu masing-masing sebesar Rp594,55 miliar, Rp287,35 miliar, dan Rp12,24 miliar.

Sampai dengan triwulan II 2024, realisasi BOS telah mencapai Rp305,23 miliar atau 51,35 persen dari Pagu, realisasi Dana BOP PAUD telah terealisasikan sebesar Rp12,40 miliar atau 50,77 persen dari Pagu, dan realisasi Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp6,41 miliar atau 52,39 persen dari Pagu tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kepri juga telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Provinsi Kepri. Pada tahun 2024, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kepri fokus pada tiga program prioritas yaitu pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, percepatan pembentukan satgas dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, dan optimalisasi *chromebook* dan akun belajar.id.





A. Potensi Geografis:

Kabupaten Anambas merupakan daerah Kepulauan (98,65 persen Lautan) dengan total 255 pulau dengan keindahan surga bawah laut untuk para pecinta *diving* dan *snorkeling*, memiliki keunikan geopark dan bebatuan, dengan 106 titik konservasi terumbu karang dan 2 juta hektar taman wisata perairan.

Berada pada wilayah strategis laut cina selatan dimana pulau terluar berbatasan langsung dengan Negara Singapura, Malaysia dan Vietnam sehingga Kepulauan Anambas mudah dijangkau oleh wisatawan mancanegara.

Objek daya tarik keindahan wisata natural dengan kondisi pasir putih dan bebatuan alami yang belum banyak terjamah oleh manusia meliputi:

1. **Wisata Sejarah dan Spiritual:** Pulau Kuku
2. **Wisata Keindahan Surga Bawah Laut:**
Pantai Padang Melang
Pantai Kusik
Pulau Nguan Ray
Pulau Damar
Pantai Teluk Kampak
3. **Wisata Alam:** Air Terjun Ulu Maras
4. **Wisata Kuliner:** Kebuyut, Lakse, Kernas

B. Ketersediaan Hotel dan Penginapan

Terdapat 331 Hotel dan Resort memukau yang menawarkan berbagai keindahan alam langsung ke bibir pantai dan keindahan bawah laut di Kepulauan Anambas.

Wisatawan juga dapat merasakan gaya hidup kearifan lokal budaya di Anambas dengan menginap di rumah warga lokal (*Homestay*).

C. Event Pariwisata di Kepulauan Anambas

1. **International Yacht Rally**
Anambas menjadi *Checkpoint 'International Yacht Rally'* diikuti peserta dari negara: Swedia, New Zealand, Australia, Belanda, Prancis, Yunani, dan Inggris.
2. **Nasional Festival Padang Melang (Marine & Cultural Celebration)** Termasuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), yaitu 100 program unggulan Kementerian Pariwisata RI.
3. **Sail Anambas**
4. **Semarak Anambas**
5. **Permainan Rakyat Kute Siantan**
6. **Pentas Seni dan Budaya Pulau Tarempa**
7. **Lomba Jongkong Layar Indonesia**

D. Tantangan Pengelolaan Pariwisata Kepulauan Anambas

Keindahan **Private Beach** berlokasi *remote* dan terisolir menyebabkan daerah wisata **belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai seperti:**

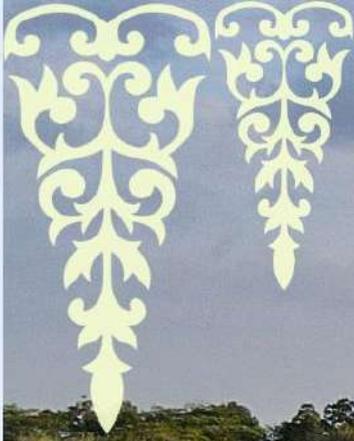
1. Listrik: desa terbaik memiliki listrik ± 12 jam/hari dari sore hari s.d. jam 7 pagi, sementara terdapat desa/pulau lain yang masih mengalami krisis listrik dan belum terjangkau sinyal seluler.
2. Transportasi: moda transportasi menuju destinasi wisata belum terintegrasi dan belum dibuka jalur langsung dengan internasional.

E. Peluang Pariwisata Kepulauan Anambas

1. Pernah menjadi **Pulau Tropis terbaik di Asia** versi media CNN Internasional.
2. **Keindahan surga bawah laut telah diakui internasional**, ditandai dengan kunjungan berlibur artis dunia, seperti **legenda sepakbola David Beckham**.
3. Perlunya **Publikasi massive dan penyelenggaraan Event Internasional** dalam skala besar untuk memancing kedatangan turis mancanegara.



Foto: Kabupaten Anambas, Google



BAB II

Analisis Fiskal Regional

Desa Poyotomo, Kabupaten Bintan

Desa Poyotomo merupakan salah satu kawasan agrowisata persawahan yang ada di Kabupaten Bintan. Agrowisata ini menawarkan keindahan persawahan yang sejuk dengan nuansa kampung. Sejumlah pendopo untuk bersantai juga ditawarkan disana. Pengunjung juga bisa menikmati makan hasil panen petani dan mengetahui proses panen padi hingga proses packing beras hasil panen.





Regional Fiscal Review

- Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Negara
- Analisis Realisasi Anggaran Belanja Negara
- Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
- Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah
- Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian



2.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilisasi dijalankan melalui **peran APBN sebagai shock absorber** untuk menstabilkan harga. Pada fungsi alokasi, APBN berperan untuk membuat ekonomi semakin efisien dan tidak distortif. Pada fungsi distribusi, APBN berperan sebagai alat

pemerataan keadilan. Ketiga fungsi tersebut tak hanya dijalankan dalam skala nasional, tetapi juga pada tingkat regional. APBN dianggarkan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Kepri yang sejahtera melalui peningkatan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun perkembangan APBN di Kepri tergambar pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 – Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri Triwulan II, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			Growth 2023-2024
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	11,510.13	5,858.63	50.90%	14,139.98	6,951.82	49.16%	18.66%
Penerimaan Perpajakan	9,209.34	4,932.79	53.56%	11,474.64	5,368.60	46.79%	8.83%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,300.79	925.84	40.24%	2,665.34	1,583.22	59.40%	71.00%
BELANJA NEGARA	19,198.78	6,530.25	34.01%	17,646.59	7,248.33	41.07%	11.00%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	9,898.10	2,939.51	29.70%	9,603.43	3,469.66	36.13%	18.04%
Belanja Pegawai	2,072.02	1,046.42	50.50%	2,152.53	1,192.89	55.42%	14.00%
Belanja Barang	4,944.82	1,327.40	26.84%	4,325.79	1,561.28	36.09%	17.62%
Belanja Modal	2,630.22	510.64	19.41%	2,864.36	712.46	24.87%	39.52%
Bantuan Sosial	4.59	1.51	32.92%	5.84	3.02	51.81%	99.97%
Belanja Lainnya	246.44	53.54	21.73%	254.91	0.00	0.00%	-100.00%
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	9,300.45	3,590.74	38.61%	8,043.16	3,778.67	46.98%	5.23%
Dana Transfer Umum	6,922.17	2,739.12	39.57%	5,883.54	2,920.24	49.63%	6.61%
Dana Alokasi Umum	4,474.84	2,241.57	50.09%	4,817.40	2,541.63	52.76%	13.39%
Dana Bagi Hasil	2,447.33	497.55	20.33%	1,066.15	378.61	35.51%	-23.90%
Dana Transfer Khusus	1,979.78	680.23	62.25%	1,887.60	675.51	35.79%	-0.69%
Dana Alokasi Khusus Fisik	805.94	110.67	13.73%	648.36	51.13	7.89%	-53.80%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	1,173.84	569.56	48.52%	1,239.24	624.38	50.38%	9.63%
Dana Insentif Fiskal	166.77	31.56	18.93%	53.18	26.59	50.00%	-15.76%
Dana Desa	225.94	139.83	61.89%	218.84	156.33	71.44%	11.80%
Transfer Hibah	5.80	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	-7,688.65	-671.62	8.74%	-3,506.61	-296.51	8.46%	55.85%

Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Target Pendapatan Negara di Kepri sebesar Rp14.139,98 miliar, meningkat 22,85 persen (yoy) pada tahun 2024. Penerimaan Perpajakan merupakan sektor dengan target penerimaan tertinggi yaitu sebesar Rp11.474,64

miliar. Apabila dirinci lebih lanjut, Pajak Dalam Negeri ditargetkan sebesar Rp10.822,28 miliar, dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp652,37 miliar. Tingginya target Penerimaan Perpajakan ini sesuai dengan Undang-undang





Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan target PPh sebesar 14,0 persen, PPN dan PPnBM sebesar 13,0 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat menstimulus perkembangan ekonomi Kepri di berbagai sektor.

Pendapatan sektor **PBB** mengalami penurunan target sebesar 53,2 persen dikarenakan terjadi pengurangan keluasaan dan perpindahan wajib pajak PBB P5L. Salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh penurunan harga komoditas CPO dan perubahan lokasi ekspor pengolahan minyak Propana dan Butana PT. Pertamina ke Provinsi Aceh.

Penerimaan **PNBP** pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2.665,34 miliar, terdiri atas PNBP BLU dan PNBP lainnya.

Pagu Belanja APBN 2024 sebesar Rp17.646,59 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp9.603,43 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.043,16 miliar.

Berdasarkan alokasi Pagu Belanja Pemerintah Pusat, alokasi tertinggi berada pada Belanja Barang sebesar Rp4.325,79 miliar (45,04 persen dari total Pagu Belanja K/L), dan Belanja Modal sebesar Rp2.864,36 miliar (29,83 persen dari total Pagu Belanja K/L). Belanja Modal tahun 2024 difokuskan pada pembangunan Infrastruktur, sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan Investasi.

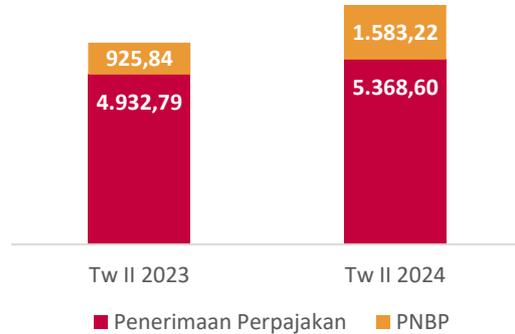
Apabila dilihat dari sisi **Belanja TKD** sebagian besar dialokasikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.817,40 miliar (59,89 persen dari total Pagu TKD), dan DAK Non Fisik sebesar Rp1.239,24 miliar (15,40 persen dari total Pagu TKD).

2.1.1 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan Negara telah terealisasi sebesar Rp6.951,82 miliar (49,16 persen dari Target) meningkat 18,66 persen (yoy),

menunjukkan kinerja yang positif sepanjang triwulan II 2024.

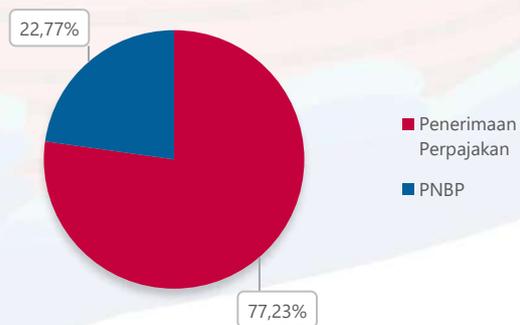
Grafik 2.1 - Realisasi Pendapatan Negara Triwulan II, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Realisasi Penerimaan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp5.368,60 miliar, PNBP sebesar Rp1.583,22 miliar. Hal ini kemudian secara porsi diketahui bahwa Penerimaan Perpajakan mendominasi realisasi Pendapatan Negara yaitu sebesar 77,23 persen apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP sebesar 22,77 persen sebagai mana tersaji dalam Grafik 2.2 berikut.

Grafik 2.2 – Porsi Realisasi Pendapatan Negara Triwulan II 2024



Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 46,79 persen dari Target, sedangkan PNBP menunjukkan kinerja yang lebih baik yaitu mampu terealisasi sebesar 59,40 persen dari Target.

Dari sisi PNBP lainnya, tingginya lalu lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal berdampak pada pertumbuhan realisasi akun PNBP Lainnya,





pertumbuhan Pendapatan BLU ditopang dengan semakin meningkatnya kinerja empat satker BLU, yaitu BP Batam, Poltek Negeri Batam, BLU RS

Bhayangkara Batam dan BLU RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang.

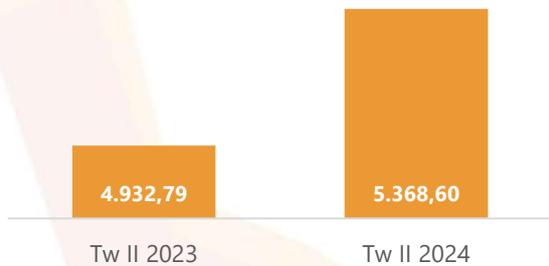
2.1.1.1 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Perpajakan

Tabel 2.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri Triwulan II, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	2023			2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
Penerimaan Perpajakan	9,209.34	4,932.79	53.56%	11,474.64	5,368.60	46.79%	8.83%
Pajak Dalam Negeri	8.528,78	4,392.30	51.50%	10.822,28	5,152.28	47.61%	17.30%
Pajak Perdagangan Internasional	680,56	540.50	79.42%	652,37	216.32	33.16%	-59.98%

Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Grafik 2.3 – Realisasi Pendapatan Perpajakan Triwulan II, 2023 s.d. 2024 (dalam Miliar Rupiah)



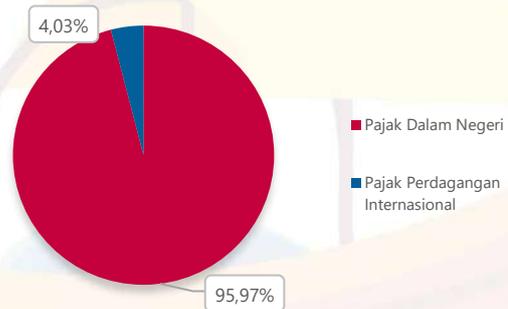
Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp5.368,60 miliar (46,79 persen dari Target), meningkat 8,83 persen (yoy). Penerimaan Perpajakan tertinggi pada **PPH** Rp778,22 miliar, meningkat 22,88 persen (yoy), diikuti **PPN** sebesar Rp76,17 miliar, meningkat 31,22 persen (yoy). Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut di antaranya didorong oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pasca pandemi Covid-19, penerapan kebijakan PPN 11 persen yang mulai berlaku sejak 1 April 2023, dan penerapan tarif efektif PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. **Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar** yaitu 95,97 persen dengan realisasi Rp5.152,28 miliar, sedangkan Pajak Perdagangan Internasional

memberikan kontribusi sebesar 4,03 persen dengan realisasi sebesar Rp216,32 miliar sebagaimana terlihat pada Grafik 2.4 berikut.

Grafik 2.4 – Porsi Penerimaan Perpajakan Triwulan II, 2024



Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Pada tahun 2024, Penerimaan Perpajakan tumbuh sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan terjadi pada Pajak Dalam Negeri sebesar 16,17 persen. Sedangkan **Pajak Perdagangan Internasional** mengalami kontraksi sebesar 68,63 persen.

Sampai dengan triwulan II 2024 **kinerja perpajakan mengalami pertumbuhan signifikan** disebabkan oleh penerapan peraturan penerapan tarif efektif PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Meskipun demikian, kinerja Pajak Perdagangan Internasional mengalami kontraksi yang sangat signifikan, kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja ekspor impor yang menurun, serta kebijakan





hilirisasi produk mentah menjadi produk olahan yang tidak terkena bea keluar.

2.1.1.1.1 Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Menurut Jenisnya

Tabel 2.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi Tw II 2023	Realisasi Tw II 2024	Selisih (2024 – 2023)	% Growth
1	PPh	4,279.12	5,242.54	963.42	22.51%
	PPh Migas	-0.02	0.46	0.48	-2433.73%
	PPh Non Migas	4,279.14	5,242.08	962.94	22.50%
	PPh Pasal 21	1,303.47	1,803.98	500.50	38.40%
	PPh Pasal 22	67.09	60.97	-6.12	-9.12%
	PPh Pasal 22 Impor	229.49	374.70	145.21	63.27%
	PPh Pasal 23	197.11	238.53	41.42	21.01%
	PPh Pasal 25/29 OP	115.20	123.22	8.02	6.96%
	PPh Pasal 25/29 Badan	1,525.72	1,515.23	-10.49	-0.69%
	PPh Pasal 26	264.43	451.42	186.98	70.71%
	PPh Final	576.62	674.02	97.40	16.89%
	PPh Non Migas Lainnya	0.00	0.01	0.01	-
2	PPN	415.21	457.22	42.01	10.12%
	PPN Dalam Negeri	391.15	411.09	19.95	5.10%
	PPN Impor	24.19	46.09	21.90	90.56%
	PPN Lainnya	-0.12	0.03	0.15	-127.41%
3	PPnBM	0.73	0.12	-0.61	-84.00%
	PPnBM Dalam Negeri	0.73	0.11	-0.61	-84.57%
	PPnBM Impor	0.00	0.00	0.00	0,00%
	PPnBM Lainnya	0.00	0.00	0.00	0,00%
4	PBB	2.91	2.53	-0.38	-13.02%
	PBB Perkebunan	0.19	0.52	0.33	178.38%
	PBB Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0,00%
	PBB Pertambangan. Mineral. dan Batu Bara	2.52	1.78	-0.74	-29.41%
	PBB Pertambangan Migas	0.00	0.00	0.00	0,00%
	PBB Pertambangan Panas Bumi	0.00	0.00	0.00	0,00%
	PBB Lainnya	0.20	0.23	0.03	15.08%
5	Pajak Lainnya	43.42	46.17	2.75	6.34%
	Total	4,741.38	5,748.58	1,007.19	21.24%

Sumber: ALCo DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Secara nominal, jenis pajak dengan selisih kenaikan tertinggi ada pada **PPh Pasal 21 sebesar Rp500,50 miliar**, PPh Pasal 26 sebesar Rp186,98 miliar, dan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp145,21 miliar. Peningkatan pada PPh Pasal 21 ini di dorong oleh penerapan tarif efektif PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Adapun jenis pajak dengan *growth (yoy)* tertinggi terdapat pada **PBB Perkebunan**

sebesar 178,38 persen (yoy), kemudian diikuti oleh PPN Impor sebesar 90,56 persen (yoy), dan PPh Pasal 26 sebesar 70,71 persen (yoy).

Kanwil DJP Kepri melakukan *extra efforts* berupa **penyuluhan perpajakan** kepada beberapa perusahaan besar dengan jumlah pegawai yang banyak dalam rangka meningkatkan Pajak atas WP Orang Pribadi, seperti pada PT. McDermott, dan beberapa perusahaan padat karya lainnya. Kanwil DJP Kepri juga menggelar *Executive Dialogue*





bersama dengan BP Batam, BPKP, serta Gubernur Provinsi Kepri dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di Provinsi Kepri.

Jenis pajak yang mengalami penurunan signifikan salah satunya pajak **PPH Pasal 25/29**

Badan yang menurun sebesar Rp10,49 miliar atau 0,69 persen (yoy). Adapun PPh 25 merupakan pembayaran angsuran bulanan atas PPh sedangkan PPh 29 merupakan kekurangan pembayaran PPh sehingga sifat dari kedua jenis PPh ini insidental dan tidak dapat diprediksi.

2.1.1.1.2 Analisis Kinerja Perpajakan Sektoral

Tabel 2.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Nama Sektor	Tw II 2023	Tw II 2024	Selisih	% Growth	% Kontrib.
1	Industri Pengolahan	1,961.77	2,419.04	457.27	23.31%	42.08%
2	Perdagangan Besar Dan Eceran Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	604.49	845.49	241.00	39.87%	14.71%
3	Konstruksi	214.82	449.36	234.53	109.17%	7.82%
4	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5.37	405.99	400.62	7461.97%	7.06%
5	Pengangkutan Dan Pergudangan	266.99	357.40	90.41	33.86%	6.22%
6	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	170.64	255.46	84.81	49.70%	4.44%
7	Pejabat Negara. Karyawan. Pensiunan. Tidak/Belum Bekerja	0.00	157.88	157.88	-	2.75%
8	Pengadaan Listrik. Gas. Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	1.72	153.35	151.63	8820.65%	2.67%
9	Pertambangan dan Penggalian	0.00	130.20	130.20	-	2.26%
10	Real Estate	20.46	126.92	106.46	520.28%	2.21%
11	Aktivitas Profesional. Ilmiah Dan Teknis	12.63	104.38	91.75	726.31%	1.82%
12	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. Ketenagakerjaan. Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	65.76	89.97	24.21	36.81%	1.57%
13	Informasi Dan Komunikasi	23.48	78.69	55.21	235.19%	1.37%
14	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	20.98	76.17	55.19	263.01%	1.33%
15	Aktivitas Jasa Lainnya	5.73	45.90	40.17	700.41%	0.80%
16	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	27.29	25.03	-2.26	-8.28%	0.44%
17	Treatment Air. Treatment Air Limbah. Treatment Dan Pemulihan Material Sampah. Dan Aktivitas Remediasi	0.00	17.21	17.21	-	0.30%
18	Pendidikan	9.24	15.11	5.87	63.51%	0.26%
19	Kesenian. Hiburan Dan Rekreasi	7.12	10.58	3.45	48.51%	0.18%
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja	0.00	0.50	0.50	-	0.01%
21	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	0.55	0.00	-0.55	-100.00%	0.00%
22	Klu Tidak Diketahui	1,293.35	0.00	-1,293.35	-100.00%	0.00%
23	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang. Pembuangan Dan Pembersihan Limbah Dan Sampah	12.44	0.00	-12.44	-100.00%	0.00%
24	Pertanian. Kehutanan. Dan Perikanan	16.15	-16.12	-32.27	-199.80%	-0.28%
Total		4,741.00	5,748.51	1,007.51	21.25%	100.00%

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2024 (diolah)

Sektor pajak di Kepri masih di dominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 42,08 persen, sektor

Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) dengan kontribusi sebesar 14,71 persen, dan sektor





Konstruksi sebesar 7,82 persen. Dominasi sektor-sektor tersebut di Kepri masih terus menguat, di dorong oleh berkembangnya kawasan industri di Kota Batam, Bintan, Kab. Karimun dan Kota Tanjungpinang.

Sektor dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor pajak Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin yang

meningkat sebesar 8.820,65 persen meskipun dengan kontribusi yang terbilang kecil sebesar 2,67 persen. Selanjutnya pertumbuhan yang tinggi juga terjadi pada sektor pajak Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat sebesar 7461,97 persen dan sektor Aktivitas Profesional. Ilmiah Dan Teknis yang meningkat 726,31 persen.

2.1.1.1.3 Analisis Kinerja Perpajakan Sektoral terhadap PDRB

Tabel 2.5 - Kontribusi Realisasi Pajak Sektoral terhadap PDRB Kepri Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Nama Sektor	Pajak s.d. Tw II 2024	PDRB s.d. Tw II 2024	Kontribusi Pajak Terhadap PDRB
1	Jasa Perusahaan	0,50	2,63	19,10%
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,21	169,07	10,18%
3	Transportasi dan Pergudangan	357,40	3.614,97	9,89%
4	Jasa lainnya	45,90	535,79	8,57%
5	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	405,99	4.813,19	8,43%
6	Pengadaan Listrik dan Gas	153,35	1.890,01	8,11%
7	Real Estate	126,92	1.915,51	6,63%
8	Jasa Keuangan dan Asuransi	255,46	4.734,99	5,40%
9	Perdagangan Besar - Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	845,49	15.836,58	5,34%
10	Industri Pengolahan	2.419,04	71.039,73	3,41%
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76,17	3.292,35	2,31%
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,03	1.477,79	1,69%
13	Informasi dan Komunikasi	78,69	4.836,02	1,63%
14	Konstruksi	449,36	34.651,33	1,30%
15	Pertambangan dan Penggalian	130,20	16.337,31	0,80%
16	Jasa Pendidikan	15,11	2.212,35	0,68%
17	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-16,12	4.997,46	-0,32%
Total		5.385,71	172.357,08	3,12%

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2024 (diolah)

Meskipun Industri Pengolahan merupakan sektor dengan realisasi Penerimaan Perpajakan dan realisasi PDRB tertinggi, sektor dengan **rasio pajak terhadap PDRB tertinggi** terdapat pada **Jasa Perusahaan sebesar 19,10 persen**, kemudian disusul berturut-turut oleh sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 10,18 persen dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,89 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan sangat potensial, didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas ekspor impor yang terpusat di wilayah Kepri. Sektor ini akan menjadi salah satu sektor potensial dalam 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan stimulasi kemajuan teknologi dan komunikasi di era *cyberspace*, yaitu sektor transportasi dan pergudangan bergantung pada sektor perdagangan sebagai penunjang distribusi barang guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.





2.1.1.2 Analisis Realisasi dan Growth Bea dan Cukai

Tabel 2.6 – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	Tw II 2023			Tw II 2024			Growth (2023-2024)
	Target	Real	%	Target	Real	%	
Bea Masuk	618.08	446.37	72.22%	405.67	189.89	46.81%	-57.46%
Bea Keluar	168.23	92.76	55.14%	246.79	25.99	10.53%	-71.99%
Cukai	22.59	9.36	41.43%	22.13	19.58	88.47%	109.22%
Total	808.90	548.49	67.81%	674.59	235.45	34.90%	-57.07%

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri dan KPU BC Batam, 2024 (diolah)

Realisasi Bea dan Cukai di Kepri sebesar Rp235,45 miliar, mengalami kontraksi 57,07 persen (yoy). Realisasi ini terdiri atas Bea Masuk Rp189,89 miliar (46,81 persen terhadap target 2024), Bea Keluar Rp25,99 miliar (10,53 persen terhadap Target 2024), dan Cukai 19,58 miliar (88,47 persen terhadap target 2024). Adapun rincian penerimaan Bea dan Cukai mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana Tabel 2.6.

Growth realisasi Bea dan Cukai cenderung menurun pada triwulan II 2024, kontraksi tertinggi terjadi pada Bea Keluar sebesar 71,99 persen (yoy), diikuti oleh penerimaan Bea Masuk sebesar 57,46 persen (yoy).

Kontraksi pada Bea Masuk disebabkan beberapa hal, yaitu: penurunan aktivitas importasi kebutuhan pembangunan KEK, dikarenakan pembangunan KEK sudah hampir selesai berdampak pada menurunnya frekuensi dan volume impor.

Kontraksi Bea Keluar disebabkan penurunan tarif harga referensi Bea Keluar serta penurunan volume ekspor Top 3 komoditi CPO dan turunannya, yaitu CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein.

Realisasi Cukai menjadi satu-satunya jenis penerimaan Bea dan Cukai yang mengalami pertumbuhan positif sangat tinggi, sebesar 109,22 persen (yoy). Komponen penyumbang Cukai terbesar yaitu Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA), serta Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang didorong oleh peningkatan permintaan pita cukai (CK-1) dari beberapa perusahaan rokok/tembakau yang mengalihkan penjualan dari penjualan luar negeri ke penjualan di daerah lokal. Optimalisasi pendapatan Cukai Hasil Tembakau masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan koordinasi dan inpeksi terhadap pihak terkait dalam upaya pemberantasan maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki cukai.

2.1.1.2.1 Analisis Kinerja Bea Masuk Sektoral Kanwil Khusus DJBC Kepri dan KPU BC Batam

Sebagaimana pada Tabel 2.7, sektor dengan kontribusi tertinggi pada Bea Masuk di Kepri, yaitu pada **Industri Pengolahan** sebesar 93,79 persen, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,46 persen, dan Industri Kimia sebesar 1,36 persen.

Penerimaan Bea dan Cukai di Kanwil DJBC Provinsi Kepri, masih didominasi oleh produk mentah dan olahan makanan, serta minuman yang dikirimkan dari dan ke luar negeri seperti Malaysia, dan Singapura. Hal tersebut di dorong oleh letak geografis Kepri yang sangat berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.





Tabel 2.7 - Realisasi Bea Masuk per Sektor Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam (dalam Miliar Rupiah)

No.	Nama Sektor	Kanwil BC Kepri	KPU BC Batam	Total Bea Masuk	Kontribusi
1	Industri Pengolahan	1.77	87.69	89.46	93.79%
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.99	1.35	2.34	2.46%
3	Industri Kimia	1.30	0.00	1.30	1.36%
4	Industri Tekstil dan Garmen	0.48	0.00	0.48	0.51%
4	Pertambangan dan Penggalian (Migas)	22.66	2.46	25.11	26.33%
5	Industri Perkapalan	0.11	0.00	0.11	0.11%
6	Aktivitas / Jasa Lainnya	0.20	0.00	0.20	0.21%
7	Konstruksi	0.96	0.64	1.60	1.68%
8	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0.00	27.57	27.57	28.90%
9	Transportasi dan Pergudangan	0.00	13.06	13.06	13.69%
10	Lainnya	0.00	25.39	25.39	26.62%
11	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	0.00	0.26	0.26	0.28%
Total		28.46	66.92	95.38	100.00%

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri dan KPU BC Batam, 2024 (diolah)

2.1.1.2 Analisis Kinerja Bea Keluar Sektoral Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam

Tabel 2.8 - Realisasi Bea Keluar per Sektor Kanwil DJBC Kepri dan KPU BC Batam (dalam Miliar Rupiah)

No.	Nama Sektor	Kanwil BC Kepri	KPU BC Batam	Total Bea Masuk	Kontri- busi
1	Industri Pengolahan	-	29.23	29.23	99.89%
2	Pengadaan Air, Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	-	0.03	0.03	0.10%
3	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	0.00	0.00	0.01%
4	Lainnya	-	0.00	0.00	0.00%
Total		-	29,26	95.38	100%

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri dan KPU BC Batam, 2024 (diolah)

Sebagaimana pada Tabel 2.8, sektor dengan kontribusi tertinggi pada Bea Keluar di Kepri, yaitu pada **Industri Pengolahan** sebesar 99,89 persen, diikuti sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah sebesar 0,10 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,01 persen.

2.1.1.3 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan PNBP

Tabel 2.9 – Perkembangan PNBP di Kepri Triwulan II, 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TW II 2023			TW II 2024			Growth (2023-2024)
	Target s.d. Tw II	Real s.d. Tw II	%	Target s.d. Tw II	Real s.d. Tw II	%	
PNBP Aset	52.29	132.19	252.79%	77.74	184.60	237.45%	39.64%
PNBP Piutang Negara	0.02	0.03	183.68%	0.03	0.09	345.93%	182.50%
PNBP Lelang	7.43	5.94	79.87%	7.10	4.04	56.96%	-31.89%
Total	59.74	138.16	231.26%	84.87	188.73	222.39%	36.60%

Sumber: KPKNL Batam, 2024 (diolah)





Target PNBPN yang dikelola oleh KPKNL Batam cenderung meningkat mulai dari triwulan II 2023 sebesar 59,74 miliar, menjadi 84,87 miliar pada triwulan II 2024.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp188,73 miliar (222,39 persen dari Target). Kinerja realisasi Penerimaan

PNBP cukup optimal apabila dibandingkan dengan triwulan II 2023 dengan pertumbuhan sebesar 36,60 persen (yoy). Peningkatan tertinggi pada PNBP Piutang Negara sebesar 182,50 persen (yoy). Kemudian PNBP Aset turut mengalami peningkatan sebesar 39,64 persen (yoy).

2.1.1.4 Analisis Perkembangan Tax Ratio

Tabel 2.10 – Perkembangan Tax Ratio 2021 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi s.d. Tw II 2023	Realisasi s.d. Tw II 2024
Pendapatan Perpajakan Pusat	4.932,79	5.368,60
Pendapatan Perpajakan Daerah	1.145,96	3.701,41
PDRB	161.824,21	172.357,08
Tax Ratio Pempus	3,05%	3,32%
Tax Ratio Pemda	0,71%	2,29%
Tax Ratio Seluruh Pajak	3,76%	5,60%

Sumber: Kanwil DJP Kepri, dan BPS, 2024 (diolah)

Tax ratio pemerintah pusat mengalami pertumbuhan, yaitu pada triwulan II 2023 sebesar 3,05 persen menjadi 3,32 persen pada triwulan II 2024. Hal ini menandakan peningkatan Pendapatan Perpajakan Pusat telah sejalan dengan peningkatan PDRB.

Tingginya kinerja perpajakan pemerintah pusat tersebut didorong oleh penerapan beberapa kebijakan seperti PPN 11 persen, tarif efektif baru PPh pasal 21 sejak 1 Januari 2024 (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023), serta *extra efforts* yang dilakukan Kanwil DJP Kepri, berupa penyuluhan perpajakan

kepada beberapa perusahaan besar dan menggelar *Executive Dialogue* bersama dengan BP Batam, BPKP, serta Gubernur Provinsi Kepri.

Tax ratio perpajakan pemerintah daerah mengalami pertumbuhan yang lebih baik, dari sebesar 0,71 persen pada triwulan II 2023 menjadi 2,29 persen pada triwulan II 2024. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan perpajakan daerah melalui peningkatan tarif pajak pada sektor hiburan seperti amanat UU HKPD dan peningkatan tarif retribusi parkir di Kota Batam yang mulai berlaku di tahun 2024.

2.1.1.5 Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun

Tabel 2.11 – Prognosis Pendapatan Negara s.d. Akhir Tahun (dalam Miliar Rupiah)

TW	Pajak		Bea Cukai		PNBP	
	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.
Tw I	2.271,09	2.362,62	157,43	104,01	28,30	63,93
Tw II	3.118,28	3.385,95	156,38	107,52	56,57	136,41
Total	5.389,37	5.748,57	313,81	211,53	s 84,87	200,34
Tw III	N/A	-	174,30	-	84,89	-
Tw IV	N/A	-	186,40	-	113,21	-

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)





Proyeksi Penerimaan Perpajakan s.d. triwulan II sebesar Rp5.389,37 miliar. Atas proyeksi ini, Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp5.784,57 miliar sehingga terjadi Deviasi sebesar 6,66 persen. Deviasi positif tersebut di dorong oleh kebijakan perpajakan berupa penerapan tarif PPN 11 persen dan tarif efektif baru PPh pasal 21 yang terbit di tahun 2023 dan 2024, serta *extra efforts* yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP dalam merealisasikan pendapatan perpajakan.

Proyeksi Bea Cukai s.d. triwulan II sebesar Rp313,81 miliar. Atas proyeksi ini, Bea Cukai terealisasi sebesar Rp211,53 miliar sehingga terjadi Deviasi sebesar minus 32,59 persen.

Penerimaan PNBPNP tahun 2024 diprognoiskan sebesar Rp84,87 miliar. Atas proyeksi ini, Penerimaan PNBPNP terealisasi sebesar Rp200,34 miliar sehingga terjadi Deviasi sebesar 136,04 persen. Adapun PNBPNP ini dikelola oleh DJKN.

Kinerja optimal realisasi perpajakan dan PNBPNP pada awal tahun 2024 perlu untuk dijaga, sehingga realisasi pendapatan dapat mencapai kondisi optimal hingga akhir tahun anggaran.

2.1.1.6 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

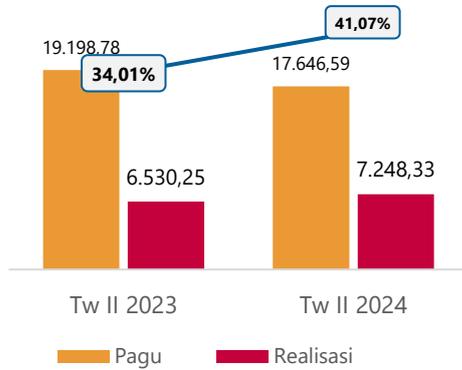
1. Kanwil DJP Kepri agar meningkatkan **extra effort melalui edukasi, kerjasama dan layanan langsung pada perusahaan potensial**. Disamping itu, edukasi kepada masyarakat khususnya pengenaan tarif progresif PPh 21, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran pajak masyarakat. Selain itu, kegiatan penyuluhan perpajakan juga agar lebih difokuskan terhadap perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah pegawai yang banyak dalam rangka meningkatkan Pajak atas WP Orang Pribadi, karena dengan kegiatan tersebut terbukti telah berhasil mendongkrak penerimaan PPh 21 triwulan II sebesar 38,40 persen (*yoy*).
2. **Pendekatan dengan pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan Bea Masuk**, seperti yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC khusus Provinsi Kepri yang telah melakukan pendekatan kepada PT Medco Energy untuk menggali Bea Masuk dari Impor BBM, agar terus diusahakan dalam **menggali potensi penerimaan perdagangan internasional**.
3. Dalam rangka optimalisasi penerimaan cukai khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT), Kanwil DJBC Khusus Kepri dan KPU BC Batam agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk **melaksanakan inspeksi dalam upaya pemberantasan maraknya peredaran rokok ilegal** tanpa cukai di wilayah Kepri yang sangat berpengaruh menyebabkan penurunan pendapatan dari CHT.
4. KPKNL Batam agar **meningkatkan penerimaan PNBPNP melalui pengelolaan aset, dengan melakukan identifikasi idle aset BMN**, serta menjaga koordinasi dengan BP Batam yang mengelola aset dalam jumlah besar di Kepri.





2.1.2 Analisis Realisasi Belanja APBN

Grafik 2.5 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit APK 2024 (diolah)

Realisasi Belanja Negara sebesar Rp7.248,33 miliar (41,07 persen dari Pagu) sebagai mana tersaji dalam Grafik 2.5. Secara persentase, terjadi peningkatan persentase realisasi dibandingkan triwulan II 2023 yang hanya sebesar 34,01 persen. Hal ini menyebabkan terjadinya *growth* sebesar 11,00 persen (*yoy*), menunjukkan kinerja belanja K/L yang positif pada semester pertama 2024.

Apabila dirinci lebih lanjut sesuai dengan Grafik 2.6, Belanja Pemerintah Pusat direalisasikan sebesar Rp3.469,66 miliar (36,13 persen dari Pagu) atau meningkat 18,04 persen (*yoy*). Sedangkan Belanja TKD direalisasikan sebesar Rp3.778,67 miliar (46,98 persen dari Pagu) atau meningkat 5,23 persen (*yoy*).

Grafik 2.6 – Realisasi Belanja Triwulan II, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit APK 2024 (diolah)

oleh Belanja TKD sebesar 52,13 persen, sedangkan Belanja Pemerintah Pusat sebesar 47,87 persen. Hal ini membuktikan peran TKD yang lebih dominan pada komponen belanja di Kepri.

2.1.2.1 Analisis Belanja Pemerintah Pusat

Tingginya *growth* BPP sampai dengan triwulan II 2024 didorong oleh pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pembayaran gaji dan THR. Selain itu peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang semakin baik juga mendorong realisasi anggaran belanja di awal tahun 2024.

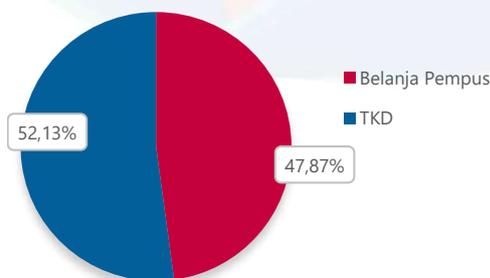
2.1.2.1.1 Analisis Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenisnya, realisasi BPP secara berturut-turut yaitu Belanja Barang Rp1.561,28 miliar; Belanja Pegawai Rp1.192,89 miliar; Belanja Modal Rp712,46 miliar; Belanja Bansos Rp3,02 miliar; dan Belanja Lainnya belum terdapat realisasi s.d. triwulan II 2024.

Hampir seluruh jenis BPP mengalami pertumbuhan (*yoy*) dengan rincian sebagai berikut.

- Pertumbuhan Belanja Pegawai (3,89 persen) dan Belanja Bansos (27,07 persen) didorong oleh pelaksanaan pemilu

Grafik 2.7 – Perbandingan Realisasi BPP dan TKD, Triwulan II 2024



Sumber: Dit APK 2024 (diolah)

Sebagai mana tersaji pada Grafik 2.7, komposisi realisasi belanja APBN di dominasi



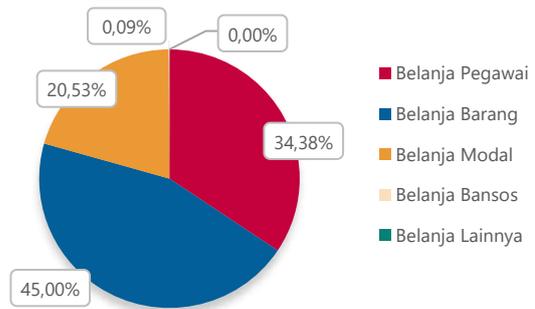


presiden dan wakil presiden, serta perayaan HBKN yang mendorong pembayaran gaji dan THR;

- Pertumbuhan Belanja Modal (8,90 persen) di dorong oleh percepatan pelaksanaan kegiatan terkait Belanja Modal yang sudah mulai dilaksanakan kontrak pada awal tahun 2024;
- Belanja Lainnya yang berkontraksi pada triwulan lalu sebagai dampak administrasi kelembagaan BA BUN BP Karimun, Bintan, Tanjungpinang kini telah mengalami pertumbuhan 3,44 persen

Berdasarkan porsinya, BPP secara berturut-turut didominasi oleh Belanja Barang 45,00 persen dari total BPP; Belanja Pegawai 34,38 persen dari total BPP; Belanja Modal 20,53 persen dari total BPP; Belanja Bansos 0,09 persen dari total BPP; dan Belanja Lainnya 0,00 persen dari total BPP.

Grafik 2.8 – Porsi Realisasi BPP, Triwulan II 2024



Sumber: Dit APK 2024 (diolah)

2.1.2.1.2 Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

Tabel 2.12 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Fungsi	2023			2024			Growth
	Pagu	Realisasi S.d. Tw II	%Real	Pagu	Realisasi S.d. Tw II	%Real	
Agama	96,20	45,59	47,39%	97,01	53,45	55,10%	17,24%
Ekonomi	4.837,86	971,14	20,07%	4.759,75	1.227,97	25,80%	26,45%
Kesehatan	226,37	75,54	33,37%	218,18	89,16	40,86%	18,03%
Ketertiban dan Keamanan	1.319,98	601,10	45,54%	1.331,20	678,21	50,95%	12,83%
Pariwisata	1,09	0,49	44,72%	1,54	0,54	34,91%	10,44%
Pelayanan Umum	708,60	283,72	40,04%	1.149,69	462,45	40,22%	62,99%
Pendidikan	693,28	197,10	28,43%	906,69	281,37	31,03%	42,75%
Perlindungan Lingkungan Hidup	98,76	39,36	39,86%	101,14	44,01	43,52%	11,82%
Pertahanan	1.431,89	573,57	40,06%	1.215,55	603,38	49,64%	5,20%
Perumahan dan Fasilitas Umum	323,21	105,58	32,67%	221,13	48,54	21,95%	-54,03%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Belanja pemerintah terbagi ke dalam 10 fungsi sebagai mana tersaji dalam Tabel 2.12. Berdasarkan jumlah Pagu maupun realisasi, terlihat bahwa Belanja Pemerintah didominasi oleh fungsi **Ekonomi** dengan Pagu Rp4.759,75 miliar dan realisasi Rp1.227,97 miliar. Tingginya alokasi belanja pada fungsi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Dari sisi persentase realisasi, fungsi dengan persentase realisasi tertinggi ada pada fungsi **Agama**, yaitu 55,10 persen. Hal ini sudah *on track* mengingat sampai dengan triwulan II

sudah seharusnya belanja terealisasi sebesar 50 persen. Adapun persentase realisasi terendah ada pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 21,95 persen.

Dari sisi pertumbuhan, fungsi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu fungsi **Pelayanan Umum** sebesar 62,99 persen (*yoy*). Fungsi dengan persentase pertumbuhan terendah ada pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar minus 54,03 persen (*yoy*) sebagai dampak turunnya Pagu 2024 dibandingkan dengan 2023.





Selain fungsi Pelayanan Umum, persentase realisasi belanja pemerintah pada fungsi Ekonomi juga rendah, yaitu 25,80 persen. Di lingkup Kanwil DJPb Kepri, terdapat 71 satker pada 17 K/L yang menjalankan fungsi Ekonomi. Satker yang memiliki serapan rendah pada fungsi ekonomi adalah satker **Distrik Navigasi Tanjung Pinang**. Serapan rendah ini disebabkan oleh belum terselesainya proyek pembangunan Menara Suar Karang Singa dengan nilai Rp42,87 miliar.

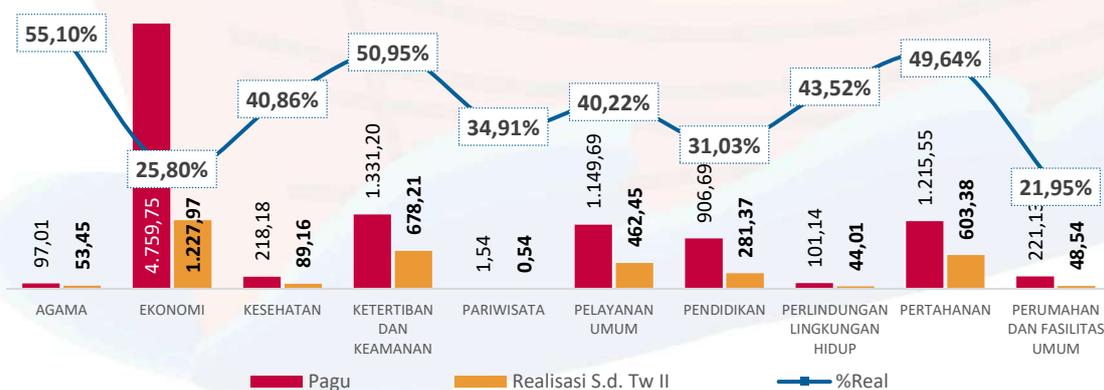
Pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran karena terdapat kendala teknis pada pelaksanaan kontrak berupa *design* yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, terdapat kendala sedimentasi pada lokasi pembangunan yang telah ditetapkan di awal.

Oleh karena itu, lokasi pekerjaan harus diubah sehingga memerlukan tambahan waktu pekerjaan menjadi *multi years* dan tambahan anggaran untuk mengatasi permasalahan teknis yang ada.

Selain satker Distrik Navigasi Tanjung Pinang, satker yang memiliki serapan rendah pada fungsi Ekonomi ialah satker **Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**. Kedua satker ini merupakan satker yang menerima DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan realisasi sebesar 11,61% atas Pagu sebesar Rp2,35 miliar. Kendala penyerapan ini terjadi karena belum adanya juknis untuk pelaksanaan DIPA dan terdapat blokir anggaran pada pagu belanja satker tersebut.

Berdasarkan Grafik 2.9 terlihat bahwa sebaran persentase Belanja per fungsi masih belum merata, dengan persentase tertinggi ada pada fungsi Agama (55,10 persen). Persentase realisasi Belanja fungsi Agama yang tinggi ini didominasi oleh **Belanja untuk layanan internal**, seperti Belanja kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN (56,07 persen dari total realisasi) dan kegiatan Pembinaan Administrasi Umum (12,87 persen dari total realisasi).

Grafik 2.9 – Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa 2024 (diolah)

Realisasi Belanja tertinggi ada pada fungsi Ekonomi yaitu sebesar Rp1.227,97 miliar. Namun apabila dilihat pagu anggarannya, realisasi tersebut masih rendah karena baru terealisasi (25,80 persen) dari pagu anggaran. Realisasi ini didominasi oleh pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan ekonomi

belanja kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan (20,32 persen dari total realisasi), kemudian disusul oleh Belanja pada kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (15,74 persen dari total realisasi).





Realisasi Belanja tertinggi ada pada fungsi Ekonomi yaitu sebesar Rp1.227,97 miliar. Namun apabila dilihat pagu anggarannya, realisasi tersebut masih rendah karena baru terealisasi (25,80 persen) dari pagu anggaran. Realisasi ini didominasi oleh **pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan ekonomi** belanja kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan (20,32 persen dari total realisasi), kemudian disusul oleh Belanja pada kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (15,74 persen dari total realisasi).

Berdasarkan analisis pada realisasi belanja infrastruktur, terdapat beberapa **permasalahan** yang terjadi pada satker lingkup Kanwil DJPb Kepri, yang disebabkan **kesulitan mobilisasi** orang dan barang untuk pekerjaan fisik yang disebabkan oleh **cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi** pada kegiatan pengadaan infrastruktur/proyek fisik lain yang dilaksanakan pada pulau terluar, sebagaimana terjadi pada satker Pelaksanaan Praskim, Penyediaan Perumahan, Disnav Tanjung Pinang, Pelaksanaan Jalan Nasional, dan SNVT PJSA.

2.1.2.1.3 Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Tabel 2.13 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar, 2023 – 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Kementerian/Lembaga	2023			2024			Growth
	Pagu	Realisasi S.d. Tw II	%Real	Pagu	Realisasi S.d. Tw II	%Real	
Kementerian Pertahanan	1.431,89	573,57	40,06%	1.215,55	603,38	49,64%	5,20%
BPKBP Batam	2.714,89	519,91	19,15%	2.923,73	577,27	19,74%	11,03%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	830,35	388,76	46,82%	786,35	420,46	53,47%	8,16%
Kementerian PUPR	1.675,41	259,32	15,48%	1.101,43	376,93	34,22%	45,35%
Kementerian Perhubungan	521,44	196,91	37,76%	734,84	246,78	33,58%	25,32%
Komisi Pemilihan Umum	160,32	69,80	43,54%	458,17	171,07	37,34%	145,07%
Kementerian Agama	342,45	142,66	41,66%	328,41	168,14	51,20%	17,86%
Kementerian Keuangan	299,02	112,66	37,68%	341,38	162,60	47,63%	44,33%
Kementerian Dikbud Ristek	413,93	95,09	22,97%	620,98	138,94	22,37%	46,11%
Kementerian Hukum dan HAM RI	246,58	114,79	46,55%	305,76	128,42	42,00%	11,87%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Berdasarkan 10 K/L dengan realisasi Belanja terbesar di Kepri, **realisasi Belanja tertinggi** terdapat pada satker Kementerian Pertahanan, sebesar Rp603,38 miliar.

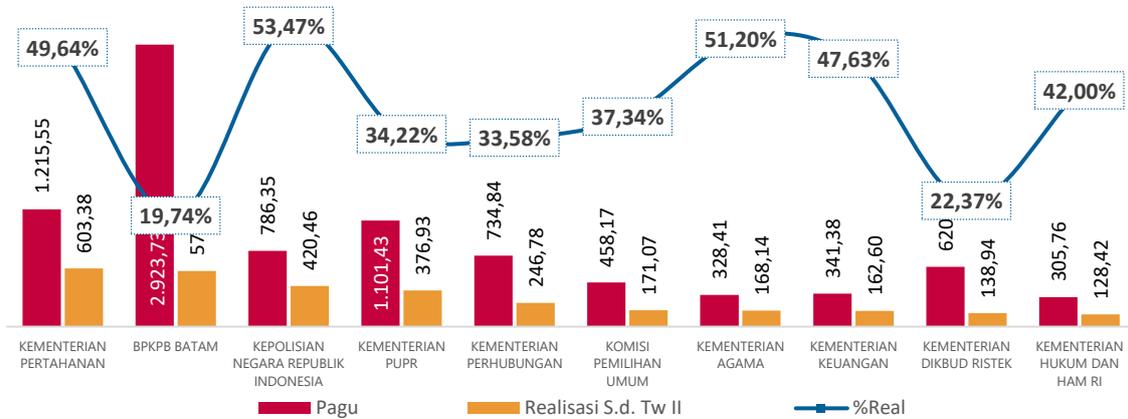
Sedangkan K/L dengan persentase realisasi Belanja tertinggi ada pada Kepolisian

Negara RI sebesar 53,47 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi Belanja tertinggi ada pada satker Komisi Pemilihan Umum sebesar 145,07 persen (yoy) sebagai dampak Pemilu di tahun 2024





Grafik 2.10 – Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per K/L, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Jika dilihat pada Grafik 2.10, sebaran persentase realisasi Belanja antar-K/L masih belum tersebar merata. K/L dengan persentase realisasi Belanja tertinggi yaitu Kepolisian Negara RI sebesar 53,47 persen dari Pagu. Belanja pada Kepolisian Negara RI didominasi oleh Belanja pada kegiatan Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri sebesar 42,41 persen dari total realisasi.

Realisasi Belanja tertinggi ada pada satker Kementerian Pertahanan sebesar Rp603,38 miliar. Realisasi ini didominasi oleh Belanja pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Matra Laut sebesar 45,84 persen dari total realisasi Belanja.

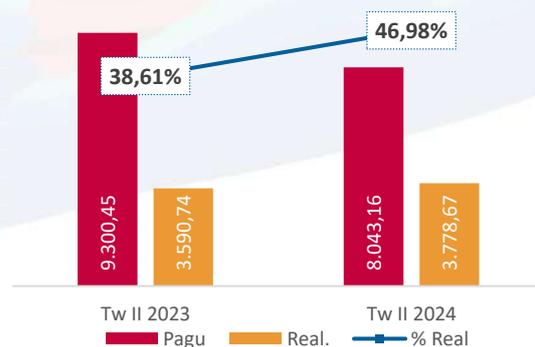
Sampai dengan triwulan II 2024, terdapat kemunduran pelaksanaan pekerjaan karena keterlambatan proses lelang pada beberapa satker di lingkup Kanwil DJPb Kepri. Sebagai contoh, pada satker Universitas Maritim Raja Ali Haji terdapat kendala dengan izin impor dan izin *clearance* atas pengadaan alat laboratorium yang dibeli dari luar negeri dengan nilai sebesar Rp27,45 miliar.

Selain itu juga terdapat beberapa paket pekerjaan yang dilakukan lelang ulang dikarenakan pemutusan kontrak pada Paket Penanganan Jalan Penting – Payalaman (Satker

PJN). Lelang ulang dilakukan karena keterbatasan peserta yang memenuhi kriteria pada Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar (SNVT PJSA), Preservasi Jalan dan Jembatan Km. 16 (Sp. Gesek) - Tanjung Uban - Sialang - Sp. Lagoi (PJN), dan Pembangunan Jalan Penghubung Gedung Satu Gurindam – Pusat Akademik Cerdas Terintegrasi.

2.1.2.2 Analisis Belanja Transfer ke Daerah (TKD)

Grafik 2.11 – Realisasi Belanja TKD Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

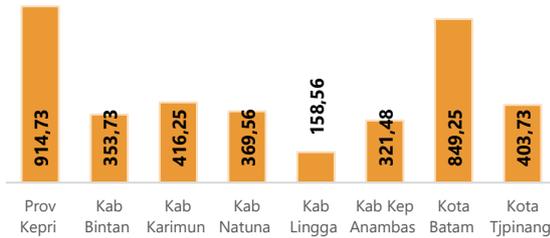
Belanja TKD sampai dengan triwulan II 2024 telah terealisasi sebesar Rp3.778,67 miliar (46,98 persen dari Pagu), meningkat 5,23 persen (yoy) sebagai mana tersaji pada Grafik 2.11.





2.1.2.2.1 Analisis Belanja TKD per Pemerintah Daerah

Grafik 2.12 – Realisasi Belanja TKD per Pemda, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

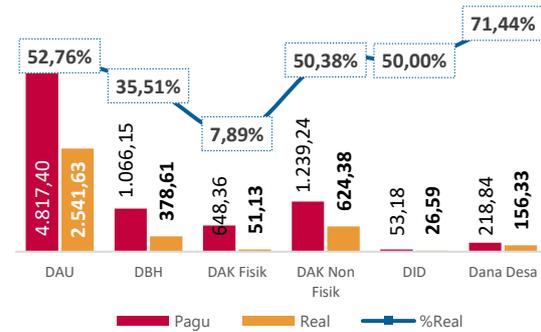
Realisasi TKD tertinggi terdapat pada Pemprov Kepri sebesar Rp914,73 miliar, kemudian diikuti oleh Kota Batam (Rp849,25 miliar) pada peringkat kedua dan Kabupaten Kairmun (Rp416,25 miliar) pada peringkat ketiga. Sedangkan realisasi terendah pada Kabupaten Lingga Rp158,56 miliar.

2.1.2.2.2 Analisis Belanja TKD per Jenis TKD

Belanja TKD terbagi menjadi empat komponen, yaitu Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal, dan Dana Desa.

TKD dengan persentase penyaluran tertinggi adalah Dana Desa sebesar Rp156,33 miliar (71,44 persen dari Pagu) didorong oleh perubahan mekanisme Dana Desa yang sebelumnya disalurkan 3 tahap pada tahun 2023, menjadi 2 tahap pada tahun 2024.

Grafik 2.13 – Pagu dan Realisasi Belanja TKD per Jenis TKD, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit. APK, 2024 (diolah)

TKD dengan persentase realisasi terendah pada salah satu komponen DTK, yaitu DAK Fisik sebesar 7,89 persen disebabkan realisasi yang baru dimulai pada triwulan II sebagai akibat dari juknis teknis dari K/L teknis dan juknis keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan tentang DAK Fisik yang baru diterbitkan pada bulan Mei 2024.

2.1.2.3 Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB

Tabel 2.14 – Kontribusi Belanja Pemerintah Triwulan II, 2023-2024 terhadap PDRB (dalam Miliar Rupiah)

Periode	Belanja Negara	PDRB	% Kontribusi	Growth Belanja	Growth PDRB
S.d. Tw II 2023	6.530,25	161.824,21	4,04%		
S.d. Tw II 2024	7.248,33	172.357,08	4,21%	11,00%	6,51%

Sumber: Dit. APK dan BPS Kepri, 2024 (diolah)

Kontribusi Belanja Negara terhadap PDRB mengalami peningkatan. Pada triwulan II 2024, kontribusi Belanja Negara sebesar 4,21 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang memiliki kontribusi sebesar 4,04 persen. Peningkatan kontribusi Belanja Negara pada PDRB ini didorong oleh peningkatan Belanja Negara yang pesat dibandingkan peningkatan PDRB. Belanja Negara tumbuh 11,00 persen

(yoy), sedangkan PDRB (nominal) mengalami peningkatan 6,51 persen (yoy).

Pemerintah memberikan peran dalam roda perekonomian di Kepri sebesar 4,21 persen. Meningkatnya kontribusi Belanja Negara pada PDRB menunjukkan peningkatan peran pemerintah dalam pergerakan roda perekonomian di Kepri. Pemerintah tidak hanya memiliki peran untuk memberikan layanan kepada masyarakat, namun juga membantu roda





perekonomian melalui peran fiskal yang cukup besar.

2.1.2.4 Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita

Tabel 2.15 – Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita Triwulan II, 2023 – 2024 (dalam rupiah)

Jumlah Kumulatif	TW II 2023	TW II 2024	Growth
PDRB (Rp)	161.824.205.120.000	172.357.079.300.000	6,51%
Belanja Pemerintah Pusat (Rp)	2.939.513.743.540	3.469.657.133.495	18,04%
Belanja TKD (Rp)	3.590.738.661.241	3.778.674.779.929	5,23%
Penduduk (jiwa)	2.152.630	2.168.775	0,75%
PDRB per Kapita (Rp/jiwa)	75.175.114	79.472.089	5,72%
Belanja Per Kapita (Rp/jiwa)	3.033.616	3.342.132	10,17%

Sumber: Dit APK, GFS Kanwil DJPb Kepri, dan BPS, 2024 (diolah)

Secara kumulatif, PDRB per Kapita di Kepri sampai dengan triwulan II 2024 sebesar Rp79,47 juta, meningkat 5,72 persen (yoy).

Belanja per kapita di Kepri triwulan II tahun 2024 sebesar Rp3,34 juta. Belanja per kapita menunjukkan besarnya Belanja Negara yang dikeluarkan untuk membiayai setiap penduduk yang ada di Kepri, jadi secara rata-rata Belanja Negara di Kepri dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp3,34 juta untuk setiap penduduk.

Belanja per kapita meningkat sebesar 10,17 persen (yoy), dengan pertumbuhan BPP (18,04 persen yoy) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan TKD (5,23 persen yoy).

Belanja per kapita yang meningkat menunjukkan tingginya pertumbuhan realisasi Belanja dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di Kepri.

Semakin tinggi nilai belanja per kapita, menunjukkan semakin besarnya support yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Belanja ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan semakin tingginya Belanja Negara yang didistribusikan kepada penduduk yang lebih sedikit, secara rata-rata outcome yang mungkin dirasakan masyarakat akan semakin besar.

2.1.2.5 Analisis Capaian Output Sektoral dan/atau Program Strategis Pemerintah

Tabel 2.16 – Capaian Output pada Belanja Sektoral/Program Strategis, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Program Prioritas Nasional	Kinerja Anggaran			Capaian Output		
	Pagu	Realisasi	%Real Angg	Volume	Real Fisik	%Capaian
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	16,55	5,28	31,90%	366.604	309.403	84,40%
Pemulihan 4 DAS Kritis	8,30	2,71	32,68%	210	105	50,00%
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	0,32	0,04	13,92%	250	-	0,00%
Program Lainnya	7,93	2,52	31,82%	366.144	309.298	84,47%
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	658,98	204,48	31,03%	4.837	1.505	31,12%
Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	35,51	18,75	52,80%	2.895	1.448	50,03%
Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)	5,89	0,00	0,00%	421	-	0,00%
Destinasi Pariwisata Prioritas	70,33	25,11	35,70%	3	-	0,00%
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	229,28	86,63	37,78%	67	-	0,00%





Program Prioritas Nasional	Kinerja Anggaran			Capaian Output		
	Pagu	Realisasi	%Real Anng	Volume	Real Fisik	%Capaian
Program Lainnya	317,97	73,99	23,27%	1.451	57	3,92%
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	57,30	8,65	15,09%	599.366	393.618	65,67%
Pengelolaan Terpadu UMKM	0,67	0,18	27,32%	129	45	34,88%
Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	0,03	0,02	60,40%	34	33	97,06%
Program Lainnya	56,60	8,44	14,92%	599.203	393.540	65,68%
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	481,14	297,02	61,73%	9.048	6.033	66,68%
Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	0,16	0,16	98,63%	5	5	100,00%
Program Lainnya	480,98	296,87	61,72%	9.043	6.028	66,66%
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	720,98	131,58	18,25%	68.342	6.253	9,15%
Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	1,05	0,26	24,99%	33	16	49,70%
Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	707,71	130,11	18,38%	8	3	36,63%
Program Lainnya	12,23	1,21	9,93%	68.301	6.234	9,13%
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	329,24	108,68	33,01%	123.101	83.920	68,17%
Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	0,60	0,21	34,22%	1.300	493	37,92%
Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	8,43	8,27	98,09%	1	1	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	2,08	0,09	4,23%	3	-	0,00%
Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	6,30	2,12	33,75%	36.681	24.566	66,97%
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	19,05	8,02	42,11%	35.334	30.901	87,45%
Program Lainnya	292,79	89,97	30,73%	49.782	27.959	56,16%
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	44,47	17,09	38,43%	17.025	9.949	58,44%
Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	1,00	0,29	29,22%	10.025	5.831	58,16%
Program Lainnya	43,47	16,80	38,64%	7.000	4.118	58,82%
Total	2.308,65	772,78	33,47%	1.188,32	810,68	68,22%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Belanja Prioritas Nasional (PN) dengan Pagu dan realisasi tertinggi terdapat pada sektor Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan Pagu sebesar Rp720,98 miliar dan realisasi Rp131,58 miliar (18,25 persen dari Pagu), diikuti oleh PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan Pagu sebesar Rp658,98 miliar dan realisasi Rp204,48 miliar (31,03 persen dari Pagu), dan PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan Pagu sebesar Rp481,14 miliar dan realisasi Rp297,02 miliar (61,73 persen dari Pagu).

Secara persentase, PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik sebesar menempati posisi pertama sebesar 61,73 persen, diikuti oleh PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebesar 38,43 persen, dan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar 33,01 persen.

Volume output tertinggi ada pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan jumlah 599.366 *output* dengan capaian 393.618 *output*, diikuti oleh PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan jumlah 366.604 *output* dengan capaian 309.403 *output*, dan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan jumlah 123.101 *output* dengan capaian 83.920 *output*.





Persentase capaian output tertinggi terdapat pada PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim sebesar 84,40 persen, diikuti oleh PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia

2.1.2.5.1 Program Prioritas Nasional - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan merupakan PN yang memiliki Pagu tertinggi (Rp720,98 miliar), meskipun demikian persentase realisasi masih sangat kecil sebesar Rp131,58 miliar (18,25 persen dari Pagu).

PN ini memiliki dua *major projects*, salah satunya yaitu **Pembangunan Wilayah Batam Bintan** dengan Pagu sebesar Rp701,01 miliar (98,16 persen dari total Pagu) namun sampai triwulan II hanya terealisasi sebesar Rp130,11 miliar (18,38 persen dari Pagu).

Rendahnya realisasi disebabkan oleh pembangunan jembatan melalui tahapan

2.1.2.5.2 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN dengan pagu terbesar kedua, yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Rp658,98 miliar) realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp204,48 miliar (31,03 persen dari Pagu).

PN ini empat *major projects* dengan dua diantaranya telah merealisasikan anggaran namun belum memiliki capaian output, yaitu:

1. Destinasi Pariwisata Prioritas, Pagu Rp70,33 miliar, direalisasikan Rp25,11 miliar (35,70 persen dari Pagu), target output 3 namun capaian masih nol; dan

2.1.2.5.3 Program Prioritas Nasional - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PN dengan Pagu terbesar ketiga yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik memiliki Pagu

Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar 68,17 persen, dan PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar 66,68 persen.

persiapan yang panjang, yaitu **sejak Mei 2024 baru masuk ke tahap survei penyelidikan tanah**, sehingga pelaksanaan pembangunan konstruksi ditargetkan pada 2025. Survei penyelidikan tanah diperkirakan memakan waktu enam bulan. Penyelidikan tanah awalnya akan dilakukan pada 2023. Namun, proses lelang survei itu memakan waktu cukup panjang sehingga survei baru bisa dilakukan Mei 2024.

Untuk tahap persiapan lainnya seperti Pembebasan tanah dan proses sertifikasi lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi *landing point* jembatan di Pulau Batam, Tanjung Sauh, Buau, dan Bintan sudah rampung.

2. Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, Pagu Rp229,28 miliar, direalisasikan Rp86,63 miliar (37,78 persen dari Pagu), target output 67 namun capaian masih nol.

Hal ini perlu pendalaman lebih lanjut terkait Belanja yang telah direalisasikan namun *output* belum tercapai. Adapun permasalahan yang kerap timbul adalah permasalahan administrasi yaitu satker belum mencatatkan capaian output pada aplikasi.

sebesar Rp481,14 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp297,02 miliar (61,73 persen dari Pagu). Realisasi pada PN ini merupakan tinggi





dibandingkan PN lainnya, didorong oleh pelaksanaan pemilu 2024 yang terkait langsung dengan penguatan polhukam.

PN ini memiliki *major project* berupa penguatan *National Security Operation Center-Security Operation Center* (NSOC-SOC) dan

pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dengan Pagu Rp157,54 juta yang telah terealisasi 98,63 persen dari Pagu dengan **capaian output sudah 100 persen**. *Major project* ini merupakan upaya penguatan pertahanan siber negara.

2.1.2.6 Analisis Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024

Tabel 2.17 – Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

TW	Belanja Pemerintah Pusat (BPP)				Transfer ke Daerah (TKD)			
	Prog.	Real.	Dev.	% Dev.	Prog.	Real.	Dev.	% Dev.
Triwulan I	1.031,66	1.506,43	474,78	46,02%	1.701,02	1.953,35	252,33	14,83%
Triwulan II	1.858,86	1.963,23	104,37	5,61%	2.082,96	2.311,14	228,18	10,95%
Total	2.890,52	3.469,66	579,14	20,04%	3.783,98	4.264,49	480,51	12,70%
Triwulan III	2.106,95	-	-	-	1.854,42	-	-	-
Triwulan IV	3.558,64	-	-	-	2.307,54	-	-	-

Sumber: ALCo Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan II 2024 sebesar Rp2.890,52 miliar, dengan proyeksi triwulan I 2024 sebesar Rp1.031,66 miliar dan triwulan II 1.858,86 miliar. Atas proyeksi ini, BPP telah terealisasi dengan deviasi positif yaitu sebesar Rp579,14 miliar atau 20,04 persen. Meskipun realisasi Belanja sampai dengan triwulan II 2024 telah menunjukkan kinerja yang positif, realisasi Belanja masih harus terus dikawal sehingga penyerapan, output dan *outcome* dapat berjalan dengan optimal.

Transfer ke Daerah sampai dengan triwulan II 2024 diproyeksikan sebesar Rp3.783,98 miliar, dengan proyeksi triwulan I 2024 sebesar Rp1.071,02 miliar dan triwulan II 2024 sebesar Rp2.082,96 miliar. Atas proyeksi ini, TKD telah direalisasikan dengan deviasi positif sebesar Rp480,51 miliar atau 12,70 persen. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dari yang di tahun 2023 disalurkan melalui 3 tahap, menjadi 2 tahap di tahun 2024 sesuai Peraturan TKD terbaru.

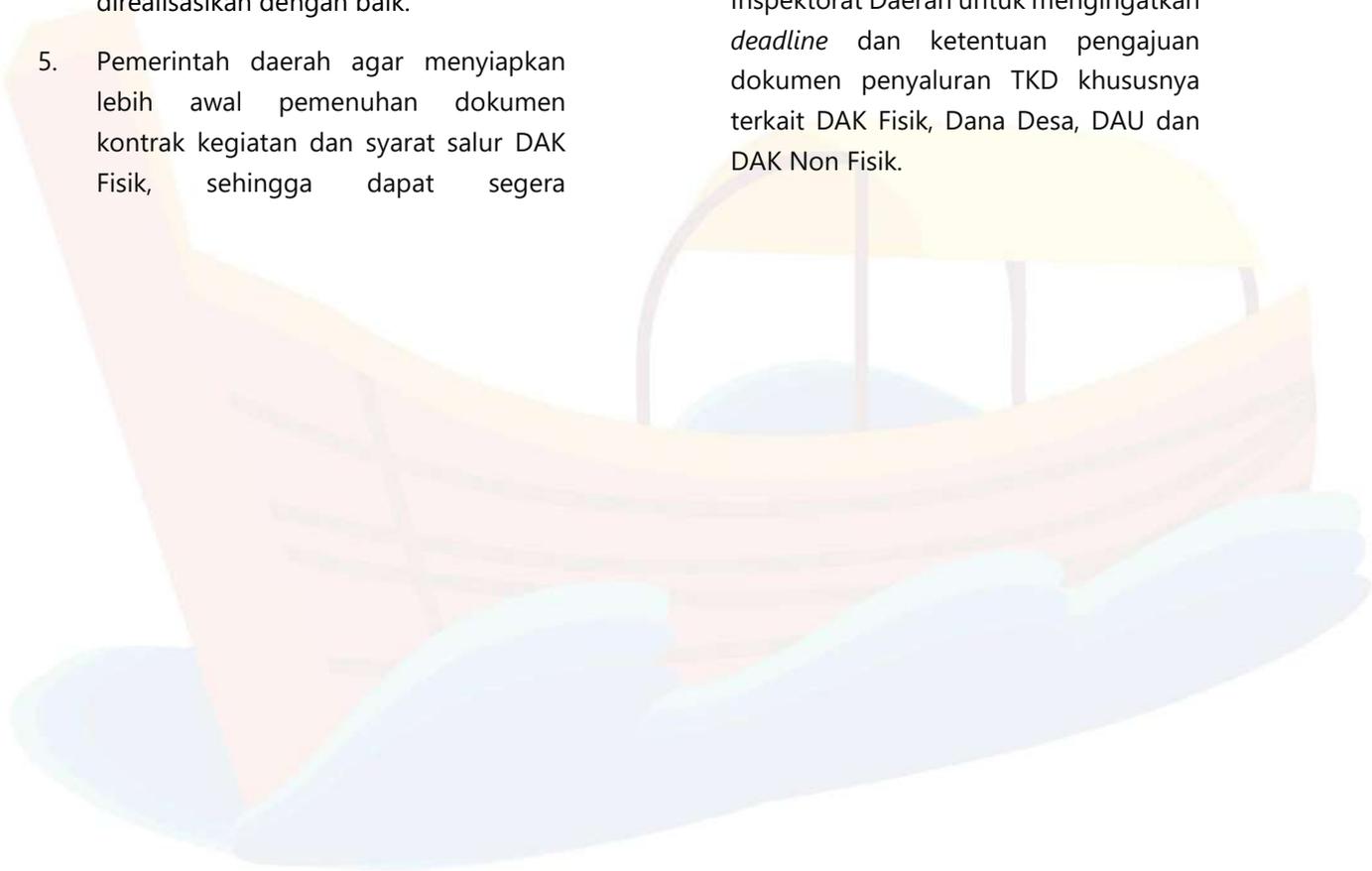
2.1.2.7 Rekomendasi Kebijakan Belanja Pemerintah

1. Satker Distrik Navigasi Tanjung Pinang agar segera memitigasi dan meminta persetujuan eselon I apabila terdapat potensi melesetnya jadwal penyelesaian pekerjaan dengan pertimbangan perubahan kontrak atau program menjadi *multi years*.
2. Satker Universitas Maritim Raja Ali Haji agar lebih fokus dan mempercepat proses lelang untuk kegiatan yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk izin impor dan izin *clearance* untuk pengadaan alat laboratorium yang berasal dari luar negeri.
3. Satker yang memiliki Pagu Belanja Modal agar mempercepat proses pelaksanaan kontrak dan pengerjaan fisik, sehingga tidak menghadapi musim cuaca buruk di Kepri pada akhir tahun anggaran.





4. Direktorat Pelaksanaan Anggaran perlu memberikan batas waktu kepada K/L teknis untuk segera menerbitkan petunjuk teknis bagi satker DK TP yang belum dapat merealisasikan anggaran karena belum terdapat petunjuk teknis dari K/L terkait. Terhadap K/L yang tidak mematuhi ketentuan batas waktu tersebut perlu diberikan teguran/sanksi. Juknis DAK Fisik yang telah terbit PMK-nya di bulan Mei agar segera disosialisasikan, dipedomani, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga capaian output DAK Fisik dapat direalisasikan dengan baik.
5. Pemerintah daerah agar menyiapkan lebih awal pemenuhan dokumen kontrak kegiatan dan syarat salur DAK Fisik, sehingga dapat segera direalisasikan setelah terbitnya juknis penyaluran DAK Fisik 2024.
6. BPKAD, DPMD dan Inspektorat Daerah agar menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam proses penyaluran TKD, khususnya DAK Fisik, baik dalam tahap perencanaan, penyaluran sampai dengan tahap pertanggungjawabannya.
7. Kanwil DJPb dan KPPN bekerja sama dan berkoordinasi dalam melakukan monitoring dan menjalin komunikasi rutin dengan BPKAD, DPMD dan Inspektorat Daerah untuk mengingatkan *deadline* dan ketentuan pengajuan dokumen penyaluran TKD khususnya terkait DAK Fisik, Dana Desa, DAU dan DAK Non Fisik.





2.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)

Tabel 2.18 – Pagu dan Realisasi I-Account APBD di Kepri Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

I ACCOUNT (dalam Miliar Rp)	Tw II 2023			Tw II 2024			%Growth
	Pagu	Real	%Real	Pagu	Real	%Real	
PENDAPATAN DAERAH	13.755,71	3.444,54	25,04%	14.524,05	5.083,66	35,00%	47,59%
Pendapatan Asli Daerah	4.268,11	1.301,04	30,48%	4.810,80	1.893,69	39,36%	45,55%
Pendapatan Transfer	9.441,48	2.134,43	22,61%	9.609,46	3.186,87	33,16%	49,31%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	46,12	9,07	19,67%	103,79	3,10	2,99%	-65,77%
BELANJA DAERAH	14.432,58	4.369,10	30,27%	15.232,97	5.449,84	35,78%	24,74%
Belanja Operasi	10.698,79	3.548,81	33,17%	11.719,57	4.588,32	39,15%	29,29%
Belanja Pegawai	5.042,39	2.094,51	41,54%	5.623,84	2.772,66	49,30%	32,38%
Belanja Barang dan Jasa	4.936,86	1.309,90	26,53%	5.114,09	1.440,14	28,16%	9,94%
Belanja Bunga	13,14	4,56	34,71%	4,68	2,67	56,96%	-41,55%
Belanja Subsidi	2,45	1,11	45,29%	4,93	1,53	31,04%	37,92%
Belanja Hibah	690,36	136,54	19,78%	944,96	367,43	38,88%	169,11%
Belanja Bantuan Sosial	13,58	2,19	16,12%	27,07	3,88	14,33%	77,22%
Belanja Modal	2.429,07	311,83	12,84%	2.116,19	317,03	14,98%	1,67%
Belanja Modal	2.429,07	311,83	12,84%	2.116,19	317,03	14,98%	1,67%
Belanja Tidak Terduga	93,05	2,54	2,73%	85,58	2,24	2,61%	-11,98%
Belanja Tidak Terduga	93,05	2,54	2,73%	85,58	2,24	2,61%	-11,98%
Belanja Transfer	1.211,66	505,92	41,75%	1.311,64	542,26	41,34%	7,18%
Belanja Bagi Hasil	679,43	337,03	49,60%	776,95	346,78	44,63%	2,90%
Belanja Bantuan Keuangan	532,23	168,89	31,73%	534,68	195,47	36,56%	15,74%
SURPLUS/DEFISIT	(676,87)	(924,57)	136,59%	(708,93)	(366,17)	51,65%	-60,40%
PEMBIAYAAN	676,87	(261,31)	-38,60%	708,93	184,58	26,04%	-170,64%
Penerimaan Pembiayaan	763,21	(239,71)	-31,41%	804,48	184,58	22,94%	-177,00%
Pengeluaran Pembiayaan	86,34	21,60	25,01%	95,55	-	0,00%	-100,00%
SiLPA/(SiKPA)	0,00	(1.185,87)	-	0,00	(181,59)	-84,69%	

Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Sampai dengan triwulan II 2024, realisasi APBD menunjukkan terdapat SiKPA Rp181,59 miliar.

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp5.083,66 miliar atau sebesar 35,00 persen dari Target. Realisasi Pendapatan ini mengalami pertumbuhan sebesar 47,59 persen (yoy).

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp5.449,84 miliar atau 35,78 persen dari Pagu. Realisasi ini meningkat 24,74 persen (yoy).

Realisasi Belanja yang lebih tinggi daripada Pendapatan mengakibatkan APBD mengalami **Defisit sebesar Rp366,17 miliar** dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel 2.18.





2.2.1 Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Daerah

Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp5.083,66 miliar atau 35,00 persen dari Target dan mengalami pertumbuhan sebesar 47,59 persen (yoy).

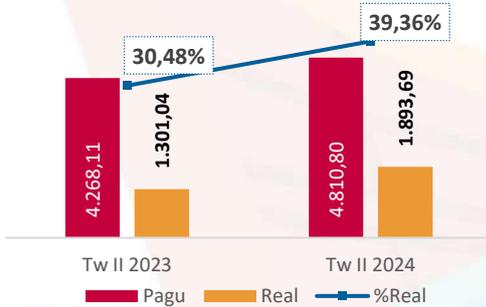
Pendapatan Transfer masih mendominasi Realisasi Pendapatan Daerah di

Kepri yaitu sebesar Rp3.186,87 miliar (62,69 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp1.893,69 miliar (37,25 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan **masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.**

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD sebesar Rp1.893,69 miliar atau 39,36 persen dari Target. PAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Grafik 2.14 – Pagu dan Realisasi PAD Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

PAD tumbuh sebesar 45,55 persen (yoy) ditopang oleh Pajak Daerah yang tumbuh sebesar 54,35 persen. Pertumbuhan Pajak Daerah ini berkontribusi sangat besar hingga mampu menopang komponen lainnya yang mengalami kontraksi, yaitu Retribusi Daerah (minus 3,57 persen), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (minus 2,92 persen), dan Lain-lain PAD yang Sah (minus 33,37 persen).

Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp1.768,82 miliar atau 93,41 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar berturut-turut adalah Lain-lain PAD yang Sah (2,92 persen), Retribusi Daerah (2,84 persen), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (0,83 persen).

Grafik 2.15 – Breakdown Realisasi PAD per Kab/Kota, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)





Jika data didetilkan per pemda, maka sebagai mana terlihat pada Grafik 2.15 bahwa Pajak Daerah tertinggi di pemda Provinsi Kepri yaitu sebesar Rp818,64 miliar, kemudian pada posisi kedua Kota Batam sebesar Rp689,20 miliar, dan ketiga pada Kab. Karimun sebesar Rp128,74 miliar.

Retribusi Daerah dengan realisasi tertinggi juga terjadi di Kota Batam sebesar Rp68,44 miliar kemudian disusul oleh Kab. Karimun sebesar Rp37,05 miliar, dan Kota Tanjungpinang sebesar Rp28,76 miliar.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan tertinggi ada pada Kota Batam Rp7,94 miliar kemudian disusul oleh Kab. Bintan 7,89 miliar, dan Kab. Natuna Rp5,39 miliar.

Realisasi LLPADyS tertinggi ada pada Kota Batam Rp81,17 miliar kemudian diikuti oleh Provinsi Kepri Rp19,95 miliar, dan Kab. Natuna Rp15,37 miliar.

Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp1.768,82 miliar atau 47,79 persen dari Target. Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Rp256,58 miliar dengan kontribusi 14,79 persen terhadap total

Pajak Daerah. Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi penyumbang realisasi terbesar kedua yaitu Rp249,79 miliar dengan kontribusi 14,39 persen terhadap total Pajak Daerah. Pajak Sarang Burung Walet menjadi pajak dengan kontribusi realisasi penyumbang Pajak Daerah terendah, dengan realisasi sebesar Rp36,49 juta atau kurang dari 0,01 persen dari total Pajak Daerah.

Pajak Daerah tumbuh sebesar 54,35 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Rp256,58 miliar dengan kontribusi 14,79 persen terhadap total Pajak Daerah. Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi penyumbang realisasi terbesar kedua yaitu Rp249,79 miliar dengan kontribusi 14,39 persen terhadap total Pajak Daerah. Pajak Sarang Burung Walet menjadi pajak dengan kontribusi realisasi penyumbang Pajak Daerah terendah, dengan realisasi sebesar Rp36,49 juta atau kurang dari 0,01 persen dari total Pajak Daerah.

Kinerja pertumbuhan Pajak Daerah yang sangat signifikan merupakan bukti suksesnya penerapan perkara turunan baru terkait Pajak Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

Kontraksi Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Bintan

Di tengah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kepri, realisasi Pajak Hotel justru mengalami kontraksi sebesar 16,66 persen (yoy). **Pajak Hotel secara signifikan terkontraksi di Bintan sebesar minus 65,73 persen (yoy) atau turun sebesar Rp38,64 miliar.** Berdasarkan data BPS Kepri, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bintan mengalami penurunan (yoy) pada Juni 2024 sebesar minus 13,95 persen. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kepri disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Kenaikan harga tiket ferry Singapura-Batam (PP) dari Rp450 ribu menjadi lebih dari Rp840 ribu.

Singapura merupakan kontributor 60,62 persen wisman di Kepri. Kenaikan harga tiket ferry menekan jumlah kunjungan wisman ke Kepri. Meskipun demikian, Pajak Hotel di Batam tidak turun dikarenakan okupansi hotel dari wisatawan lokal dan bisnis cukup tinggi. Namun, sektor pariwisata Bintan yang didominasi oleh wisman menjadi sangat terdampak atau kenaikan harga tiket ferry ini.

- Pengajuan *Visa on Arival* (VoA) belum di setujui Kemenparekraf dan Imigrasi

Skema baru VoA memberi pilihan bagi wisman non-ASEAN yang hanya ingin berkunjung singkat untuk menggunakan *short term visa* 7 hari dengan tarif Rp100 ribu dibandingkan harus mengurus visa 30 hari dengan tarif Rp500 ribu, sampai saat ini, ketentuan VoA belum berlaku di Provinsi Kepri sehingga menyebabkan biaya mahal untuk mengurus visa reguler.





Inovasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Realisasi Pendapatan Perpajakan Daerah

a. Inovasi Pemprov Kepri dalam Optimalisasi Pemungutan BBNKB dan PKB

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sampai dengan triwulan II 2024, baik PKB maupun BBNKB mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan triwulan II 2023, yaitu:

- **PKB meningkat 9,92 persen (yoy)** atau sebesar Rp23,15 miliar
- **BBNKB meningkat 19,02 persen (yoy)** atau sebesar Rp39,37 miliar

Meskipun kinerja realisasi PKB dan BBNKB terbilang baik, Pemprov Kepri tetap melakukan inovasi melalui program **Bebas BBNKB-2 sebesar 100 persen** mulai awal tahun serta sejak Agustus hingga Oktober ditambah dengan program **Bebas PKB sebesar 50 persen**. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk mendatangi Samsat terdekat dan mulai memperbaiki tertib administrasi kendaraan bermotor. Melalui kebijakan ini diharapkan kedepannya akan mendorong pertumbuhan penerimaan PKB dan BBNKB.

b. Inovasi Pemko Batam dalam Optimalisasi Pemungutan BPHTB

BPHTB merupakan komponen penyumbang Pajak Daerah terbesar ketiga di Kepri, yaitu 14,34 persen dari total Pendapatan Pajak Daerah. Batam menjadi daerah dengan realisasi BPHTB tertinggi yaitu Rp232,17 miliar atau 93,33 persen dari total seluruh BPHTB di Kepri.

Realisasi BPHTB di Kota Batam dipengaruhi oleh inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, melalui **Peraturan Pemko Batam Nomor 2 tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**. Pada peraturan tersebut, ditetapkan **tarif diskon 50 persen** bagi warga yang menerima

sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis dalam program PTSL dengan luas maksimal 600 m².

Hal ini mengakomodir kebijakan pemerintah pusat PTSL program sertifikasi tanah yang bertujuan untuk memberikan sertifikat gratis bagi warga yang mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali. Dengan kombinasi fasilitas pengajuan sertifikat gratis dan tarif BPHTB 50 persen, semakin menarik minat warga untuk mendaftarkan sertifikat kepemilikan tanah.

Hasilnya, meskipun diberlakukan diskon 50 persen, realisasi BPHTB di Kota Batam pada triwulan II 2024 **mengalami peningkatan sebesar 23,43 persen (yoy)** atau sebesar Rp47,23 miliar.

c. Inovasi Pemkab Karimun dalam Optimalisasi Pajak Hiburan

Pada UU HKPD terdapat ketentuan tarif PBHT khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen yang berpotensi pada kontraksi Pajak Hiburan. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Karimun melakukan inovasi berupa **Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 terkait Insentif Fiskal Pajak Hiburan**. Insentif yang diberikan, yaitu:

- untuk diskotek, karaoke, klub malam, dan bar sebesar 37,5 persen; dan
- untuk mandi uap/spa sebesar 50 persen.

Dampaknya, realisasi Pajak Hiburan di Karimun pada triwulan II 2024 **mengalami peningkatan sebesar 16,36 persen (yoy)** atau sebesar Rp3,37 miliar.





Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dapat direalisasikan Rp53,83 miliar dengan pertumbuhan minus 3,57 persen (*yoy*). Meskipun demikian, berdasarkan data terbaru dari Bidang PAPP (Laporan GFS), Retribusi Daerah di Kepri telah terealisasi sebesar Rp146,62 miliar. Retribusi Daerah dengan realisasi terbesar pertama adalah **Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar Rp62,44 miliar dengan kontribusi 42,59 persen dari total Retribusi Daerah**. Kemudian Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi penyumbang realisasi terbesar kedua yaitu Rp25,89 miliar dengan kontribusi 17,66 persen terhadap total Retribusi Daerah. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa memberikan kontribusi realisasi terendah, dengan realisasi sebesar Rp2,7 juta atau kurang dari 0,01 persen dari total Retribusi Daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA, meningkat tinggi menunjukkan tingginya tenaga kerja asing yang bekerja di lingkup Kepri. Kota Batam adalah kontributor terbesar bagi Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing karena Batam merupakan wilayah yang dikhususkan sebagai wilayah industri dan investor asing.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih sangat rendah, yaitu sebesar Rp15,66 miliar atau hanya 23,53 persen dari Target. Realisasi tersebut tumbuh minus 2,92 persen (*yoy*). Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemda (*dividen*) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah masih sangat rendah, yaitu sebesar Rp55,38 miliar atau 8,07 persen dari

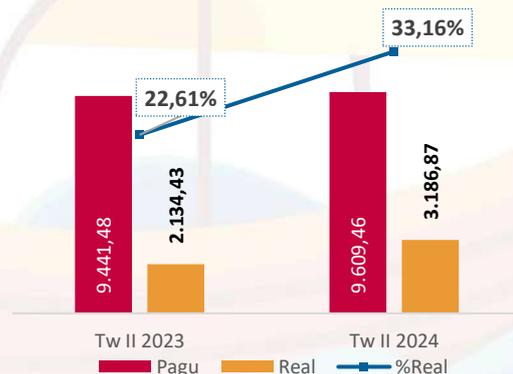
Target. Meskipun demikian, berdasarkan data terbaru dari Bidang PAPP (Laporan GFS), LLPAD di Kepri telah terealisasi sebesar Rp138,17 miliar. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen PAD dengan kontraksi tertinggi yaitu sebesar minus 33,37 persen (*yoy*).

Realisasi LLPAD didominasi oleh Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp94,14 miliar (68,13 persen dari total realisasi LLPAD). Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar minus 43,85 persen (*yoy*).

Dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki satker BLUD menjadi kunci dalam mendukung peningkatan komponen pendapatan ini.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Grafik 2.16 – Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Realisasi Pendapatan Transfer di Kepri triwulan II 2024 sebesar Rp3.186,87 miliar atau hanya 33,16 persen dari Target. Realisasi ini tumbuh minus sebesar 49,31 persen (*yoy*). Pertumbuhan yang signifikan tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tumbuh sebesar 54,82 persen (*yoy*).

Realisasi terbesar terdapat pada DAU yaitu sebesar Rp2.354,62 miliar atau 62,17 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer. DAK menempati posisi kedua dengan realisasi sebesar Rp597,36 miliar atau 15,77 persen total realisasi Pendapatan Transfer, dan DBH SDA pada posisi ketiga sebesar Rp451,73 miliar atau



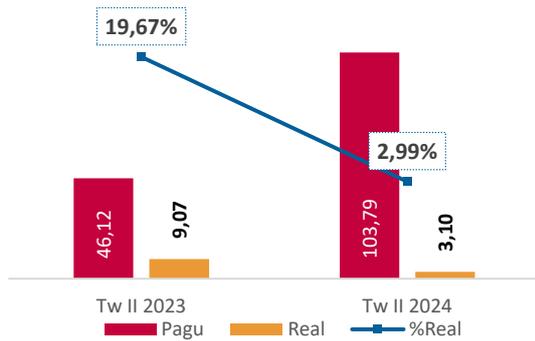


11,93 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer.

Adapun kontribusi paling kecil diberikan oleh Dana Insentif Daerah yaitu 0,70 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer atau sebesar Rp26,59 miliar.

2.2.1.3 Pendapatan Lainnya

Grafik 2.17 – Pagu dan Realisasi LLPDyS Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Sampai dengan triwulan II 2024, Pendapatan Lainnya telah terealisasi sebesar Rp3,10 miliar atau 2,99 persen dari Target. Realisasi ini tumbuh minus 65,77 persen (yoy).

2.2.1.4 Analisis Perkembangan Rasio Perpajakan Daerah terhadap PDRB

Tabel 2.19 – Rasio Perpajakan Daerah Kepri terhadap PDRB Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tw II 2023	Tw II 2024
Pendapatan Perpajakan Daerah	1.145,96	3.701,41
PDRB	161.824,21	172.357,08
Tax Ratio	0,71%	2,29%

Sumber: Dit APK dan BPS Kepri, 2024 (diolah)

Rasio Perpajakan Daerah terhadap PDRB pada triwulan II 2024 sebesar 2,29 persen. Rasio tersebut menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar 0,71 persen. Peningkatan rasio ini disebabkan peningkatan Perpajakan Daerah (223,00 persen) yang jauh melampaui peningkatan PDRB (6,51 persen). Penerapan UU HKPD menjadi kontribusi

peningkatan Pajak Daerah sejak mulai berlakunya Perda Gubernur tentang tarif Pajak Daerah serta Perkada Bupati/Walikota sejak awal tahun 2024.

2.2.1.5 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian kepada pemerintah daerah, berupa wewenang mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara mandiri melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah. Peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi syarat utama untuk mendukung otonomi tersebut. Oleh karena itu diberikan perluasan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kewenangan dan perluasan desentralisasi fiskal telah diberikan kepada pemerintah daerah, mayoritas **pemerintah daerah di Kepri masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat**. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Tak terkecuali pada Kepri, mayoritas Belanja Negara masih dibiayai oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 2.20 – Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal

IKF	Kondisi
	Kemandirian Fiskal
$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024





Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang akan dibagi ke dalam beberapa kluster sebagai mana Tabel 2.20.

IKF dihitung dengan membandingkan antara PAD dengan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman.

Selain itu, terdapat cara lain untuk menghitung kemandirian daerah yaitu dengan **Indeks Kemandirian Fiskal I**

Indeks Kemandirian Fiskal I (IKF I) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD dengan Total Pendapatan.

Hasil perhitungan **IKF I Tahunan** dari tahun 2017 s.d 2023 antara Kabupaten/Kota di Kepri akan berbeda, untuk itu perlu dibedakan hasil IKF per masing-masing Kabupaten/Kota. Grafik 2.21 menunjukkan bahwa 5 Kabupaten/Kota di lingkup Kepri masih berada pada kluster “Belum Mandiri”. Sementara itu, Kota Batam dan Kabupaten Karimun berada pada kluster “Menuju Kemandirian”.

memperhitungkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah, termasuk DBH.

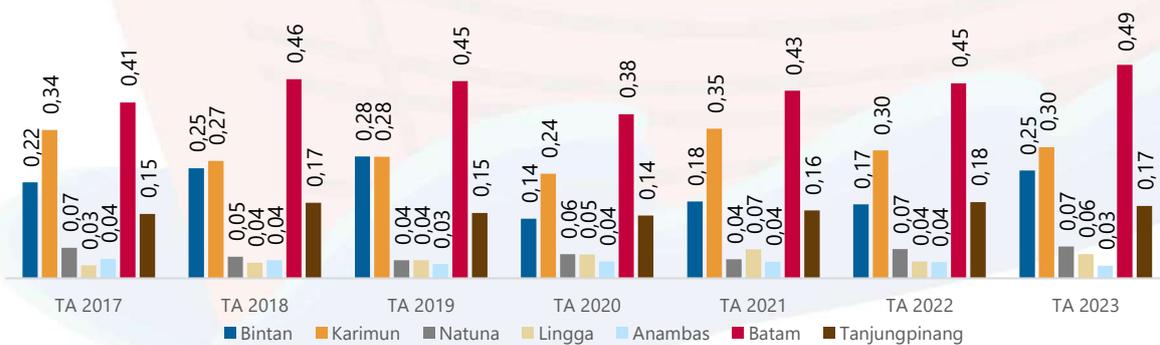
Berikut tingkat kemandirian daerah tiap Kabupaten/Kota lingkup Kepri berdasarkan kedua indeks tersebut:

[IKF I = PAD/Total Pendapatan]

[IKF II = (PAD+DBH)/Total Pendapatan]

Walaupun Kabupaten Karimun berada pada kluster “Belum Mandiri” pada tahun 2020 karena IKF I sebesar 0,24. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan masih berada pada kluster “Belum Mandiri”. Kabupaten Bintan sempat masuk kategori “Menuju Kemandirian” pada tahun 2019, namun tingkat IKF I turun drastis pada tahun 2020 hingga 2022, namun dapat kembali masuk kategori “Menuju Kemandirian” pada tahun 2023 dengan nilai 0,25.

Grafik 2.18 - Indeks Kemandirian Fiskal I Tahunan, 2017 - 2023



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

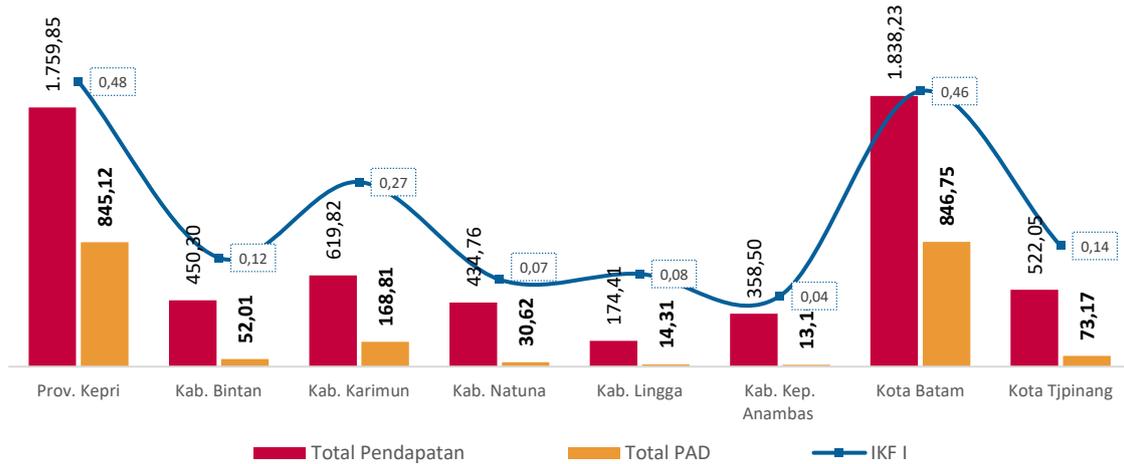
Secara parsial sebagai mana terlihat pada Grafik 2.18 IKF I, beberapa daerah berada pada klasifikasi “Menuju Kemandirian” dengan angka tertinggi ada pada Prov. Kepri sebesar 0,48, kemudian Kota Batam sebesar 0,46 dan Kabupaten Karimun sebesar 0,27. Sedangkan Kabupaten Bintan (0,12), Kabupaten Natuna

(0,07), Kabupaten Lingga (0,08), Kabupaten Kepulauan Anambas (0,04), dan Kota Tanjungpinang (0,14) berada pada klasifikasi “Belum Mandiri”. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas daerah pada triwulan II 2024 berada pada klasifikasi “Belum Mandiri.”





Grafik 2.19 - Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I, Triwulan II 2024



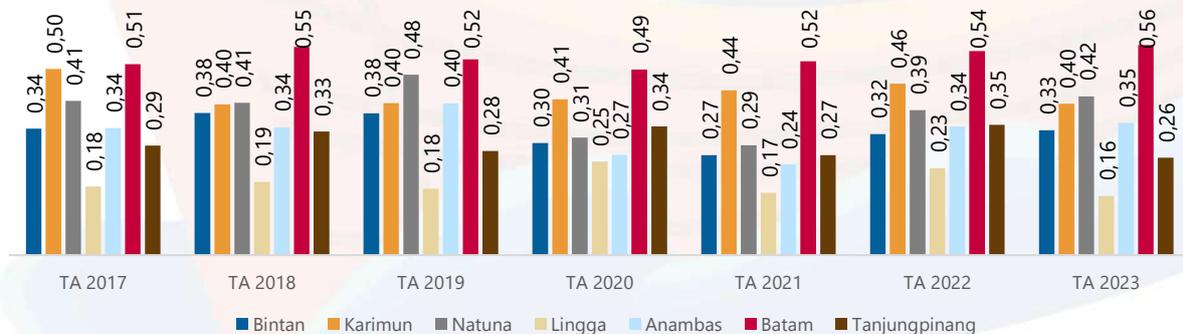
Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Indeks Kemandirian Fiskal II

Indeks Kemandirian Fiskal II (IKF II) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD ditambah Dana Bagi Hasil dengan Total Pendapatan. Hasil perhitungan **IKF II Tahunan** dari tahun 2017 s.d 2023 sebagaimana terlihat pada Grafik 2.20 menunjukkan bahwa Kota Batam berada pada kluster "Mandiri".

Lima Kabupaten/Kota lainnya berada pada kluster "Menuju Kemandirian", yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, sedangkan Kabupaten Lingga masih berada pada kluster "Belum Mandiri".

Grafik 2.20 - Indeks Kemandirian Fiskal II, 2017 - 2023



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

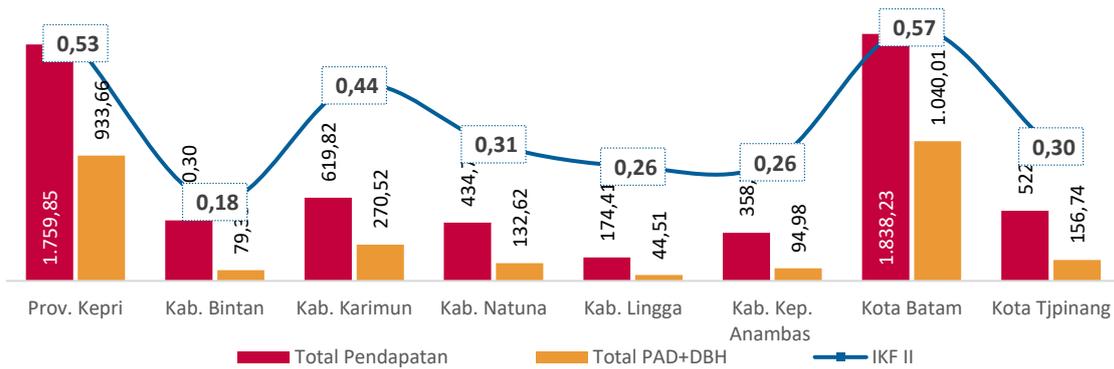
Secara parsial, sebagai mana Grafik 2.21, Kota Batam (0,57) dan Prov. Kepri (0,53) masuk pada kluster "Mandiri." Adapun Kab. Karimun (0,44), Kab. Natuna (0,31), Kota Tanjungpinang (0,30), Kab. Lingga (0,26), dan Kab. Kep. Anambas (0,26) berada pada klasifikasi "Menuju

Kemandirian" sedangkan Kab. Bintan (0,18) berada pada kategori "Belum Mandiri". Dari hasil IKF II periode triwulan II 2024, dapat disimpulkan bahwa banyak kabupaten/kota berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian" dibandingkan pada klasifikasi "Mandiri" dan "Belum Mandiri".





Grafik 2.21 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II, Triwulan II 2024



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

Walaupun telah ditambahkan DBH, Kab. Bintan tetap berada pada level “Belum Mandiri”. Kab. Bintan belum optimal dalam mengeksplorasi potensi sumber daya alam yang dapat mengangkat tingkat kemandirian.

Sektor pariwisata merupakan sektor utama penopang pendapatan Kabupaten Bintan. Sektor tersebut tidak termasuk yang dibagi

hasilkan karena merupakan kontributor secara langsung. Kabupaten Bintan tidak mempunyai potensi SDA yang dapat dieksplorasi dan eksploitasi sehingga dapat menambah pendapatan DBH. Oleh karena itu, Kabupaten Bintan seharusnya lebih berfokus pada peningkatan PAD untuk meningkatkan kemandirian Kab. Bintan.

2.2.1.6 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

1. **Pemda agar melakukan evaluasi efektivitas kinerja BUMD dalam rangka meningkatkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.** Realisasi laba BUMD yang rendah bahkan menurun (yoy) merupakan bukti menurunnya kinerja BUMD.
2. Realisasi LLPAD didominasi oleh Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp94,14 miliar (68,13 persen dari total realisasi LLPAD). Realisasi Pendapatan BLUD mengalami pertumbuhan sebesar minus 43,85 persen (yoy). **Pemerintah daerah perlu memetakan BLUD yang mengalami penurunan pendapatan dan menemukan permasalahannya.** Hal tersebut penting dilakukan mengingat

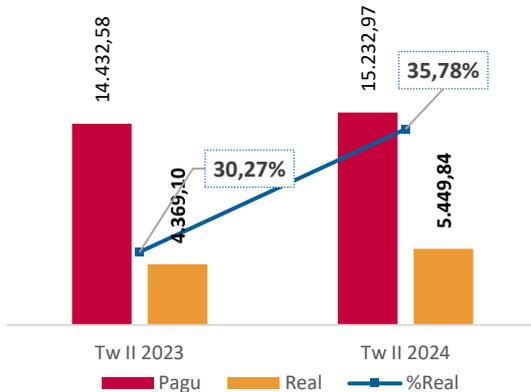
- seharusnya BLUD merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi pemerintah daerah.
3. Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga perlu **mencontoh kisah sukses yang dilakukan oleh Pemprov Kepri, Pemko Batam, dan Pemko Tanjungpinang dalam rangka melakukan optimalisasi pendapatan pajak daerah.**
4. Pemko Batam c.q. BP Batam, Pemko Tanjungpinang, dan Pemkab Bintan perlu melakukan **rapat pembahasan bersama pihak penyedia kapal ferry Singapura dan Malaysia terkait standarisasi tarif tiket kapal.**





2.2.2 Analisis Realisasi dan Growth Belanja Daerah

Grafik 2.22 – Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

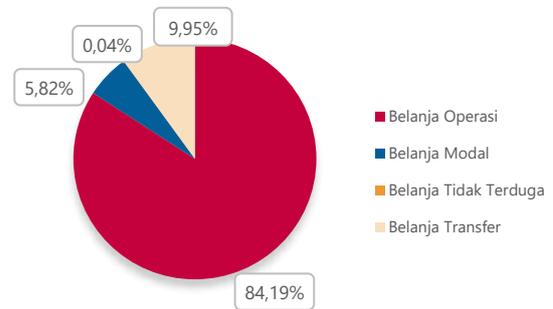


Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp5.449,84 miliar atau 35,78 persen dari Pagu. Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan triwulan II 2023 yang hanya sebesar 30,27 persen dari Pagu.

Secara porsi, Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp4.558,32 miliar, kemudian berturut-turut didominasi oleh Belanja Transfer sebesar Rp542,26 miliar, Belanja Modal sebesar Rp317,03 miliar, dan Belanja Tidak

Grafik 2.23 – Porsi Realisasi Belanja Daerah, Triwulan II 2024



Sumber: Dit APK, 2024 (diolah)

Terduga sebesar Rp2,24 miliar. Adapun persentase porsi Belanja Daerah sebagai mana tersaji pada Grafik 2.23.

Belanja Daerah tumbuh 24,74 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya hampir seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasi yang tumbuh sebesar 149,30 persen (yoy), Belanja Barang dan Jasa yang tumbuh 28,16 persen (yoy) dan Belanja Modal yang tumbuh sebesar 14,98 persen (yoy).

2.2.2.1 Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Operasi

Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp4.588,32 miliar atau 39,15 persen dari Pagu. Belanja Bunga merupakan Belanja Operasional dengan realisasi persentase tertinggi, yaitu 56,96 persen sedangkan Belanja Pegawai merupakan belanja dengan realisasi nominal tertinggi yaitu sebesar Rp2.772,66 miliar.

Realisasi Belanja Operasi tumbuh sebesar 29,29 persen (yoy). Belanja Hibah merupakan Belanja Operasional dengan persentase pertumbuhan tertinggi, yaitu 169,11 persen (yoy) sedangkan Belanja Bunga dengan persentase realisasi pertumbuhan terendah yaitu tumbuh minus 41,55 persen (yoy).

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sangat rendah, yaitu sebesar Rp317,03 miliar atau 14,98 persen dari Pagu. Dari sisi nominal maupun persentase, realisasi terbesar Belanja Modal terdapat pada Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp149,78 miliar atau 16,69 persen dari Pagu. Realisasi terendah ada pada Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,05 miliar atau 0,79 persen dari Pagu.

Belanja Modal tumbuh sebesar 1,67 persen (yoy). Pertumbuhan tertinggi Belanja Modal terdapat pada **Belanja Modal Aset Lainnya** yaitu sebesar 168,59 persen (yoy). Pertumbuhan paling kontraktif terjadi pada





Belanja Modal Tanah yaitu minus 96,20 persen (yoy).

Belanja Tidak Terduga

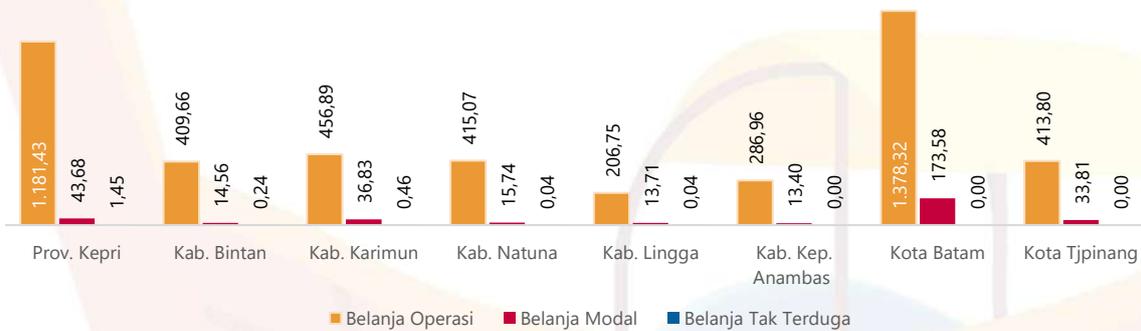
Belanja Tidak Terduga dapat direalisasikan sebesar Rp2,24 miliar atau hanya 2,61 persen dari Pagu. Belanja ini tumbuh kontraktif sebesar minus 11,98 persen (yoy). Meskipun rendah, realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan dan bersifat *force majeure*, misalnya penanggulangan bencana alam dll. Di sisi lain, rendahnya realisasi Belanja ini menunjukkan hal positif, yaitu tidak terdapat bencana atau hal-hal *force majeure* lainnya.

Belanja Transfer

Belanja Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp542,26 miliar atau 41,34 persen dari Pagu. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil dapat direalisasikan sebesar Rp346,78 miliar atau 44,63 persen dari Pagu, sedangkan Belanja Bantuan Keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp195,47 miliar atau 36,56 persen dari Pagu.

Belanja Transfer tumbuh 7,18 persen (yoy) dengan rincian Belanja Bagi Hasil tumbuh 2,90 persen (yoy) dan Belanja Bantuan Keuangan tumbuh 15,74 persen (yoy).

Grafik 2.24 – Breakdown Realisasi Belanja per Kab/Kota, Triwulan II 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

2.2.2.2 Belanja Berdasarkan Pemerintah Daerah

Jika didetilkkan per masing-masing pemda, maka terlihat baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal paling dominan terdapat di Kota Batam, sebesar Rp1.378,32 miliar dan Rp173,58 miliar. Sedangkan Belanja Tak Terduga paling dominan terdapat di Kepri sebesar Rp1,45 miliar.

Realisasi Belanja Operasi paling rendah terdapat di Kab. Lingga sebesar Rp206,75 miliar. Realisasi Belanja Modal paling rendah terdapat pada Kab. Kep. Anambas sebesar Rp13,40 miliar. Sedangkan realisasi Belanja Tak Terduga paling rendah ada pada Kab. Kep. Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang dengan realisasi Rp0 miliar

2.2.2.3 Kontribusi Belanja Daerah Terhadap PDRB

Tabel 2.21 – Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Periode	Belanja Daerah	PDRB	% Kontribusi	Growth Belanja	Growth PDRB
S.d. Tw II 2023	4.369,10	161.824,21	2,70%		
S.d. Tw II 2024	5.449,84	172.357,08	3,16%	24,74%	6,51%

Sumber: GFS dan BPS, 2024 (diolah)





Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB meningkat, yaitu pada triwulan II 2024 sebesar 3,16 persen dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar 2,70 persen (*yoy*). Peningkatan ini disebabkan laju pertumbuhan PDRB yang lebih rendah (6,51 persen) bila dibandingkan dengan laju peningkatan Belanja Daerah (24,74 persen).

Sebagai mana telah dijelaskan dalam Bab I pada KFR ini, peningkatan PDRB Kepri

sudah sangat baik dengan menjadi peringkat pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-2 di Sumatera sebesar 7,15 persen (*ctc*). Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh HBKN Ramadhan, Imlek, Nyepi, dan Paskah di triwulan I, kemudian pada triwulan II terdapat aktivitas parpol masa kampanye, libur anak sekolah, dan pembagian gaji THR serta Gaji ke-13 yang turut mendorong pergerakan ekonomi di Kepri.

2.2.2.4 Rekomendasi Kebijakan Belanja

- 1. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah masih rendah, yaitu 35,78 persen dari Pagu.** Realisasi paling rendah ada pada Belanja Modal yaitu sebesar 14,98 persen dari Pagu. Pemerintah Daerah perlu mendorong percepatan Belanja Modal, khususnya Belanja Modal Tanah yang memiliki persentase realisasi paling rendah.
- 2. Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah** agar difokuskan pada infrastruktur dasar

daerah/pulau terpencil, meliputi konektivitas, penyediaan air bersih dan sanitasi, pelatihan SDM dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal.

Pemerintah Provinsi bersama DPMPSTP dan Dinas KUKM agar mengembangkan potensi daerah seperti pariwisata, perikanan dan umkm yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal.

2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi Triwulan II 2024

Tabel 2.21 – Realisasi Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi Triwulan II, 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Rincian Anggaran Konsolidasian	TW II 2023	TW II 2024	Growth
Pendapatan Konsolidasi	7.834,06	9.352,50	19,38%
Belanja	7.624,94	9.083,23	19,13%
Transfer	248,07	517,16	108,47%
Surplus (Defisit) Anggaran	209,13	242,27	15,85%
Pembiayaan	190,66	254,38	33,42%
SiLPA/SiKPA	399,79	496,64	24,23%

Sumber: GFS Kanwil DJPb Kepri, 2024 (diolah)

2.3.1 Pendapatan Konsolidasi

Sampai dengan triwulan II 2024, jumlah Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp9.352,50 miliar. Jumlah ini tumbuh 19,38 persen (*yoy*) bila dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang sebesar Rp7.834,06 miliar.

2.2.2 Belanja Konsolidasi

Sampai dengan triwulan II 2024, jumlah Belanja Konsolidasi sebesar Rp9.083,23 miliar. Jumlah ini tumbuh 19,13 persen (*yoy*) bila dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar Rp7.624,94 miliar.

2.3.3 Transfer Konsolidasi

Sampai dengan triwulan II 2024, jumlah Transfer Konsolidasi sebesar Rp517,16 miliar. Jumlah ini tumbuh 108,47 persen (*yoy*) bila dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar Rp248,07 miliar.

2.3.4 Surplus/Defisit Konsolidasi

Atas posisi Pendapatan Konsolidasian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Belanja Konsolidasian dan Transfer Konsolidasi, maka terjadi Surplus sebesar Rp242,27 miliar.





Jumlah Surplus ini tumbuh sebesar 15,85 persen (yoy).

2.3.5 Pembiayaan Konsolidasi

Jumlah Pembiayaan Konsolidasi pada triwulan II 2024 sebesar Rp254,38 miliar. Adapun jumlah ini seluruhnya disumbang oleh APBD Konsolidasi lingkup Kepri.

2.3.6 SiLPA/SiKPA

Terdapat SiLPA pada triwulan II 2024 sebesar Rp496,64 miliar. Adapun jumlah ini seluruhnya disumbang oleh APBD Konsolidasi lingkup Kepri.





A. Potensi Geografis dan Ekowisata:

Berada pada wilayah **strategis laut cina selatan dimana pulau terluar berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Vietnam** sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan mancanegara. Pantai sepanjang ± 8 km berpasir putih berbulir halus dihiasi pohon kelapa dan cemara, laut biru jernih dan pulau-pulau kecil.

Objek daya tarik keindahan alam natural dengan berbagai destinasi meliputi:

1. **Wisata Keanekaragaman Hayati Bawah Laut:** (ikan hias dan biota laut): snorkeling and diving
2. **Wisata Natural Alam Asri** dengan Ketenangan Pedesaan
3. **Event Olahraga Air:** Perlombaan Perahu Layar, Jet Ski

B. Ketersediaan Hotel dan Penginapan

1. Terdapat 7 (tujuh) hotel/penginapan di Kec Jemaja sekitar Pantai Padang Melang.
2. Terdapat 16 resto/rumah makan yang berada di Kecamatan Jemaja.

C. Peluang Pariwisata Kepulauan Anambas

1. **Keindahan surga bawah laut** telah diakui internasional, ditandai dengan kunjungan berlibur artis dunia.
2. **Rekor Muri 2017**, Pelepasan anak penyu terbanyak di Indonesia 4.901 ekor.
3. Perlunya **Massive Publication** dan penyelenggaraan Event Internasional dalam skala besar untuk memancing kedatangan turis mancanegara.

D. Event Pariwisata di Padang Melang, Kepulauan Anambas

1. **Padang Melang International Folklore**

International Event: International Yacht Rally dari negara Swedia, New Zealand, Australia, Belanda, Perancis, Yunani dan Inggris.

2. Festival Padang Melang (*Marine & Cultural Celebration*)
3. Termasuk dalam Kharisma **Event Nusantara** (KEN), yaitu 100 program unggulan Kemenpar 2024, menampilkan pentas seni budaya, bazar dan kuliner khas daerah.



Foto: Kabupaten Anambas, Google

4. E. Tantangan Pengelolaan Pariwisata Kepulauan Anambas

Keindahan Private Beach berlokasi remote dan terisolir menyebabkan daerah wisata belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai seperti sering terjadinya pemadaman listrik secara bergilir di malam hari, serta belum terintegrasinya transportasi khususnya dari jalur penerbangan internasional.

F. Peluang Investasi pembukaan Jalur Internasional pada Bandara Letung

Untuk **meningkatkan konektivitas ke Pantai Padang Melang**. Kemenhub telah menggelontorkan Rp250 miliar untuk mengembangkan Bandara Letung pada 2014 – 2019 lahan seluas 136 hektar dengan runway sepanjang 1.400 x 30 meter.

Kemenhub melanjutkan pengembangan Bandara Letung senilai Rp25 miliar dengan penambahan: a) runway menjadi 1.600 x 30meter; b) menampung 60 ribu penumpang; c) peningkatan frekuensi dari seminggu sekali menjadi tiga kali s.d. minggu.

Bandara letung agar membuka jalur internasional untuk **meningkatkan potensi pariwisata**, antara lain:

1. Meningkatkan akses dan mempermudah menuju destinasi wisata Padang Melang;
2. Meningkatkan kunjungan wisatawan jarak jauh, efisiensi waktu dan biaya;
3. Stimulasi ekonomi lokal, menumbuhkan peluang usaha hotel, resto, dan transport lokal;
4. Promosi Wisata lebih efektif, maskapai dapat mempromosikan langsung ke dunia luar;
5. Meningkatkan pendapatan daerah, pajak bandara, pajak pariwisata. (hotel, resto, retribusi).



Foto: Kabupaten Anambas, Google



Energy may be likened to
the bending of a crossbow;
decision, to the releasing of
a trigger.

Sun Tzu - The Art of War



Sumber: Dinpar Provinsi Kepri

BAB III

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Bawah Reserve, Kabupaten Anambas

Bawah Reserve merupakan kompleks resors di Kabupaten Anambas yang memiliki perpaduan antara penginapan mewah, kawasan konservasi laut, hutan tropis yang rimbun, dan pemandangan laut yang luar biasa. Bawah Reserve dibangun di kawasan konservasi dan terdiri dari enam pulau dengan pemandangan memesona. Di sana juga terdapat 13 pantai dan tiga laguna alami. Di sekeliling resor terdapat 100 hektare hutan hujan yang rimbun dengan tanaman-tanaman tropis.





Local Economic Development Review

- Analisis Realisasi Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik Bidang:

Pendidikan
Kesehatan
Jalan

Air Minum
Sanitasi
Pertanian

- Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L
- Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

Sinergi dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan: Harmoni Keuangan Pusat dan Daerah

Local Wisdom of Riau Island: Unity in Diversity



Dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat yang merata, **sinergi dan kolaborasi** antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama. Sinergi dan Kolaborasi Keuangan Pusat dan Daerah di Kepulauan Riau dilaksanakan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi bagaimana kedua tingkat pemerintahan dapat **bekerja bersama secara efektif dalam mengimplementasikan program kerja yang selaras**

Kepulauan Riau, dengan kekayaan sumber daya alam dan **tantangan geografis yang unik**, menghadapi kebutuhan khusus dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Salah satu peran penting Kanwil DJPB Provinsi di Kepulauan Riau adalah menjalankan tugas sebagai **Regional Chief Economist (RCE)** dan **Financial Treasurer (FA)** dengan **pendekatan sesuai budaya masyarakat Melayu (sosio-kultural)**.

Dalam mengimplementasikan peran RCE dan FA di daerah, Kanwil DJPB Kepri yang senantiasa melibatkan **OPD dan dinas terkait** secara bersama-sama mendiskusikan **current issues** dan mengembangkan solusi bersama sesuai kondisi daerah. Kegiatan Kanwil DJPB Kepri juga sangat didukung oleh **stakeholders** lainnya seperti **BPS, BI, BPKP, BPK, OJK, Perbankan dan masyarakat di Kepri**.

Koordinasi dan sinergi menjadi **kunci** dalam upaya mewujudkan **pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kepulauan Riau**. Sinergi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya **memperkuat fondasi ekonomi regional**, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat





3.1 Pendahuluan

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan SOP Link 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Kolaborasi antara Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sangat penting untuk memastikan harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah terjaga dengan baik. Sinergi ketiga unit di Kementerian Keuangan ini menjadi sangat penting dalam mengawal harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Secara khusus, peran DJPb di Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dalam mengawal pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis.
2. Analisis permasalahan harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mendukung DAK Fisik di masing-masing wilayah.
3. Identifikasi Upaya Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh pemerintah daerah.

Tujuan utama aktivitas tersebut adalah dalam rangka memperoleh gambaran kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan, sekaligus memotret upaya yang dilakukan oleh pemda maupun satker dalam sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik. Selain itu, diharapkan adanya rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik.

Ruang lingkup monev Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik yang dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Kepri berfokus pada spasial/kewilayahan dengan alokasi DAK Fisik.

Monev sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik tahun 2024 dilaksanakan terhadap 6 (enam) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu: Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Jalan; Bidang Air Minum; Bidang Sanitasi; dan Bidang Pertanian. Pada Kajian Fiskal Regional triwulan II Tahun 2024, Kanwil DJPb Prov. Kepri menyajikan data dan menjelaskan secara rinci gambaran kinerja, kendala serta upaya dalam Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di tingkat wilayah.

3.2 Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik dan DAK Fisik pada 6 Bidang

RO Harmonis di tingkat wilayah Kepri tersebar pada empat (4) K/L, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian. Keempat K/L ini masing-masing membidangi RO Harmonis sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya masing-masing: Kementerian PUPR memiliki belanja RO Harmonis pada bidang jalan, sanitasi, dan air minum; Kemendikbudristek pada bidang pendidikan; Kementerian Pertanian pada bidang pertanian serta Kementerian Kesehatan pada bidang kesehatan dan KB.

3.2.1 Perbandingan Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik dan TKD DAK Fisik

Terdapat 6 bidang DAK Fisik yang didukung oleh Belanja K/L, yaitu air minum, jalan, kesehatan dan KB, pendidikan, pertanian, dan sanitasi. Untuk melihat perbandingan antara Pagu pada DAK Fisik dan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, terjadi pada tabel sebagai berikut:





Tabel 3.1 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L (RO Harmonis) dan TKD Dak Fisik Tahun 2024 (dalam Rp)

Bidang	Belanja K/L (RO Harmonis)			TKD DAK Fisik		
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real
Air Minum	76.126.292.000	32.511.583.895	42,71%	6.953.789.000	-	-
Jalan	462.284.606.000	157.219.457.992	34,01%	160.499.591.000	25.724.514.498	16,03%
Kesehatan dan KB	2.221.924.000	-	-	110.760.405.000	87.600.000	0,08%
Pendidikan	91.803.760.000	35.949.531.947	39,16%	203.582.668.000	2.753.017.500	1,35%
Pertanian	809.745.000	156.681.800	19,35%	4.589.438.000	-	-
Sanitasi	1.550.000.000	309.704.293	19,98%	1.155.503.000	-	-
Jumlah	634.796.327.000	226.146.959.927	35,63%	487.541.394.000	28.565.131.998	5,86%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Bidang jalan merupakan bidang dengan Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik tertinggi sebesar Rp462,28 miliar, dengan realisasi Rp157,22 miliar (34,01 persen dari Pagu). Adapun Pagu DAK Fisiknya sebesar Rp160,50 miliar, dengan realisasi sebesar Rp25,72 miliar (16,03 persen dari Pagu). Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Bidang pendidikan memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp91,80 miliar, dengan realisasi Rp35,95 miliar (39,16 persen dari Pagu). Adapun Pagu DAK fisik pada bidang pendidikan sebesar Rp203,58 miliar, dengan realisasi Rp2,75 miliar (1,35 persen dari Pagu). Pendidikan menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang air minum memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik tertinggi sebesar Rp76,13 miliar, dengan realisasi Rp32,51 miliar (42,71 persen dari Pagu). Adapun Pagu DAK Fisiknya sebesar Rp6,95 miliar, dan belum terdapat realisasi s.d. 30 Juni 2024.

Bidang kesehatan dan KB memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp2,22 miliar, dan belum terdapat realisasi s.d. 30 Juni 2024. Adapun Pagu DAK fisik pada bidang kesehatan dan KB sebesar Rp110,76 miliar, dengan realisasi Rp0,88 miliar (0,08 persen dari Pagu). Kesehatan adalah bidang yang menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Bidang sanitasi memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik tertinggi sebesar Rp1,55 miliar, dengan realisasi Rp0,31 miliar (19,98 persen dari Pagu). Adapun Pagu DAK Fisiknya sebesar Rp1,55 miliar, dan belum terdapat realisasi s.d. 30 Juni 2024.

Bidang pertanian memiliki Pagu Belanja K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp0,81 miliar, dengan realisasi Rp0,16 miliar (19,35 persen dari Pagu). Adapun Pagu DAK Fisik pada bidang pertanian sebesar Rp5,59 miliar, dan belum terdapat realisasi s.d. 30 Juni 2024.





3.2.2 Alokasi Anggaran Belanja K/L Secara Umum

Tabel 3.2 – Pagu K/L yang Mendukung DAK Fisik RO Harmonis (dalam Rp)

BA	K/L	Pagu Total	Pagu Mendukung DAK Fisik	Porsi (%)	Jumlah Satker	Jumlah RO
018	Kementerian Pertanian	8.784.823.000	809.745.000	9,22%	6	8
023	Kemendikbudristek	614.320.210.000	55.090.757.000	8,97%	3	7
024	Kementerian Kesehatan	154.223.878.000	2.221.924.000	1,44%	1	21
033	Kementerian PUPR	1.038.483.064.000	576.673.901.000	55,53%	5	18
Jumlah		1.815.811.975.000	634.796.327.000	34,96%	15	54

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Kementerian PUPR memiliki alokasi Belanja RO Harmonis sebesar Rp576,67 miliar (55,53 persen dari total Pagu Kementerian PUPR), terbagi pada 5 satker dengan 18 Rincian Output. Pagu tersebut merupakan yang terbesar dalam RO Harmonis di Kepri.

Pagu Harmonis yang terbesar kedua yaitu Kemendikbudristek dengan alokasi sebesar Rp55,09 miliar dari total Rp614,32 miliar (8,97 persen dari Pagu Kemendikbudristek di Kepri), terbagi pada 3 satker dengan 2 Rincian Output.

Pagu terbesar selanjutnya terdapat pada Kementerian Kesehatan dengan Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp6,77 miliar dari total Rp2,22 miliar (1,44 persen dari total Pagu

Kemenkes di Kepri), terdapat pada 1 satker dengan 21 Rincian Output.

Kementerian Pertanian memiliki Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp0,81 miliar dari total Rp8,78 miliar (9,22 persen dari Pagu Kementerian Pertanian di Kepri), terdapat pada 6 satker dengan 8 Rincian Output.

Secara keseluruhan Pagu K/L mendukung DAK Fisik sebesar Rp634,80 miliar (34,96 persen dari total Pagu K/L terkait RO Harmonis), yang tersebar pada 15 satuan kerja dengan 54 Rincian Output.

3.2.3 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Tabel 3.3 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L per Subbidang RO Harmonis Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Bidang	Subbidang	K/L	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu Bidang	Real Bidang	%	Jumlah Satker	Jumlah RO
Air Minum	Air Minum	Kementerian PUPR	76,13	32,51	42,71%	76,13	32,51	42,71%	3	4
Jalan	Jalan	Kementerian PUPR	462,28	157,22	34,01%	462,28	157,22	34,01%	2	12
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kementerian Kesehatan	0,88	0,00	-	2,22	0,00	-	1	21
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kementerian Kesehatan	1,34	0,00	-					
Pendidikan	Unknown	Kementerian PUPR	36,71	23,62	64,34%	91,80	35,95	39,16%	4	8
	PAUD	Kemendikbudristek	0,13	0,04	30,55%					
	SD/SMP/SMA/SMK	Kemendikbudristek	54,96	12,29	22,36%					
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	Kementerian Pertanian	0,81	0,16	19,35%	0,81	0,16	19,35%	6	8
Sanitasi	Sanitasi	Kementerian PUPR	1,55	0,31	19,98%	1,55	0,31	19,98%	1	1
Total			634,80	226,15	35,63%	634,80	226,15	35,63%	17	54

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Realisasi Belanja K/L mendukung DAK Fisik bidang jalan Rp157,22 miliar (34,01 persen dari Pagu) yang dilaksanakan oleh Kementerian

PUPR, melalui 2 satker dengan 12 Rincian Output.





Pada bidang pendidikan, Pagu terbesar terdapat pada subbidang SD, SMP, SMA, SMK dengan Pagu Rp54,96 miliar, dengan realisasi Rp12,29 miliar (22,36 persen dari Pagu). Kemudian subbidang *unknown* (tidak teridentifikasi) memiliki Pagu sebesar Rp36,71 miliar, telah direalisasikan Rp23,62 miliar (64,34 persen dari Pagu). Selanjutnya subbidang PAUD memiliki pagu Rp0,13 miliar, telah direalisasikan Rp0,04 miliar (30,55 persen dari Pagu).

Realisasi Belanja K/L mendukung DAK Fisik bidang air minum sebesar Rp32,51 miliar (42,81 persen dari Pagu) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, melalui 3 satker dengan 4 Rincian Output.

Bidang kesehatan dan KB memiliki Pagu terbesar berada pada subbidang penguatan

sistem kesehatan dengan Pagu Rp1,34 miliar, dan belum terdapat realisasi s.d. 30 Juni 2024. Selanjutnya pada subbidang penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* dengan Pagu Rp0,88 miliar, dan belum terdapat realisasi s.d. 30 Juni 2024.

Bidang pertanian hanya terdapat satu subbidang, yaitu pertanian - tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang memiliki Pagu Rp0,81 miliar dan telah direalisasikan Rp0,16 miliar (19,98 persen dari Pagu).

Pada bidang sanitasi memiliki Pagu Rp1,55 miliar dengan realisasi Rp0,31 miliar (19,98 persen dari Pagu).

3.2.4 Capaian RO Utama Pada Belanja K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Tabel 3.4 – Pagu dan Realisasi Belanja K/L per Subbidang RO Harmonis Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

Bidang	Satuan	Pagu (M)	Realisasi (M)	Vol	Real Vol	% Capaian
Air Minum						
Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan	Km	39,56	13,49	9,3	0	-
Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter/detik	27,41	18,75	15	8,33	55,55%
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	8,08	0,00	2880	1440	50,00%
Jalan						
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km	189,44	76,75	21,98	0	-
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	80,60	23,91	34,52	0	-
Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	Km	70,33	25,11	2,89	0	-
Kesehatan dan KB						
Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi (LP - 4)	Orang	0,59	-	48	0	-
Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23)	Orang	0,28	-	30	0	-
Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT Pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23)	Orang	0,25	-	30	0	-
Pendidikan						
Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	36,78	6,13	1336	565	42,29%
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	Unit	36,71	23,62	8	6,71	83,88%
Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	9,05	2,86	1578	783	49,62%
Pertanian						
Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	0,23	0,01	1	0	-





Bidang	Satuan	Pagu (M)	Realisasi (M)	Vol	Real Vol	% Capaian
Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Hektar	0,23	0,09	9	5	55,56%
Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	0,14	0,01	1	0	-
Sanitasi						
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah	1,55	0,31	7	3	42,86%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

1. Bidang Jalan

Terdapat 17 Rincian Output pada bidang jalan, dengan 3 Rincian Output terbesar, yaitu pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (MP) yang memiliki Pagu sebesar Rp189,44 miliar, preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan dengan Pagu sebesar Rp80,60 miliar, dan jalan kawasan prioritas (ProPN) memiliki Pagu Rp70,33 miliar.

Realisasi Rincian Output pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (MP) sebesar Rp76,75 miliar (40,52 persen dari Pagu). Rincian Output ini memiliki volume pekerjaan jalan sepanjang 21,98 km, namun belum terdapat capaian output s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Rincian Output preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan sebesar Rp23,91 miliar (29,66 persen dari Pagu). Rincian Output ini memiliki volume pekerjaan jalan sepanjang 34,52 km, namun belum terdapat capaian output s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Rincian Output jalan kawasan prioritas (ProPN) sebesar Rp25,11 miliar (35,70 persen dari Pagu). Rincian Output ini memiliki volume pekerjaan jalan sepanjang 2,89 km, namun belum terdapat capaian output s.d. 30 Juni 2024.

2. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan terdiri dari 8 Rincian Output, dengan 3 Rincian Output terbesar, yaitu guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru, rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, dan

satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya.

Rincian Output guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru memiliki Pagu Rp36,78 miliar, dengan realisasi Rp6,13 miliar (16,68 persen dari Pagu). RO ini memiliki volume output sebanyak 1.336 orang, yang telah tercapai sebanyak 565 orang (42,29 persen dari target output) s.d. 30 Juni 2024.

Rincian Output rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah memiliki Pagu Rp36,71 miliar, dengan realisasi Rp23,62 miliar (64,34 persen dari Pagu). RO ini memiliki volume output sebanyak 8 unit, yang telah tercapai sebanyak 6,71 unit (83,88 dari target output) s.d. 30 Juni 2024.

Rincian Output rehabilitasi dan satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya memiliki Pagu sebesar Rp9,05 miliar, dengan realisasi Rp2,86 miliar (31,60 persen dari Pagu). RO ini memiliki volume output sebanyak 1.578 orang, yang telah tercapai sebanyak 783 orang (49,62 dari target output) s.d. 30 Juni 2024.

3. Bidang Kesehatan dan KB

Terdapat 21 Rincian Output pada bidang kesehatan, dengan 3 Rincian Output terbesar, yaitu tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi (LP - 4) yang memiliki Pagu sebesar Rp0,46 miliar, tenaga kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23) Pagu sebesar Rp0,28 miliar, dan tenaga kesehatan yang dilatih TOT pencegahan dan





pengendalian infeksi (SDM-23) memiliki Pagu Rp0,25 miliar.

Rincian Output tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi (LP - 4) memiliki volume output sebanyak 48 orang, namun belum terdapat realisasi anggaran dan capaian output s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Rincian Output tenaga kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23) memiliki volume output sebanyak 30 orang, namun belum terdapat realisasi anggaran dan capaian output s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Rincian Output tenaga kesehatan yang dilatih TOT pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23) memiliki volume output sebanyak 30 orang, namun belum terdapat realisasi anggaran dan capaian output s.d. 30 Juni 2024.

4. Bidang Air Minum

Bidang air minum terdiri dari 4 Rincian Output, dengan 3 Rincian Output terbesar, yaitu jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan, pembangunan SPAM kabupaten/kota, dan infrastruktur air minum berbasis masyarakat.

Rincian Output jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan memiliki Pagu Rp39,56 miliar, dengan realisasi Rp13,49 miliar (34,09 persen dari Pagu). RO ini memiliki volume output sebanyak 9,40 km, namun belum terdapat capaian output s.d. 30 Juni 2024.

Rincian Output pembangunan SPAM kabupaten/kota memiliki Pagu Rp27,41 miliar, dengan realisasi Rp18,75 miliar (68,41 persen dari Pagu). RO ini memiliki volume output sebanyak 15 liter/detik, yang telah tercapai sebanyak 8,33 liter/detik (55,33 dari target output).

Rincian Output infrastruktur air minum berbasis masyarakat memiliki Pagu Rp8,08 miliar,

belum terdapat realisasi anggaran s.d. 30 Juni 2024. RO ini memiliki volume output sebanyak 2.880 SR, yang telah tercapai sebanyak 1.440 SR (50,00 dari target output).

5. Bidang Kesehatan dan KB

Terdapat 21 Rincian Output pada bidang jalan, dengan 3 Rincian Output terbesar, yaitu tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi (LP - 4) yang memiliki Pagu sebesar Rp0,46 miliar, tenaga kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23) Pagu sebesar Rp0,28 miliar, dan tenaga kesehatan yang dilatih TOT pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23) memiliki Pagu Rp0,25 miliar.

Rincian Output tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi (LP - 4) memiliki volume output sebanyak 48 orang, namun belum terdapat realisasi anggaran dan capaian output s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Rincian Output tenaga kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23) memiliki volume output sebanyak 30 orang, namun belum terdapat realisasi anggaran dan capaian output s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Rincian Output tenaga kesehatan yang dilatih TOT pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23) memiliki volume output sebanyak 30 orang, namun belum terdapat realisasi anggaran dan capaian output s.d. 30 Juni 2024.

6. Bidang Sanitasi

Bidang air minum terdiri dari 1 Rincian Output, yaitu pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi yang memiliki Pagu sebesar Rp1,55 miliar, dengan realisasi Rp0,31 miliar (19,98 persen dari Pagu). Rincian Output





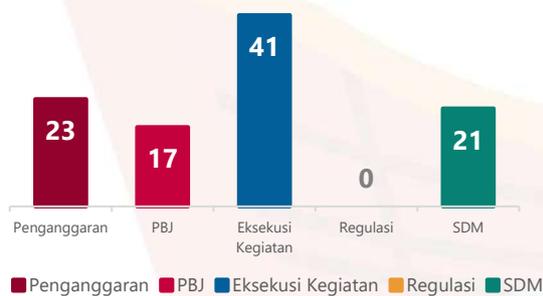
tersebut memiliki volume output sebanyak 7 daerah, dengan capaian output sebanyak 3 daerah (42,86 persen dari target output) s.d. 30 Juni 2024.

3.3 Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L

3.3.1 Keseluruhan Bidang

Dari keenam bidang pada RO Harmonis, kendala yang paling banyak dialami, yaitu pada aspek eksekusi kegiatan. Terdapat 41 Rincian Output yang mengalami kendala dan tantangan terkait dengan eksekusi kegiatan. Kemudian diikuti aspek penganggaran yang terdapat pada 23 Rincian Output, sumber daya manusia (SDM) pada 21 Rincian Output, pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada 17 Rincian Output, serta tidak terdapat kendala dan tantangan yang teridentifikasi pada aspek regulasi.

Grafik 3.1. Kendala dan Tantangan Keseluruhan Bidang



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Berdasarkan data yang tersaji pada Grafik 3.1, kendala yang paling banyak dialami oleh satuan kerja adalah pada aspek eksekusi kegiatan. Kluster kendala dan tantangan yang dialami pada aspek kegiatan, yaitu faktor luar seperti cuaca di Kepri yang memperhitungkan angin yang sangat kuat di musim tertentu, lokasi di pulau terluar dan sulit terjangkau, keamanan, dan lain-lain, kemudian kesiapan pedoman umum, juknis, dan dokumen pelaksanaan, serta kluster permasalahan lainnya.

Kendala yang disebabkan oleh faktor luar seperti cuaca, lokasi, keamanan, dan lain-lain, yaitu terdapat hal-hal yang tidak bisa diprediksi di lapangan terutama dari faktor cuaca dan lokasi yang sulit mobilitasnya. Kemudian kendala dalam hal kesiapan pedoman umum, juknis, dan dokumen pelaksanaan, yaitu pedoman umum/ juknis/ dokumen pelaksanaan, dari unit Eselon I yang baru terbit bulan April, Mei, hingga Juni, sehingga menghambat mulainya pelaksanaan kegiatan. Adapun kendala lainnya yang dihadapi yaitu kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan pihak ketiga, sehingga perlu menyesuaikan jadwal kegiatan dengan kesiapan narasumber.

Pada aspek penganggaran terdapat beberapa kluster tantangan penganggaran yang dialami oleh satuan kerja, yaitu revisi anggaran, blokir anggaran, *automatic adjustment*, sumber dana SBSN, dan tantangan lainnya.

Kendala pada kluster revisi anggaran, yaitu kegiatan yang belum sesuai anggaran kegiatannya, sehingga perlu direvisi, serta terdapat perubahan Pagu pada beberapa kegiatan. Pada kluster blokir anggaran terdapat blokir anggaran pada beberapa kegiatan, dan proses pembukaan blokir anggaran yang terhambat. Pada kluster *automatic adjustment*, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami blokir *automatic adjustment*, sehingga capaian belum maksimal sesuai target pada DIPA. Pada kluster sumber dana SBSN, kendala yang dihadapi yaitu banyak administrasi yang perlu diperhatikan. Tantangan lainnya yang dihadapi, yaitu perencanaan kegiatan yang belum sesuai antara kebutuhan masyarakat dan spesifikasi pada DIPA, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut ke Eselon I, dan realisasi kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Dalam aspek SDM terdapat beberapa kluster tantangan penganggaran yang dialami oleh satuan kerja, yaitu pergantian pejabat perbendaharaan, kekurangan SDM, pemahaman terhadap aplikasi, dan tantangan lainnya.





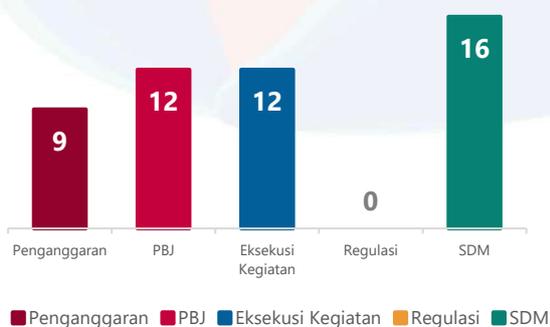
Pada kluster pergantian pejabat perbendaharaan, kendala yang dihadapi yaitu terdapat pergantian operator. Kemudian pada kluster kekurangan SDM, yaitu terdapat kekurangan SDM yang menguasai aplikasi. Kluster pemahaman aplikasi, yaitu SDM yang ada belum menguasai aplikasi dengan baik, sehingga masih diperlukan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan SDM. Tantangan lainnya, yaitu terdapat kendala teknis aplikasi.

Pada aspek PBJ terdapat beberapa kluster tantangan penganggaran yang dialami oleh satuan kerja, yaitu proses lelang, dan e-catalog. Kendala yang dihadapi pada proses lelang, yaitu terlambatnya proses lelang karena terdapat gangguan pada sistem PBJ, dan pemenuhan persyaratan administrasi. Adapun pada aspek e-catalog, terdapat kendala, yaitu tidak dapat diaksesnya e-catalog karena terganggunya sistem Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu.

3.3.2 Bidang jalan

Dalam bidang jalan, kendala yang paling banyak dialami yaitu dalam aspek SDM, yang terdapat pada 16 Rincian Output. Kemudian diikuti oleh aspek eksekusi kegiatan pada 12 Rincian Output, PBJ pada 12 Rincian Output, dan penganggaran pada 9 Rincian Output.

Grafik 3.2 - Kendala dan Tantangan – Bidang Jalan



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Kendala pada aspek SDM yang dihadapi pada bidang jalan, yaitu terdapat pergantian operator, SDM yang kurang memahami aplikasi dan masih memerlukan pelatihan, serta kendala teknis aplikasi yang kadang terjadi.

Pada aspek eksekusi kegiatan terdapat kendala, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang tidak bisa diprediksi di lapangan terutama dari faktor cuaca dan lokasi yang sulit mobilitasnya.

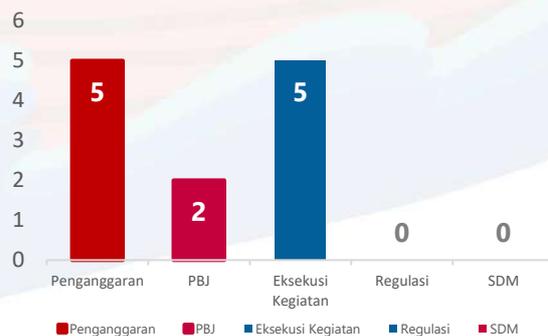
Kendala yang terjadi pada aspek PBJ di antaranya yaitu proses lelang yang kadang terhambat, sehingga membuat realisasi terlambat.

Kendala dalam aspek penganggaran kendala yang terjadi, yaitu banyak administrasi yang perlu diperhatikan dalam proses penganggaran.

3.3.3 Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan kendala yang dialami paling banyak pada aspek eksekusi kegiatan yang terdapat pada 5 Rincian Output, diikuti oleh aspek penganggaran pada 5 Rincian Output, dan PBJ pada 2 Rincian Output.

Grafik 3.3 - Kendala dan Tantangan Bidang Pendidikan



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Pada aspek eksekusi kegiatan terdapat beberapa kendala, yaitu pelaksanaan kegiatan yang baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan bahan dari kantor pusat, kegiatan yang masih menunggu arahan dari kantor pusat, dan jadwal kegiatan yang menyesuaikan dengan jadwal subjek pelatihan.





Kendala yang ditemui pada aspek penganggaran, di antaranya yaitu terdapat blokir anggaran pada beberapa program, pengesahan DIPA pada bulan Oktober, dan terdapat revisi anggaran.

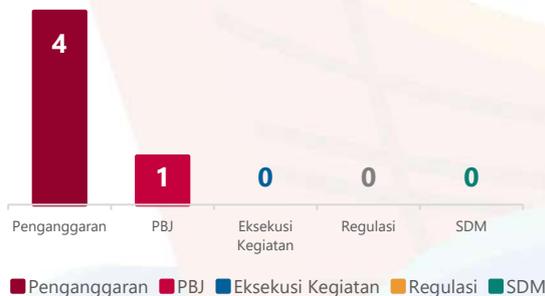
Kemudian kendala pada penganggaran, diantaranya yaitu terdapat blokir anggaran, blokir *automatic adjustment*, dan proses pembukaan blokir anggaran yang terhambat.

Dalam aspek PBJ, kendala yang ditemui pada bidang pendidikan yaitu permasalahan akses *e-catalog*, yang disebabkan oleh gangguan Pusat Data Nasional (PDN).

3.3.4 Bidang Air Minum

Kendala yang dijumpai pada bidang air minum, yaitu terkait dengan aspek penganggaran yang terdapat pada 4 Rincian Output, dan PBJ yang terdapat pada 1 Rincian Output. kendala dan eksekusi kegiatan 1 kendala.

Grafik 3.4 - Kendala dan Tantangan – Bidang Kesehatan dan KB



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

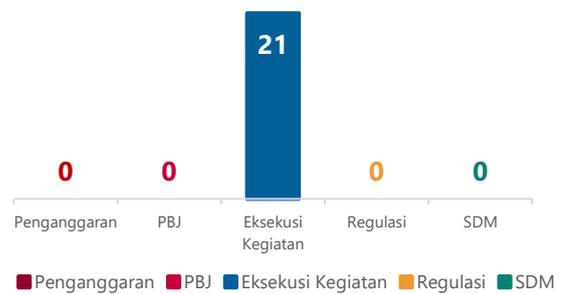
Tantangan pada aspek penganggaran di antaranya yaitu, terdapat blokir *automatic adjustment*, pemotongan atau perubahan Pagu anggaran, dan pembukaan blokir anggaran yang terhambat.

Dalam aspek PBJ kendala yang dialami yaitu terkait permasalahan pada sistem PBJ, sehingga menghambat proses lelang.

3.3.5 Bidang Kesehatan dan KB

Kendala yang dijumpai pada bidang kesehatan dan KB, yaitu terkait dengan aspek eksekusi kegiatan yang terdapat pada 21 Rincian Output. Kendala dan tantangan yang dihadapi pada bidang kesehatan dan KB di antaranya, yaitu kegiatan yang juknisnya baru terbit di bulan Mei, hingga Juni dari kantor pusat, dan kegiatan yang masih membutuhkan penyesuaian jadwal kegiatan sesuai dengan kesediaan narasumber.

Grafik 3.5 - Kendala dan Tantangan – Bidang Kesehatan dan KB

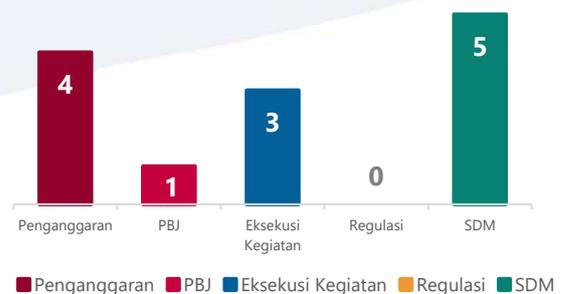


Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

3.3.6 Bidang Pertanian

Kendala yang paling banyak ditemui pada bidang pertanian, yaitu dalam aspek SDM yang terdapat pada 5 Rincian Output, kemudian diikuti oleh aspek penganggaran pada 4 Rincian Output, eksekusi kegiatan sebanyak 3 Rincian Output, dan PBJ pada 1 Rincian Output.

Grafik 3.6 - Kendala dan Tantangan Bidang Pertanian



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Pada aspek SDM kendala yang dialami, yaitu terbatasnya jumlah pengawas, dan





operator, serta kemampuan SDM yang kurang menguasai aplikasi.

Kendala yang ditemui pada aspek penganggaran, di antaranya yaitu perencanaan yang tidak sesuai antara kebutuhan masyarakat dan spesifikasi DIPA, serta terdapat blokir dan revisi anggaran pada beberapa kegiatan.

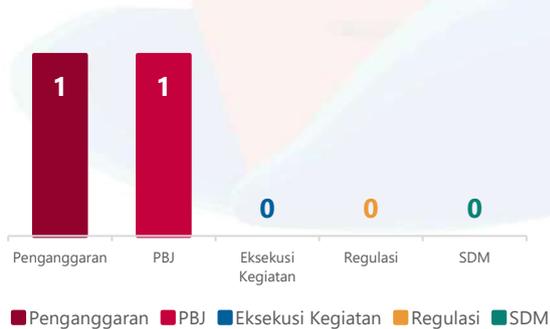
Aspek eksekusi kegiatan mengalami kendala di antaranya, yaitu juknis kegiatan yang baru terbit bulan Juni, dan kegiatan yang pencairan dananya dilaksanakan bulanan, namun kegiatan dilaksanakan berdasarkan undangan rapat.

Kendala pada aspek PBJ, terdapat kendala keterlambatan proses lelang karena pemenuhan syarat administrasi.

3.3.7 Bidang Sanitasi

Kendala pada bidang sanitasi, yaitu dalam aspek penganggaran, dan PBJ yang terdapat pada 1 Rincian Output. Kendala pada aspek penganggaran, yaitu terdapat *automatic adjustment* yang mempengaruhi kegiatan yang semestinya sudah dilaksanakan. kemudian kendala pada aspek PBJ, yaitu terdapat gangguan pada server PBJ yang mengakibatkan kendala proses lelang.

Grafik 3.7 - Kendala dan Tantangan Bidang Sanitasi



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

3.4 Kendala dan Tantangan Pelaksanaan DAK Fisik Pada 6 Bidang

Sampai dengan semester I Tahun 2024, beberapa **isu dalam penyaluran DAK Fisik** antara lain adalah:

1. Pada pelaksanaan DAK Fisik Pemda Kota Batam di bidang Kesehatan terdapat perubahan juknis dari Kementerian Kesehatan yang baru selesai pada bulan Juni sehingga dinas kesehatan harus menyesuaikan spesifikasi untuk pengadaan alat kesehatan dan pada *e-katalog* tidak terdapat spesifikasi yang TKDN sehingga harus meminta rekomendasi dari kementerian kesehatan dan team TKDN untuk mendapatkan persetujuan.
2. Pada Pemko Batam dan Pemkab Karimun, terdapat RK kegiatan yang lebih besar dari nilai kontrak karena pemda terlambat untuk melaksanakan revisi RK untuk memaksimalkan sisa pagu kontrak.
3. Terdapat kendala dalam proses revidi APIP yang cukup memakan waktu pada beberapa pemda hal ini dikarenakan Inspektorat selaku APIP memiliki kendala pada SDM yaitu kurangnya personil sehingga proses revidi mengalami keterlambatan. Berdasarkan komitmen pimpinan proses penyelesaian review tersebut tidak boleh lebih dari seminggu dari SPD terbit atau 5 hari kerja, dasarnya adalah surat permintaan revidi masuk.
4. OPD lambat melakukan *upload* dokumen penyaluran DAK Fisik seperti laporan realisasi penyerapan dana dan volume capaian output yang mendekati batas terakhir maksimal pengajuan, dikhawatirkan jika OPD Pelaksana terlambat melakukan perekaman pada aplikasi OMSPAN yang menyebabkan tertolaknya dokumen dan menyebabkan terjadinya gagal bayar. Selain itu, OPD juga lambat dalam mengajukan surat revidi dan menyiapkan data pendukung revidi kepada APIP.
5. Terdapat kendala yaitu terdapat lahan atau tanah yang statusnya belum *clear* sehingga menghambat pengerjaan proyek DAK Fisik.





Status tanah atau lahan yang *clean and clear* diperlukan sebagai aspek legalitas dalam pemindahtanganan sebuah properti agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

6. Kondisi Kepri yang berbentuk kepulauan dengan banyak pulau kecil yang terpisah oleh lautan juga memberikan kendala tersendiri terkait dengan letak geografis dan cuaca yang juga dapat menghambat pengerjaan proyek DAK Fisik.
7. Terdapat pergantian Kepala OPD Pemda dampak dari *reshuffle* berdampak pada pergantian operator dan pelaksana kegiatan DAK Fisik sehingga diperlukannya koordinasi kembali terkait dengan pergantian tersebut.

3.5 Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

3.5.1 Bidang Jalan

Pada bidang jalan telah dilakukan beberapa upaya strategis dari pemerintah daerah dan Kementerian PUPR, diantaranya yaitu melalui pembagian lokasi dan fokus pembangunan antara belanja K/L dan DAK Fisik di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dialog antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR. Pada tanggal 06 Mei 2024 telah dilaksanakan Musrenbangnas, Pemerintah Daerah Kepri bersama Kementerian PUPR Kepri mengusulkan enam proyek strategis melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 tersebut. Keenam proyek yang diusulkan tersebut, yakni pembangunan jembatan penghubung Batam-Bintan, penggantian jaringan distribusi utama (JDU) Perumda Tirta Kepri di Kota Tanjungpinang, pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional Pulau Bintan, peningkatan SPAM IKK Sebayar, (Bunguran Timur, Kabupaten Natuna), lalu pembangunan monumen tugu bahasa nasional di Pulau Penyengat, dan pembangunan jembatan semala di Natuna.

Selain itu juga upaya harmonisasi rutin dilaksanakan oleh direktorat teknis Kementerian PUPR bersama Kepala Daerah dan OPD terkait, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan jalan di Kepri.

Pada tahun 2024 terdapat pembangunan jalan diberbagai lokasi Kepri, Kementerian PUPR membangun jalan pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan. Terdapat 11 (delapan) proyek berstatus Proyek Prioritas Nasional, yaitu 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah, 2) pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN), 3) sarana dan prasarana pendidikan, 4) pembangunan SPAM dan sanitasi layak, 5) pengembangan fasilitas peningkatan kualitas rumah, 6) pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik, 7) penanganan permukiman kumuh, 8) peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, 9) fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan 10) keamanan bermukim (IMB dan SLF), serta 11) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

Pada capaian DAK Fisik, terdapat pembangunan, penangan, perbaikan, dan peningkatan kapasitas jalan yang tersebar pada 5 Kabupaten/Kota lingkup Kepri. Belanja ini terharmonisasi sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dengan percepatan pembangunan pada Kawasan 3T, percepatan pembangunan insfrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir, serta pengembangan kawasan pariwisata unggul Batam-Bintan.

3.5.2 Pendidikan

Upaya harmonisasi terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Kemendikbudristek dalam peningkatan layanan pendidikan di wilayah Kepri, di antaranya melalui dialog, serta pendampingan dari BPMP Kepri, bersama Dinas Pendidikan Kepri dalam pengajuan usulan dan pelaksanaan DAK Fisik.





Sinkronisasi tersebut terus diupayakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepri bersama Dinas Pendidikan Kepri dengan melaksanakan dialog dan rapat koordinasi. Salah satunya yaitu rapat koordinasi kebijakan merdeka belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kepri. Dengan kerjasama yang baik tersebut BPMP Kepri sebagai mitra strategis pemda mendapat apresiasi Gubernur dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kepri

Dalam pelaksanaannya, Belanja Kemendikbudristek di bidang Pendidikan memiliki beberapa output antara lain 1) guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru, 2) rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, satuan dikdas dan dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya, 3) guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran, 4) guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi.

Belanja DAK Fisik pendidikan sebagian besar digunakan untuk pengadaan, pengembangan, dan revitalisasi bangunan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SKB, SLB, SMK, SMA, dan perpustakaan sekolah di seluruh wilayah Kepri.

3.5.3 Air Minum

Pada bidang air minum telah dilakukan beberapa upaya strategis dari pemerintah daerah dan Kementerian PUPR, khususnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepri, melalui dialog dan keterlibatan satuan kerja pemerintah pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kepri Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kepri Tahun 2025 bertempat di Balairung (Aula) Wan Seri Beni Pusat Pemerintahan Kepri, Tanjungpinang. Koordinasi seperti ini rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan

satuan kerja lingkup pemerintah pusat dalam rangka menyelaraskan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Belanja Pemerintah Pusat pada bidang sanitasi di antaranya digunakan untuk pembangunan jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan infrastruktur air minum berbasis masyarakat.

Dalam menyelaraskan kegiatan tersebut, satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri (BPPW) rutin melaksanakan penandatanganan kerja sama bersama pemerintah daerah, salah satunya dalam menyelenggarakan kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) yang merupakan salah satu kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilakukan secara partisipatif dengan tujuan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi serta peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berdasarkan hal tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri melalui PPK Sanitasi Dian Novita Sitompul, S.T., M.Sc. melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sanitasi LPK dan Kegiatan SANIMAS Kepri Tahun Anggaran 2024.

3.5.4 Kesehatan

Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kepri senantiasa melaksanakan dialog dalam peningkatan layanan kesehatan di wilayah Kepri. Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik bidang kesehatan, dilaksanakan melalui pembagian fokus peningkatan layanan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

Pada alokasi Belanja Pemerintah Pusat di bidang Kesehatan, terdapat Belanja yang berharmonisasi dengan DAK Fisik, dengan Pagu terbesar pada Belanja tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi (LP - 4), tenaga kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi *emerging* di FKTP (SDM-23), tenaga kesehatan





yang dilatih TOT Pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23), serta tenaga kesehatan di FKTP yang dilatih TOT penanggulangan TBC bagi petugas kesehatan (SDM-23).

3.5.5 Bidang Pertanian

Upaya harmonisasi antara Belanja Kementerian Pertanian dan DAK Fisik bidang pertanian di wilayah Kepri dilakukan melalui pembagian fokus pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas pertanian di wilayah Kepri. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pertemuan dan diskusi bersama antara Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di Wilayah Kepri.

Belanja Kementerian Pertanian yang terkait pada bidang pertanian di Kepri dilaksanakan melalui kegiatan pemberian layanan kesehatan hewan, sertifikasi produk karantina pertanian, selanjutnya terdapat juga sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan pertanian, di dalamnya juga termasuk program daya tambah dan daya saing industri.

Pada belanja DAK Fisik, belanja digunakan untuk pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukung pertanian lainnya. Selain itu, terdapat juga pembangunan/renovasi Puskesmas dan sarana pendukungnya.

3.5.6 Sanitasi

Upaya harmonisasi terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian PUPUR, khususnya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri (BPPW) dalam peningkatan sanitasi di wilayah Kepri. Kerja sama dan koordinasi tersebut dilakukan melalui perjanjian kerja sama dan kegiatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPPW Kepri dalam meningkatkan sanitasi di Kepri.

Dalam bidang sanitasi output yang dihasilkan yaitu berupa pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi yang dilaksanakan oleh BPPW Kepri. Bekerjasama dengan pemerintah daerah Kepri, pada tahun 2024 telah melakukan sosialisasi dan penyediaan Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang merupakan salah satu kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilakukan secara partisipatif dengan tujuan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi serta peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program Penyediaan sarpras sanitasi tersebut meliputi pembangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.





Salah satu solusi bagi negara-negara berkembang dalam melakukan transformasi dalam menghadapi **climate change** adalah dengan **pembiayaan**. Dengan bantuan *The World Bank*, pengumpulan dana masyarakat untuk program pengendalian climate change dilaksanakan dengan hati-hati.

Di tahun 2016, Fiji menjadi negara pertama yang mengeluarkan **Green Bonds** sebesar 50 juta USD dengan tujuan penguatan iklim.

Green Bonds adalah salah satu jenis pembiayaan yang diciptakan untuk memperkuat pembiayaan *climate change*. Tidak hanya Indonesia, Kolombia, Mesir dan India menjadi 4 negara dari 19 negara berkembang (Cili sampai Uzbekistan) yang menggunakan pembiayaan "**Green Bonds**" untuk membiayai penerapan energi baru terbarukan dan transportasi umum.

Green Bonds telah mengumpulkan hampir 2,5 Triliun USD sampai dengan Januari 2023 untuk mendukung seluruh proyek *green dan sustainable energy*. Negara berkembang yang telah dijelaskan diatas menyumbang 74 miliar USD atau 2 persen dari total **Green Bonds** di seluruh dunia, memang jumlahnya belum signifikan namun dampaknya sangat besar bagi transformasi *climate change*. Investor sekarang ini semakin sadar akan pentingnya untuk mengembangkan investasi yang mendukung pembangunan hijau dan perlindungan terhadap lingkungan. Kesadaran ini terbangun dengan baik dengan kehadiran instrument pembiayaan **Green Bonds** di seluruh negara-negara pendukung perlindungan lingkungan terhadap dampak *climate change*.

Malaysia di tahun 2017 sebagai salah satu contoh bagi negara-negara Islam. Dengan mengeluarkan **Green Bonds** sebesar 481,9 USD proyek konstruksi di Kuala Lumpur. Jenis **Green Bonds** Islami yaitu **Green SUKUK** dengan bentuk utang dengan tingkat bunga nol. Jenis **Green Sukuk** tetap mempertahankan prinsip syariah dalam pengelolannya. Proyek yang dikembangkan adalah konstruksi efisien energi berupa 83 lantai Gedung perkantoran dan diakui sebagai akreditasi Gedung Hijau pertama di Malaysia.

Cairo
Monorail

Mesir di tahun 2020 dengan **Green Bonds** sebesar 750 juta USD. Mesir adalah negara pertama di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang mengumpulkan investasi untuk pembangunan **transportasi yang bersih** dan **manajemen air bersih**. Salah satu proyek besarnya adalah **Cairo Monorail** yang dibangun besar-besaran karena dapat membawa lebih dari 1 juta penumpang. Sistem Monorail ini akan mengurangi emisi karbon, kemacetan, bahkan kematian karena kecelakaan lalu lintas.

Proyek tersebut juga **membuka lapangan kerja** lebih dari 4.000 jenis pekerjaan sejak awal konstruksi sampai selesai dengan lebih dari 450 jenis pekerjaan yang permanen. Sejumlah **Green Bonds** tersebut juga digunakan untuk penyediaan air bersih dan proyek manajemen air kotor yang memberikan kemanfaatan kepada 16,9 juta masyarakat Mesir.

Bogota
Metro

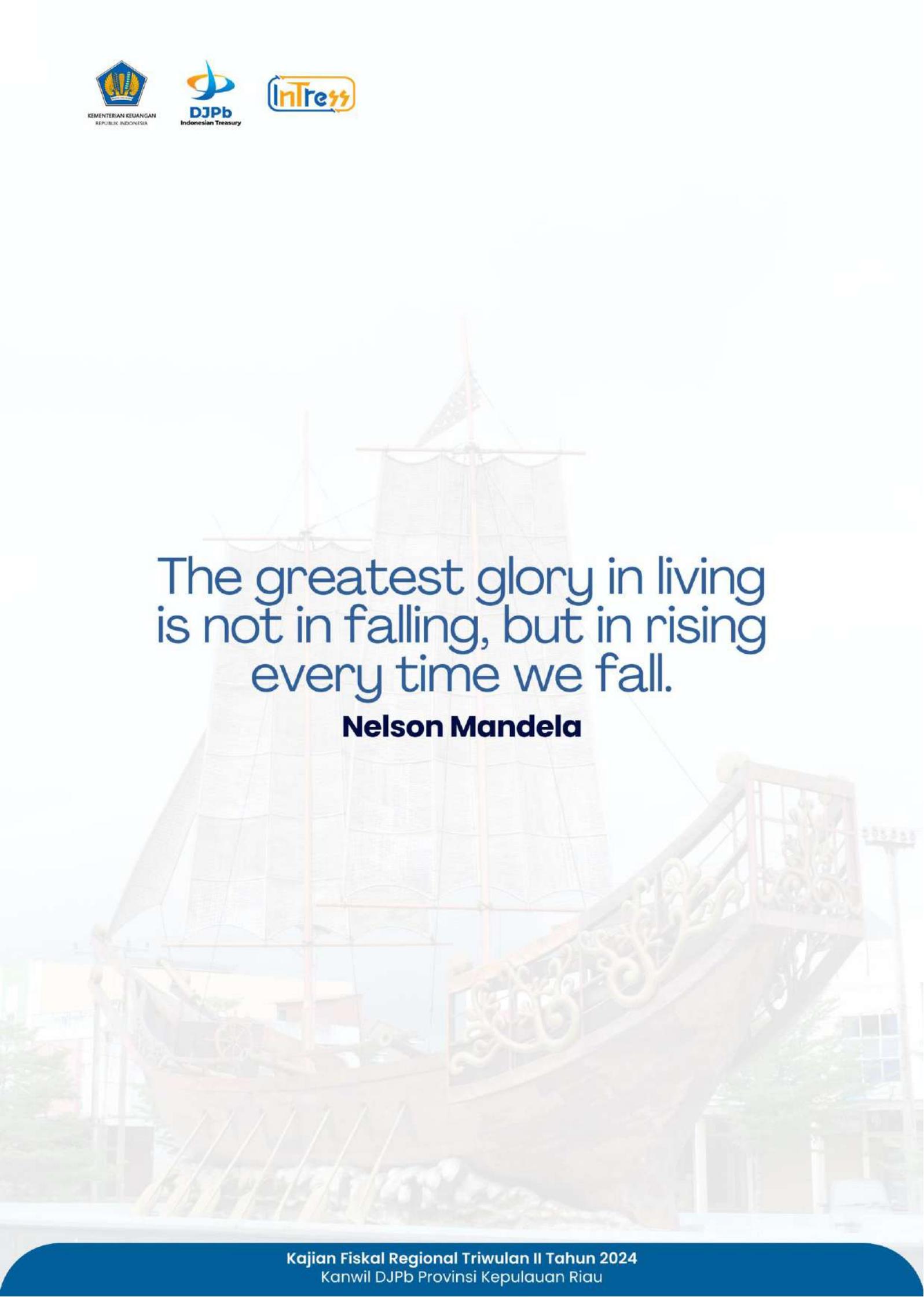
Negara lain adalah **Kolombia di Amerika Latin**. Kolombia mengeluarkan **Green Bonds** pertama kali di **tahun 2021** dengan nominal 11,4 juta USD. Jumlah tersebut dipergunakan untuk mendukung 27 proyek investasi di sektor manajemen air bersih, jasa ekosistem dan perlindungan biodiversity, energi baru terbarukan dan transportasi yang bersih (salah satu proyek transportasinya di **Bogota Metro**).

Sidrap Wind Farm,
South Sulawesi

Indonesia di tahun 2021 menerbitkan **Green Bonds** untuk membangun **Wind Farm di Sulawesi Selatan**, tepatnya di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Proyek tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga angin pertama sebagai pembangunan solusi energi terbarukan. Sulawesi dipilih sebagai pulau terbesar di Indonesia. Proyek ini selesai di tahun 2028, akan dipasang lebih dari 30 turbin angin untuk disalurkan ke lebih dari 70.000 rumah tangga.

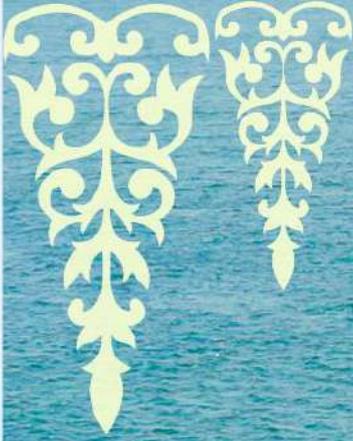
Proyek ini dilaksanakan bersama-sama dengan **PT. SMI, The World Bank Group dan ADB**. Indonesia menjadi negara dengan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar urutan ke sembilan yang sebagian besar berasal dari penggunaan batubara sebagai sumber energi terbesar, serta menyumbang lebih dari 50 persen dari campuran listriknya.

Indonesia sangat memiliki potensi **Energi baru terbarukan (EBT) mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan juga laut yang total potensinya dapat mencapai 3.686 gigawatt (GW)**. Namun, proses transisi ini terhalang oleh terbatasnya pendanaan dan **rendahnya minat investasi EBT di Indonesia**.



The greatest glory in living
is not in falling, but in rising
every time we fall.

Nelson Mandela



BAB IV

Analisis Tematik: Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya

Sumber: Dinpar Provinsi Kepri

Pulau Batu Berhanti, Kabupaten Bintan

Pulau Berakit atau Pulau Batu Berhanti adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura. Dengan luas wilayah hanya 800m persegi, pulau ini merupakan satu dari 111 pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden RI dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.





Thematic Issue Review

- Analisis Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kinerja Sektor Perekonomian Regional
- Analisis Policy Responses Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim
- Evaluasi atas Policy Response Pemerintah Dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

Analisis dampak *Policy Response* Perubahan Iklim terhadap Kinerja Sektor Perekonomian

Indonesia: One of The Most Deniers Country

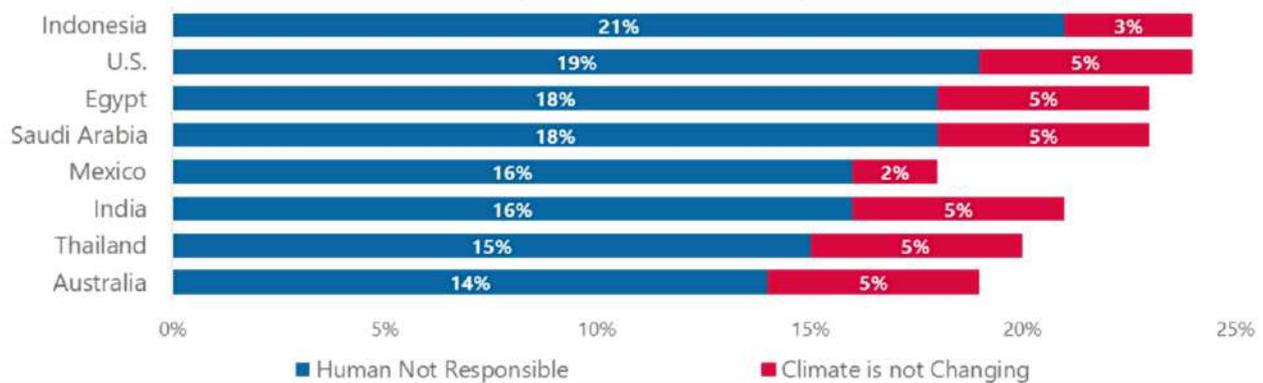
Local Expert Kanwil DJPb Kepri: Dr. Suyono Saputra, S.E., M.M.

Berdasarkan **Focus Group Discussion** yang dilaksanakan Kanwil DJPb Kepri bersama **Local Expert**, disinyalir bahwa **Indonesia** menjadi **“One of The Most Deniers Country”** salah satu **negara dengan tingkat ketidakpedulian tertinggi terhadap perubahan iklim.**

Hasil survei yang dilakukan oleh Buchholz pada tahun 2020 terhadap 26.000 orang yang berasal dari 25 negara berbeda menyatakan Indonesia dan Amerika merupakan negara dengan jumlah penyangkal perubahan iklim tertinggi.

Dalam survei yang dilakukan pada bulan Juli dan Agustus, **21% masyarakat Indonesia** dan 19% masyarakat Amerika **mengatakan bahwa perubahan iklim tidak nyata atau manusia tidak bertanggung jawab.** Lebih lanjut terdapat 3% masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa perubahan iklim tidak terjadi sama sekali.

Graph - Country Where Climate Change Deniers Live



Rendahnya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap perubahan iklim dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim di Indonesia. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, gas alam) untuk menghasilkan energi, pembuangan limbah dan deforestasi hutan akan meningkatkan suhu bumi dan menggeser siklus musim menjadi tidak teratur bahkan mengalami kekeringan.

Sesungguhnya masyarakat dapat menjadi pendukung gerakan perbaikan perubahan iklim apabila pemerintah dapat mengarahkan melalui peraturan dan kebijakan fiskal yang sesuai.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. melalui kebijakan dan regulasi yang tepat, seperti pembatasan emisi karbon, pengaturan limbah perusahaan, pengelolaan sampah daur ulang dan pengembangan energi baru terbarukan.

Selama ini usaha-usaha pemerintah melalui fiskal masih terus berlanjut, **Kanwil DJPb Kepri telah melakukan analisis dan mapping kebijakan fiskal melalui Belanja Pempus dan Transfer ke Daerah** serta program-program yang dilaksanakan baik satker maupun pemda di Kepri yang dijabarkan dengan komprehensif pada bab IV.

Untuk itu, **hasil analisis** yang kami lakukan **membawa kepada kesimpulan dan rekomendasi bahwa kebijakan fiskal yang tepat dalam pengendalian dan mitigasi climate change harus ditingkatkan melalui program tepat sasaran dan penambahan alokasi anggaran.** Kebijakan fiskal akan berdampak lebih besar dengan program sosialisasi dan edukasi secara massive kepada masyarakat.





4.1 Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh manusia pada abad ke-21. **Perubahan iklim** merujuk pada **perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata atau distribusi kejadian cuaca ekstrem di seluruh dunia**. Perubahan ini disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana ke atmosfer.

Beberapa fenomena yang telah terjadi dan terus berlangsung sebagai akibat dari terjadinya perubahan iklim antara lain mencakup:

1. **Pemanasan Global:** temperatur rata-rata global meningkat, yang berkontribusi pada perubahan cuaca ekstrem, pencairan es, dan kenaikan permukaan air laut.
2. **Perubahan Pola Hujan:** Pola hujan menjadi lebih tidak stabil, dengan beberapa daerah mengalami kekeringan parah, sementara tempat lain mengalami banjir.
3. **Kenaikan permukaan air laut:** pencairan es di Kutub Utara dan Kutub Selatan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, mengancam pulau-pulau kecil dan pesisir.
4. **Kerusakan Lingkungan:** perubahan iklim menyebabkan kerusakan habitat alami dan kehilangan keanekaragaman hayati, mengancam ekosistem dan spesies.
5. **Kesehatan masyarakat:** perubahan iklim dapat meningkatkan risiko penyakit terkait cuaca ekstrem, seperti penyakit infeksi dan gangguan pernapasan (ISPA).

Dampak perubahan iklim tersebut tidak hanya terbatas pada **lingkungan alam**, tetapi juga merambah ke **sektor ekonomi global**. Perubahan suhu, peningkatan tingkat laut, cuaca ekstrem, dan pola iklim yang tidak terduga semakin menantang ketahanan ekonomi dunia. Beberapa contoh dampak perubahan iklim terhadap perekonomian antara lain:

1. Kerugian di sektor pertanian

Perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakstabilan produksi pangan karena dampaknya terhadap cuaca dan kondisi pertanian. Peningkatan suhu yang ekstrem, kekeringan, dan banjir dapat mengurangi hasil panen dan mengganggu rantai pasokan pangan. Ini akan mengakibatkan kenaikan harga pangan dan ketidakpastian pasokan, memengaruhi kedaulatan pangan suatu negara dan meningkatkan risiko kelaparan.

2. Ancaman terhadap infrastruktur dan properti

Fenomena cuaca ekstrem, seperti badai tropis yang semakin kuat dan banjir yang lebih sering, meningkatkan risiko kerusakan pada infrastruktur kritis dan properti. Kerusakan ini tidak hanya memengaruhi sektor properti, tetapi juga industri asuransi dan keuangan. Klaim asuransi yang meningkat dapat menyebabkan kenaikan premi dan biaya asuransi, sementara kerugian infrastruktur dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pertumbuhan.

3. Ancaman terhadap industri pariwisata

Perubahan iklim dapat mengganggu daya tarik destinasi pariwisata karena cuaca ekstrem, kenaikan suhu, atau perubahan ekosistem. Ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan, pendapatan pariwisata, dan lapangan kerja terkait industri pariwisata. Negara-negara yang bergantung pada pariwisata sebagai sumber pendapatan utama akan terkena dampak secara ekonomi.

4. Peningkatan Biaya Kesehatan

Peningkatan Biaya Kesehatan akibat perubahan iklim juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat perekonomian. Penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan demam





berdarah dapat menyebar lebih luas karena iklim yang lebih hangat dan kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi vektor penyakit untuk berkembang biak. Biaya perawatan kesehatan yang meningkat akibat peningkatan penyakit menular akan mengurangi produktivitas tenaga kerja dan menimbulkan beban ekonomi pada sistem kesehatan.

5. Tantangan Bagi Keuangan Global

Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dapat memberikan tekanan pada pasar keuangan, memengaruhi harga aset, dan memperburuk stabilitas keuangan global. Institusi keuangan juga harus menghadapi risiko investasi yang meningkat terkait dengan proyek-proyek yang terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh perubahan iklim.

Berbagai **upaya** dan **kebijakan** dilakukan oleh Pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Beberapa upaya dan kebijakan yang dilakukan, antara lain:

1. Pengurangan Emisi dari Sumber Energi

- a. Mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi.
- b. Efisien energi, mengimplementasikan teknologi dan praktik yang meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.
- c. Transisi ke energi bersih, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih, seperti gas alam atau energi nuklir.

2. Pengelolaan Hutan dan Lahan

- a. Reboisasi dan Aforestasi, menanam kembali hutan yang telah rusak dan mengembangkan hutan baru di lahan yang kosong.

- b. Penghentian deforestasi, melindungi hutan dari penebangan ilegal dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.
- c. Restorasi lahan gambut yang rusak untuk mengurangi emisi karbon dari lahan tersebut.

3. Pertanian Berkelanjutan

- a. Praktik Pertanian Ramah Lingkungan, menggunakan metode pertanian yang mengurangi emisi gas rumah kaca (selanjutnya disingkat GRK), seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan air yang efisien.
- b. Mengoptimalkan penggunaan pupuk dan mengelola limbah ternak untuk mengurangi emisi metana dan dinitrogen oksida.

4. Pengelolaan Limbah

- a. Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan meningkatkan tingkat daur ulang.
- b. Mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan baik untuk mengurangi emisi metana, termasuk pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi.

5. Teknologi dan Inovasi

- a. Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mengurangi emisi GRK.
- b. *Capture and Storage of Carbon* (CCS), mengimplementasikan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dari pembangkit listrik dan industri.

6. Kebijakan dan Regulasi Pemberlakuan Pajak Karbon

- a. Menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi dengan membuat emisi menjadi lebih mahal bagi perusahaan.
- b. Perdagangan emisi, menggunakan mekanisme cap-and-trade yang





memungkinkan perusahaan untuk membeli dan menjual izin emisi.

7. Edukasi dan Kesadaran Publik

- a. Kampanye meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya mitigasi perubahan iklim dan cara-cara untuk mengurangi jejak karbon pribadi.
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan industri mengenai praktik-praktik yang berkelanjutan.

8. Kerjasama Internasional

- a. Berpartisipasi dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris untuk berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi.
- b. Bekerja sama dengan internasional, dengan harapan mendapat dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara maju untuk mengeksekusi proyek-proyek mitigasi.

4.2 Analisis Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kinerja Sektor Perekonomian Regional (Identifikasi Sektor Terdampak)

Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

4.2.1 Fakta Perubahan Iklim yang Telah Terjadi di Provinsi Kepri

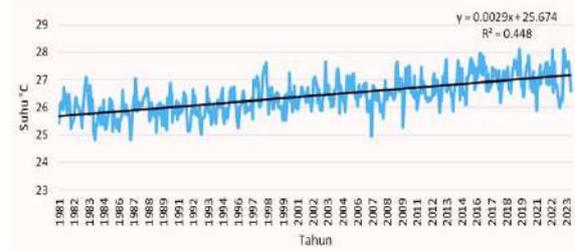
4.2.1.1 Kenaikan Suhu Udara

Kenaikan suhu udara merupakan sinyal terjadinya perubahan iklim di suatu daerah. Di Kota Tanjungpinang rata – rata mengalami peningkatan suhu udara mencapai 0,003°C per tahun (sumber: BMKG Tanjungpinang-2024).

Apabila konsentrasi GRK terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad 21 kenaikan suhu akan mencapai 3.5 – 4.0°C.

Kemudian, apabila pemerintah, masyarakat dan sektor swasta melakukan *business as usual*/tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, potensi perubahan suhu udara rata-rata tahunan Kepri berkisar antara 1,03 – 1,08°C.

Grafik 4.1 – Perubahan Suhu Udara Rata-Rata Kota Tanjungpinang Tahun 1981 - 2023

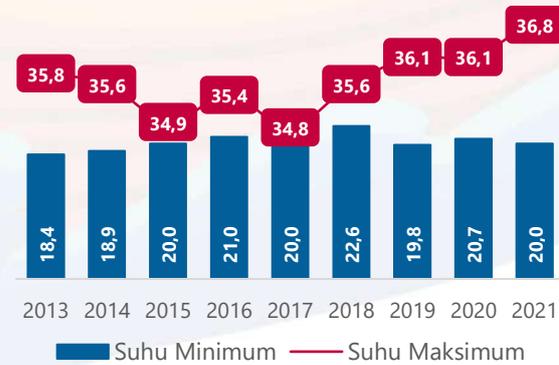


Sumber: Stasiun Meteorologi Tanjungpinang, 2024

Hal tersebut akan berdampak pada semakin tidak nyaman untuk beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Tren peningkatan suhu maksimal pada Kepri, terlihat pada tahun 2021 suhu udara maksimal mencapai 36,8 °C.

4.2.1.2 Ancaman Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil karena Naiknya Permukaan Air Laut

Grafik 4.2 – Suhu Udara Tertinggi dan Terendah di Kepri Tahun 2013 – 2021 (°C)



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Salah satu **bukti** dari terjadinya **perubahan iklim**, yaitu **kenaikan permukaan air laut** yang dapat menyebabkan pulau-pulau kecil ini tergenang hingga tenggelam. Laporan





Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 26 pulau tenggelam di Kepri. Pulau tenggelam tersebut diantaranya Pulau Terumbu Daun, Lereh, Tikus, Inggit, dan Begonjai. Selanjutnya, kegiatan penambangan pasir laut juga mendorong percepatan kenaikan permukaan air laut, hal ini merupakan dampak nyata bahaya dari penambangan pasir laut.

Kepri sendiri merupakan provinsi dengan wilayah kepulauan yang luas, dengan proporsi 96% lautan dan hanya 4% daratan serta banyak pulau-pulau kecil di dalamnya termasuk pulau Bintang yang menjadi lokasi ibu kota Kepri yaitu Kota Tanjungpinang termasuk kategori pulau kecil dan pesisir. Tentunya kondisi perubahan iklim ini akan sangat berdampak kepada masyarakat pesisir di wilayah Kepri (sumber: FGD dengan narasumber ahli kelautan dan perikanan dari UMRAH).

4.2.1.3 Periode Siklus Anomali La Nina & El Nino Semakin Singkat

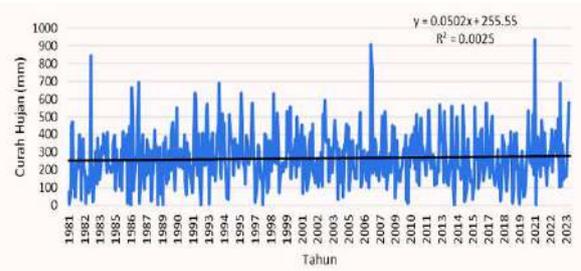
Dengan terjadinya **perubahan iklim yang ekstrem**, kemudian **berdampak pada periode fenomena El Nino dan La Nina yang bergeser semakin cepat, terjadi setiap 2-3 tahun sekali, dari yang awalnya 5-7 tahun sekali**. Fenomena EL Nino dan La Nina sendiri memberikan dampak yang kuat seperti suhu udara yang meningkat, hingga kekeringan di beberapa wilayah.

4.2.1.4 Peningkatan Konsentrasi Gas Rumah Kaca dan Frekuensi Intensitas dan Durasi Cuaca Ekstrem Makin Meningkat

Indonesia mengalami **peningkatan konsentrasi CO²** dari 372 ppm menjadi 413 ppm (BPS). Jika konsentrasi CO² mencapai 450 ppm, dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrem akan semakin melonjak.

Dari sisi **intensitas curah hujan** wilayah Tanjungpinang, terdapat tren kenaikan curah hujan mencapai 0,05 mm per tahun.

Grafik 4.3 – Tren Perubahan Curah Hujan di Tanjungpinang Tahun 1981 - 2023



Sumber: Stasiun Meteorologi Tanjungpinang, 2024

4.2.1.5 Perubahan Tingkat Kenyamanan di Kepri Menggunakan Metode Temperature Humidity Index (THI)

Fenomena iklim mempengaruhi kenyamanan fisiologis di daerah pemukiman. Analisa tingkat kenyamanan di Kepri diukur menggunakan metode **Temperature Humidity Index (THI)** dengan menggunakan data iklim periode 2013 – 2021. Indeks Kenyamanan dihitung dengan menggunakan **rumus Nieuwolt (1977):**

Batas kenyamanan menggunakan selang kenyamanan berdasarkan Nieuwolt

$$THI = 0,8 T + \left(\frac{RH \times T}{500} \right)$$

Keterangan:

THI	: Indeks Kenyamanan
RH	: Kelembapan Relatif
T	: Suhu Udara

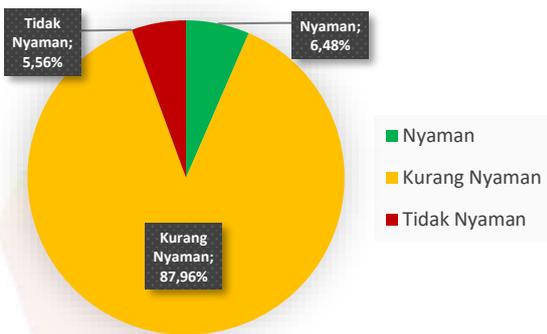
(1977) dan Emmanuel (2005) yang dimodifikasi untuk iklim tropis (Effendy, 2007), pada nilai THI antara 21-24°C terdapat 100% populasi menyatakan nyaman, THI antara 25 - 27°C hanya 50% populasi merasa nyaman (kategori kurang nyaman), serta pada THI > 27°C sebanyak 100% populasi merasa tidak nyaman. Analisis tingkat kenyamanan termal di Kepri menggunakan formula Nieuwolt (1997), dengan menggunakan data suhu udara dan tingkat kelembapan udara dari Stasiun Meteorologi Tanjungpinang dan Batam dalam hal ini terdapat dalam laporan data statistik BPS.





Temperatur di Kepri selama periode 1993 – 2021 tertinggi berada di bulan Juni tahun 2021 sebesar 36,8 °C dan terendah di bulan Oktober tahun 2013 18,4°C, dengan kelembaban 25% sampai dengan 100%. Curah hujan bulanan tertinggi di bulan Januari tahun 2021 sebesar 926 mm dan terendah di bulan Februari tahun 2021 sebesar 4,68mm.

Grafik 4.4 - Persentase Tingkat Kenyamanan berdasarkan *Temperature Humidity Index* Kepri



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis tingkat kenyamanan sepanjang tahun 1993 – 2021, **Kepri memiliki *Temperature Humidity Index* dengan kategori nyaman (suhu 21-24°C) cukup sedikit sebesar 5,56%** atau diakumulasi hanya berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, berbeda dengan **kategori kurang nyaman (suhu 25-27°C) yang menjadi mayoritas tingkat kenyamanan masyarakat sebesar 87,96%** atau diakumulasi berlangsung selama 7 tahun 11 bulan dan terakhir **kategori tidak nyaman (suhu diatas 27°C) sebesar 5,56%** atau diakumulasi berlangsung selama 6 bulan.

4.2.2 Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perekonomian

4.2.2.1 Ketahanan Pangan dan Pertanian

Di Kepri, perubahan suhu dan pola curah hujan ekstrem sangat mempengaruhi produktivitas tanaman pangan. Panas yang ekstrem dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan gagal panen akibat

pertanian, perkebunan dan persawahan yang tergenang oleh air.

Terlebih lagi, Kepri memiliki **curah hujan yang cukup tinggi, dengan kenaikan curah hujan mencapai mencapai 0,05 mm per tahun**. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan senantiasa berkoordinasi dengan BMKG lingkup wilayah Kepri untuk menentukan waktu tanam tanaman pangan, untuk menghindari potensi gagal panen akibat cuaca ekstrem.

4.2.2.2 Kelautan dan Perikanan

Peningkatan suhu air laut, keasaman laut, dan perubahan pola arus laut dapat mengganggu ekosistem laut dan mengurangi hasil tangkapan perikanan. Hal ini dapat berdampak pada pendapatan nelayan dan industri perikanan regional (FGD dengan Dinas Kelautan Perikanan Kepri, 2024).

Penelitian yang dilakukan Anggara dan kawan-kawan di perairan Pulau Bintan menemukan **kenaikan suhu air laut telah menyebabkan terjadinya coral bleaching (pemutihan karang)** di perairan Banyan Tree, Pulau Bintan. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati, hal ini berdampak pada penurunan sumber pangan manusia yang berasal dari hasil laut.

4.2.2.3 Infrastruktur Konektivitas dan Transportasi

Faktor perubahan iklim sangat mempengaruhi infrastruktur transportasi dan mobilitas masyarakat di daerah Kepri yang mengandalkan transportasi laut untuk mobilitas antar kabupaten/kotanya. Kondisi cuaca ekstrem seperti curah hujan yang tinggi, angin utara, dan naiknya permukaan air laut akan menyebabkan tidak dapat digunakannya transportasi laut, yang berdampak pada mobilitas barang, dan pangan. Terhambatnya mobilitas barang dan pangan antar kabupaten/kota akan mempengaruhi





perekonomian, yaitu dengan naiknya harga barang dan pangan di Kepri.

4.2.2.4 Kesehatan

Perubahan iklim meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah, penyakit pernapasan (ISPA), Diare dan Hepatitis di Kepri (FGD dengan Dinkes Kepri, 2024). Biaya kesehatan yang meningkat dan absensi kerja akibat penyakit dapat menurunkan produktivitas ekonomi regional. Curah hujan yang tinggi atau cuaca yang sangat panas dapat menjadi tempat ideal tumbuhnya penyakit. Dampak La Nina terhadap kesehatan akan meningkat, yang diperkirakan akan terjadi di triwulan III (Juli – September) 2024 di Kepri. Khusus daerah yang sering mengalami banjir, penyakit diare, demam tipus, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A adalah beberapa penyakit menular yang terbawa air yang harus diwaspadai.

Fenomena La Nina juga dapat menyebabkan epidemi diare, yang disebabkan oleh banyak hal, termasuk virus, bakteri, dan protozoa. Fenomena La Nina mendorong curah hujan yang tinggi memungkinkan manusia terpapar patogen, terutama yang menyebar melalui air. Cuaca yang tidak menentu juga akan meningkatkan potensi kecelakaan di jalan raya. Curah hujan yang sangat tinggi dapat mengganggu jarak pandang, membuat jalan lebih licin, dan mengurangi konsentrasi pengendara atau pengguna jalan.

4.2.2.5 Industri Pariwisata

Kenaikan suhu udara dan cuaca ekstrem dapat mengganggu aktivitas pariwisata seperti *snorkeling*, menyelam, dan kegiatan air lainnya (FGD dengan Dinas Pariwisata Kepri, 2024). Jika terjadi kerusakan ekosistem laut dan pantai yang signifikan, ini dapat mengurangi daya tarik wisata dan mengakibatkan penurunan pendapatan dari sektor pariwisata.

4.2.2.6 Kerusakan Lingkungan

Dampak langsung perubahan iklim adalah **kenaikan permukaan air laut**, Kepri yang terdiri dari gugusan pulau-pulau mengalami ancaman tenggelam dimasa mendatang. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 26 pulau tenggelam di Kepri. Pulau tenggelam tersebut diantaranya Pulau Terumbu Daun, Lereh, Tikus, Inggit, dan Begonjai. Perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi dan keparahan bencana alam seperti badai tropis, banjir rob, kebakaran dan gelombang pasang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa dan memperburuk kerusakan lingkungan lainnya (BPBD Kepri, 2024).

4.3 Analisis Policy Responses Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

Kebijakan pemerintah daerah dalam memitigasi dampak perubahan iklim di Provinsi Kepri, meliputi berbagai sektor yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi emisi GRK Pendekatan analisis tematik dilakukan dengan dua metode, yaitu intervensi pemerintah melalui kebijakan belanja dan non belanja.

4.3.1 Intervensi Pemerintah Melalui Kebijakan Belanja

Alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk memitigasi perubahan iklim merupakan langkah krusial dalam upaya pemerintah untuk mengurangi emisi GRK dan menanggulangi dampak perubahan iklim secara lebih luas. Pemerintah pusat melalui K/L mengalokasikan anggaran untuk mengintervensi perubahan iklim yang terjadi di Kepri melalui dua jenis alokasi, yaitu alokasi anggaran mitigasi dan alokasi anggaran adaptasi perubahan iklim.





4.3.1.1 Alokasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim

Alokasi anggaran mitigasi perubahan iklim terkait Belanja Infrastruktur Konektivitas pada tahun ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terlihat pada Satuan Kerja Distrik Navigasi (Disnav), Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dan Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PPLP) mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Grafik 4.5 – Alokasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim: Program Konektivitas Infrastruktur Tahun 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)



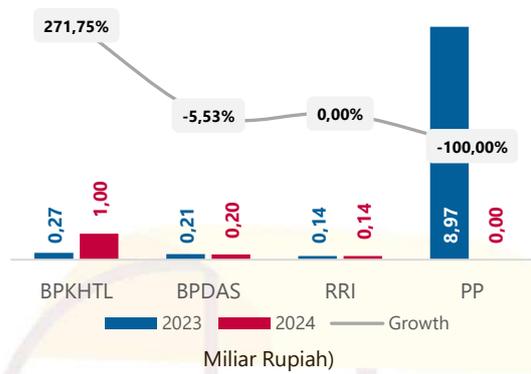
Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Hal ini menunjukkan **komitmen pemerintah pusat dalam upaya memitigasi dampak perubahan iklim di kepri**. Distrik Navigasi secara khusus melaksanakan program peningkatan sarana bantu navigasi pelayaran alokasi terkait peremajaan kapal laut untuk memitigasi perubahan iklim. Berbeda dengan UPP yang melaksanakan **program infrastruktur konektivitas, mengenai keselamatan dan keamanan transportasi laut**, meliputi alokasi pemeliharaan fasilitas pelabuhan.

Alokasi anggaran **mitigasi terhadap perubahan iklim** juga dianggarkan oleh pemerintah pusat terhadap satuan kerja di Kepri meliputi Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), Radio Republik Indonesia.

BPDAS secara khusus **melaksanakan berbagai program meliputi penyediaan dan peremajaan bangunan** pengendali kerusakan perairan darat, pengembangan perbenihan tanaman hutan dan konservasi kawasan/rehabilitasi ekosistem daerah aliran sungai. RRI secara konsisten menayangkan program penyiaran publik mengenai siaran tanggap bencana prioritas nasional.

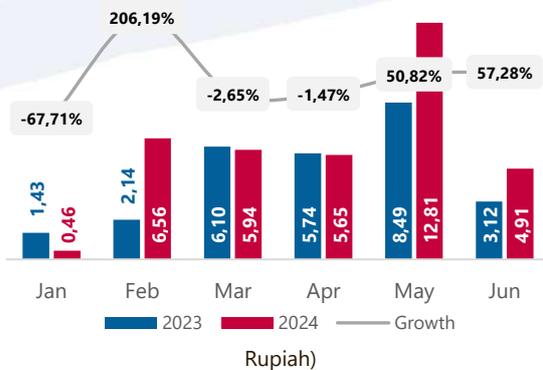
Grafik 4.6 – Alokasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim: Pencegahan Perubahan Iklim Tahun 2023-2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Terlihat **peningkatan alokasi anggaran** pada tahun ini yang terjadi secara signifikan pada satker BPKHTL dengan kenaikan 271% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam memitigasi terkait dampak perubahan iklim di Kepri.

Grafik 4.7 – Realisasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim sampai dengan Juni Tahun 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)



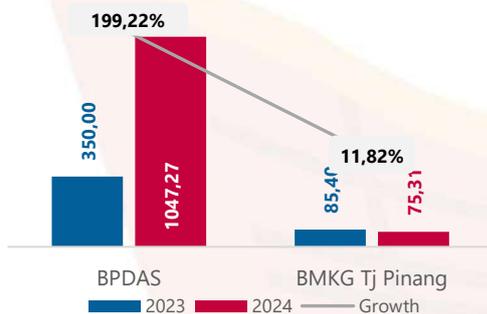


Dilihat dari alokasi anggaran mitigasi perubahan iklim secara agregat di Kepri mengalami peningkatan sebesar 157,82 persen (yoy). Realisasi sampai dengan juni 2024 tumbuh 34,42 persen apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

4.3.1.2 Alokasi Anggaran Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Alokasi anggaran adaptasi perubahan iklim pada tahun ini meningkat **secara agregat** apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terlihat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar 199 persen (yoy). Disisi lain, BMKG Tanjung Pinang mengalami sedikit penurunan alokasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 4.8 – Alokasi Anggaran Adaptasi Perubahan Iklim di Kepri 2023 – 2024

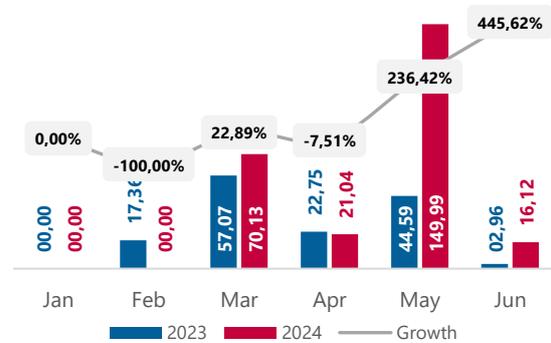


Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

BPDAS secara khusus melaksanakan berbagai program meliputi **penyediaan dan peremajaan bangunan pengendali kerusakan perairan darat**, pengembangan perbenihan tanaman hutan dan konservasi kawasan/rehabilitasi ekosistem daerah aliran sungai. BMKG Tanjungpinang melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan informasi iklim terapan untuk menjalankan fungsi pembinaan masyarakat terhadap perkembangan perubahan cuaca dan iklim yang berpotensi bahaya ataupun merusak lingkungan.

Terlihat peningkatan realisasi anggaran adaptasi perubahan iklim sampai dengan Juni 2024 tumbuh 77,80% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Grafik 4.9 – Realisasi Adaptasi Perubahan Iklim sampai dengan Juni Tahun 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

4.3.2 Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan non Belanja

Pemerintah perlu **menetapkan prioritas dalam alokasi anggaran untuk memitigasi perubahan iklim**. Hal ini dapat mencakup investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan proyek infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Atas dasar tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi perubahan iklim melalui berbagai sektor utama, sebagai berikut:

4.3.2.1 Sektor Lingkungan Hidup dan Pariwisata

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan untuk memitigasi perubahan iklim sebagai berikut:

- a. **Gerakan Sedekah Sampah lingkup Pemerintah Provinsi Kepri**, hasil penjualan sedekah sampah anorganik kepada Bank Sampah Smart Kepri digunakan untuk melengkapi sarana prasarana Bank Sampah Pemprov Kepri (Surat Edaran 660.1/307.1/DLHK-SET/2022).
- b. **Pengelolaan Pesisir dan Laut**, kebijakan untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya





laut, termasuk rehabilitasi terumbu karang dan pengelolaan zona lindung.

- c. **Promosi Ekowisata**, mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

4.3.2.2 Transportasi

Peraturan Daerah Provinsi Kepri no 1 Tahun 2017 Bidang transportasi:

- a. Tidak menerbitkan izin atau **mencabut izin Kawasan simpul transportasi laut** internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu.
- b. **Investasi infrastruktur** transportasi berkelanjutan, seperti pelabuhan yang tahan bencana dan terminal transportasi umum, pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik (pesawat dan kapal) menjangkau seluruh wilayah kepulauan.
- c. **Transportasi Berkelanjutan**, inisiatif untuk meningkatkan transportasi umum, infrastruktur untuk sepeda, dan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi transportasi.

4.3.2.3 Energi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri melaksanakan kebijakan sesuai **rencana strategis DLHK tahun 2021 – 2026**:

- a. Program **Energi Terbarukan**, pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan seperti solar panel, angin, dan *hidroelektrics* dengan memberikan insentif fiskal, subsidi, atau kebijakan pembelian listrik yang menguntungkan.
- b. **Efisiensi Energi**, program untuk meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, komersial, dan perumahan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

4.3.2.4 Industri

Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

- a. **Standar Emisi**, penerapan standar emisi yang ketat dan regulasi lingkungan untuk

industri yang menghasilkan banyak emisi, seperti sektor manufaktur dan produksi.

- b. **Penggunaan Teknologi Bersih**, mendorong penggunaan teknologi bersih dan inovasi dalam proses industri untuk mengurangi jejak karbon.
- c. Setiap orang/badan usaha yang melanggar **ketentuan pembuangan limbah** dalam Peraturan Daerah 4/2014 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. Lebih lanjut dapat dikenakan sanksi pembekuan usaha.

4.3.2.4 Pertanian dan Kehutanan

Berdasarkan **rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri tahun 2021 – 2026** dijelaskan beberapa program di sektor pertanian dan kehutanan sebagai berikut:

- a. **Pemetaan kluster daerah pertanian** secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi untuk mengatasi kerawanan pangan akibat perubahan iklim (Keputusan Walikota Tj Pinang nomor 326 Tahun 2023).
- b. Pengelolaan Lahan, **program untuk mengurangi deforestasi** dan meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
- c. **Praktik Pertanian Berkelanjutan**, inisiatif untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi emisi GRK dari sektor pertanian.
- d. **Pemulihan kawasan hutan** yang telah tercemar dan peningkatan patroli serta pengawasan izin pelaku usaha atau kegiatan pengelolaan limbah.

4.3.2.5 Bangunan dan Konstruksi

- a. Dinas PUPR menginisiasi **Bangunan Ramah Lingkungan**, kebijakan untuk mempromosikan bangunan hijau dan standar efisiensi energi yang tinggi.
- b. Dinas PUPR juga mendorong pembangunan **Infrastruktur Tahan Bencana**, investasi dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana seperti tanggul laut dan sistem drainase yang lebih baik





untuk mengurangi risiko akibat kenaikan permukaan air laut.

4.3.2.6 Edukasi Kesadaran Masyarakat

- a. **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri melaksanakan Kampanye dan Edukasi melalui RRI dan media** dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim, dampaknya, dan tindakan yang dapat diambil individu untuk berkontribusi pada mitigasi.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan mengukung **Program Kampung Iklim**, sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat melalui pengembangan kapasitas kelompok kerja dan SDM Program Kampung Iklim Berseri.

4.3.2.7 Kebijakan Pengurangan Emisi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri melaksanakan aturan **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023**, sebagai berikut:

- a. **Implementasi kebijakan pengaturan karbon**, sistem perdagangan emisi, atau pajak karbon untuk mengurangi emisi di seluruh sektor ekonomi.
- b. Pengaturan dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan, **implementasi regulasi dan kebijakan untuk mengurangi emisi industri**, kontrol pencemaran udara dan air, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

4.4 Evaluasi Atas Policy Response Pemerintah Dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

Alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk memitigasi perubahan iklim merupakan langkah krusial dalam upaya pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menanggulangi dampak perubahan iklim secara lebih luas. Pemerintah pusat melalui K/L mengalokasikan anggaran untuk mengintervensi perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Kepri melalui dua jenis alokasi, yaitu alokasi anggaran

mitigasi dan alokasi anggaran adaptasi perubahan iklim.

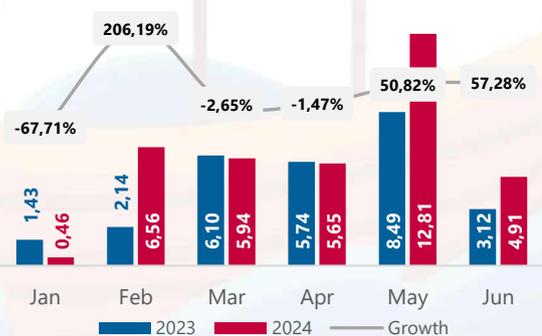
4.4.1 Dampak Alokasi Belanja K/L Dalam Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

4.4.1.1 Komitmen Pemerintah Memitigasi Perubahan Iklim

Komitmen pemerintah pusat dalam upaya **memitigasi dampak perubahan iklim di kepri terlihat dari upaya peningkatan anggaran** pada satker Navigasi (Disnav), Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dan Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PPLP).

Belanja Pempus melalui satker Disnav melaksanakan program peningkatan sarana navigasi terkait peremajaan kapal laut dan UPP melaksanakan program keselamatan dan keamanan transportasi laut telah dialokasikan sesuai kebutuhan, namun satker terkait perlu melakukan percepatan dalam realisasi anggaran.

Grafik 4.10 – Realisasi Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim sampai dengan Juni Tahun 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Program Mitigasi Perubahan Iklim

- a. **Upaya pemerintah pusat dalam memitigasi dampak perubahan iklim** dilakukan dengan penambahan anggaran secara signifikan pada satker Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL).
- b. **Belanja satker BPKHTL** melalui program penanganan kawasan hutan sebagai kawasan konservasi dan inventarisasi sumber daya hutan dan pencegahan dampak lingkungan sudah tepat sasaran, namun realisasi anggaran satker perlu



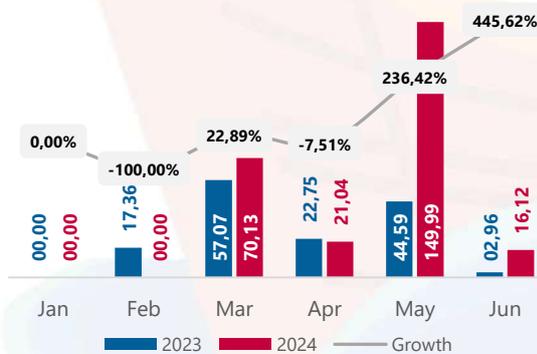


diakselerasi agar capaian output dapat terselesaikan tepat waktu.

4.4.1.2 Komitmen Pemerintah dalam Program Adaptasi Perubahan Iklim

- a. **Realisasi pada satker BPDAS** optimal setiap bulannya, dengan pertumbuhan realisasi 177,89 persen (yoy).
- b. **Alokasi anggaran adaptasi perubahan iklim** pada tahun ini meningkat pada satker Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang mengalami peningkatan alokasi anggaran sebesar 199 persen (yoy).
- c. **BPDAS** secara khusus melaksanakan berbagai program meliputi penyediaan dan peremajaan bangunan pengendali kerusakan perairan darat, pengembangan perbenihan tanaman hutan dan konservasi kawasan/rehabilitasi ekosistem daerah aliran sungai. Hal tersebut telah tepat sasaran dan terealisasi sesuai dengan program penanganan iklim di wilayah Kepri.

Grafik 4.11 – Realisasi Adaptasi Perubahan Iklim sampai dengan Juni Tahun 2023 dan 2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

4.4.2 Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Pemerintah daerah telah **menetapkan prioritas dalam alokasi anggaran untuk memitigasi dan menanggulangi perubahan iklim**. Hal ini dapat mencakup investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan proyek infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dampak yang telah dihasilkan dari

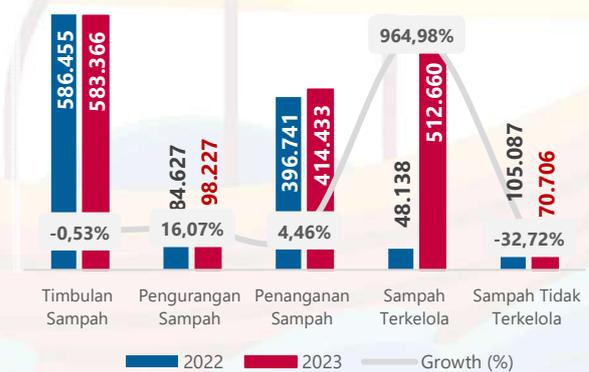
policy response yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memitigasi dan menanggulangi perubahan iklim.

4.4.2.1 Sektor Lingkungan Hidup dan Pariwisata

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah melaksanakan kebijakan, diantaranya yaitu, **gerakan sedekah sampah untuk mengurangi sampah anorganik** yang tidak dapat terurai, **pengelolaan pesisir dan laut** untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan **konservasi sumber daya laut, promosi ekowisata**, mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Dampak Policy Response:

Grafik 4.12 - Penanganan Sampah di Kepulauan Riau Tahun 2022-2023 (Ton/Tahun)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri, 2024 (diolah)

- a. **Timbunan sampah berkurang sebanyak 3.089 ton/tahun**, dari sebelumnya sebanyak 586,46 ribu ton pada tahun 2022, menjadi 583,37 ribu ton pada tahun 2023.
- b. **Pengurangan sampah meningkat 13.600 ton/tahun**, dari sebelumnya 84,63 ribu ton, menjadi 98,23 ribu ton/ pada tahun 2023.
- c. **Penanganan sampah meningkat sebanyak 17.692 ton/tahun**, dari sebelumnya 396,74 ribu ton, menjadi 414,43 ribu ton pada tahun 2023.
- d. **Sampah yang terkelola meningkat 464.522 ton/tahun**, dari sebelumnya 48,14





ribu ton, menjadi 512,66 ribu ton pada tahun 2023.

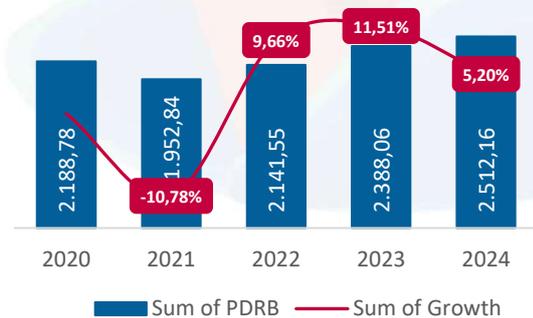
- e. **Sampah yang tidak terkelola berkurang** 34.381 ton/tahun, dari sebelumnya 105,09 ribu ton, menjadi 70,71 ribu ton pada tahun 2023.

Kebijakan yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri telah berhasil dengan **efektif mengurangi perubahan iklim dilihat dari penurunan jumlah sampah** di Kepri dan peningkatan pengelolaan sampah daur ulang.

4.4.2.2 Pertanian dan Kehutanan

Berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 – 2026, telah dilaksanakan beberapa kebijakan, yaitu **pemetaan kluster daerah pertanian** secara terpadu untuk mengatasi kerawanan pangan akibat perubahan iklim, **program untuk mengurangi deforestasi** dan meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, **praktik pertanian berkelanjutan** untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi emisi GRK dari sektor pertanian, **pemulihan kawasan hutan** yang telah tercemar dan peningkatan patroli serta pengawasan izin pelaku usaha atau kegiatan pengelolaan limbah.

Grafik 4.13 - Nilai PDRB ADHK Berdasarkan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Periode Q1 tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Dampak Policy Response:

- a. **PDRB lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan** terus mengalami peningkatan **dari tahun ke tahun, dengan peningkatan sebesar 11,51% pada tahun 2023, dan 5,20% pada tahun 2024.**
- b. Intensitas hujan berpengaruh **terhadap musim panen**, dan kenaikan suhu permukaan laut, arus gelombang dan angin sangat **mempengaruhi intensitas nelayan melaut dan migrasi ikan di lautan sehingga mempengaruhi hasil tangkapan ikan dan produksi hasil laut.**

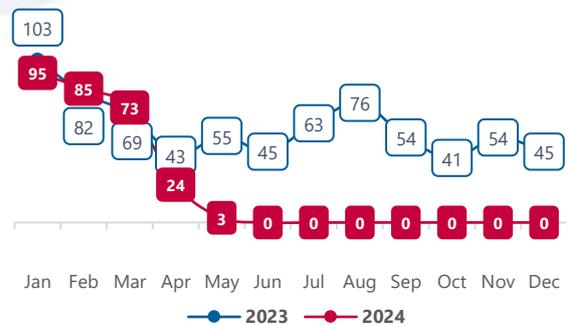
Kebijakan yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan **efektif meningkatkan peningkatan produk domestik regional bruto** lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

4.4.2.3 Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Kepri telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka **memitigasi dan menanggulangi dampak perubahan iklim di masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan kesehatan** kepada masyarakat untuk menjaga sanitasi agar selalu bersih, mencuci tangan dengan air mengalir, dan mengelola sampah dengan baik.

Dampak Policy Response:

Grafik 4.14 – Jumlah Kasus Positif Dengue di Kepri Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kepri, 2024 (diolah)





- a. Jumlah angka positif DBD menurun pada tahun 2024 di setiap bulannya, menurun dari 352 kasus menjadi 280 kasus, sepanjang Januari s.d. Mei 2024.
- b. Intensitas hujan yang ekstrem yang dapat menyebabkan genangan air sebagai tempat berkembang biak nyamuk, sehingga penting untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjadi lingkungan yang bersih, terutama sanitasi.

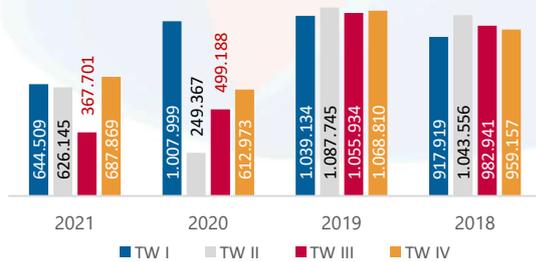
Kebijakan penyuluhan dan pelatihan kesehatan yang diterbitkan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri efektif menurunkan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

4.4.2.4 Transportasi

Peraturan Daerah Provinsi Kepri no 1 Tahun 2017 Bidang transportasi: Tidak menerbitkan izin atau mencabut izin kawasan simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu. Investasi infrastruktur transportasi berkelanjutan, seperti pelabuhan yang tahan bencana, pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik (kapal) menjangkau seluruh wilayah kepulauan.

Dampak Policy Response:

Grafik 4.15 – Jumlah Penumpang Transportasi Laut Tahun 2018 – 2021 di Kepri



Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

- a. Jumlah penumpang transportasi laut mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun 2018 s.d. 2019 sebesar 8,92% (yoy), namun demikian pada tahun 2020 dan 2021

- pada masa pandemi Covid-19 menurunkan jumlah penumpang moda transportasi laut.
- b. Pengembangan investasi bidang infrastruktur (transportasi) sejatinya akan berdampak positif terhadap jumlah penumpang dan pergerakan barang logistik dari dalam dan keluar daerah.

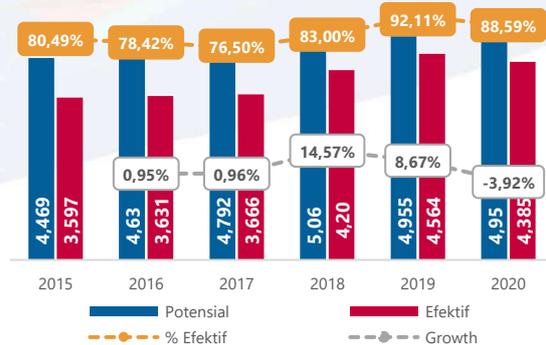
Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepri telah efektif memitigasi dampak perubahan iklim melalui penyediaan transportasi laut yang menjangkau lebih banyak daerah di Kepri. Disisi lain, Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Kepri mengenai peningkatan penggunaan kendaraan minim carbon dan kendaraan listrik masih stagnan serta sulit direalisasikan oleh daerah yang minim listrik.

4.4.2.5 Pengelolaan Sumber Daya dan Energi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri melaksanakan kebijakan sesuai rencana strategis DLHK tahun 2021 – 2026, yaitu program pengelolaan sumber daya dan energi terbarukan, pemerintah mendorong penggunaan energi green dan efisiensi energi di sektor industri.

Dampak Policy Response:

Grafik 4.16 – Jumlah Produksi Air Bersih di Kepri



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri, 2024 (diolah)





- a. **Kapasitas air bersih semakin baik** dari tahun 2015 s.d. 2020 di Kepri, dari sejumlah 3.597 liter perdetik pada tahun 2015, menjadi 4.385 liter/detik pada tahun 2020.
- b. Kebutuhan akan air bersih sangatlah penting, pemerintah daerah terus berupaya untuk **meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat Kepri**.

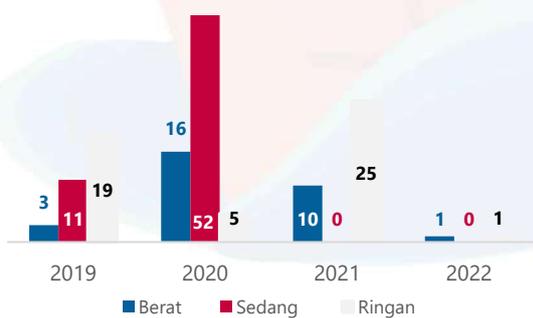
Kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri telah **efektif menanggulangi dampak perubahan iklim** melalui pengelolaan sumber daya air bersih bagi masyarakat di kawasan pesisir seperti Kepri.

4.4.2.6 Bangunan dan Konstruksi

- a. Dinas PUPR menginisiasi **Bangunan Ramah Lingkungan**, kebijakan untuk mempromosikan bangunan hijau dan standar efisiensi energi yang tinggi.
- b. Dinas PUPR juga mendorong pembangunan **Infrastruktur Tahan Bencana**, investasi dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana seperti tanggul laut dan sistem drainase yang lebih baik untuk mengurangi risiko akibat kenaikan permukaan air laut.

Dampak Policy Response:

Grafik 4.17 – Jumlah Kerusakan Properti Akibat Bencana Alam di Kepri



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepri, 2024 (diolah)

- a. **Jumlah kerusakan property/rumah atau bangunan akibat banjir semakin menurun** signifikan setiap tahunnya, dari sebelumnya sebanyak 33 bangunan pada tahun 2019, menjadi hanya 2 bangunan pada tahun 2022.

- b. Dengan semakin baiknya pembangunan **infrastruktur yang tahan akan bencana akan mengurangi dampak bencana alam** pada sektor bangunan/perumahan dan konstruksi.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas PUPR Kepri telah **efektif mengurangi dampak perubahan iklim** melalui penyuluhan dan pembangunan infrastruktur yang tahan

4.4.2.7 Edukasi Kesadaran Masyarakat

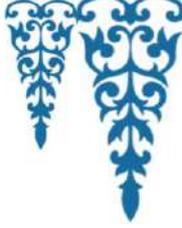
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri melaksanakan **Kampanye dan Edukasi melalui RRI dan media** dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim, dampaknya, dan tindakan yang dapat diambil individu untuk berkontribusi pada mitigasi.

Dampak Policy Response:

- a. **Timbunan sampah berkurang sebanyak** 3.089 ton/tahun, dari sebelumnya sebanyak 586,46 ribu ton pada tahun 2022, menjadi 583,37 ribu ton pada tahun 2023.
- b. **Sampah** yang terkelola meningkat 464.522 ton/tahun, dari sebelumnya 48,14 ribu ton, menjadi 512,66 ribu ton pada tahun 2023.
- c. Edukasi masyarakat akan pentingnya menjadi lingkungan yang bersih, terutama sanitasi **menurunkan jumlah angka positif DBD** pada tahun 2024 di setiap bulannya, menurun dari 352 kasus menjadi 280 kasus, sepanjang Januari s.d. Mei 2024.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepri telah **efektif mengadaptasi dampak perubahan iklim** melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.





Kota adalah ekosistem terpenting untuk mengurangi isu *climate change*. Kurang lebih 70% emisi gas rumah kaca dihasilkan dari aktivitas perkotaan. Prediksi **The World Bank**, sampai tahun 2050 bila tidak dilakukan mitigasi maka efek emisi akan berlipat ganda. Namun demikian, hal ini masih dapat diantisipasi dengan aksi cepat dan agresif dari seluruh masyarakat di dunia yang diyakini dapat mengurangi dampak negatif *climate change* mendekati *Null*.

Terdapat **tiga tantangan besar** untuk menciptakan kota yang mampu beradaptasi terhadap *climate change*:

1. **Investasi pada infrastruktur yang adaptif** terhadap *climate change* dengan kondisi anggaran yang terbatas
2. **Perubahan mindset dari masyarakat** dan perusahaan agar mau Bersama-sama mengimplementasikan rencana dan kebijakan *climate change*
3. **Perbedaan pandangan dan norma** yang rendah dari pemegang kekuasaan menghalangi pemerintah untuk merencanakan aksi adaptasi terhadap *climate change*.

The World Bank memilih dua kota di **Jepang** yaitu **Kyoto dan Tokyo** yang telah melaksanakan aksi cepat untuk beradaptasi dan memitigasi akibat dari *climate change* dalam hal perubahan tata kota, lingkungan hidup dan konstruksi bangunan.

Untuk pemerintah, keberhasilan aksi dipengaruhi **empat perencanaan** yaitu:

1. Rencana aksi *climate change* haruslah *evidence-based*, inklusif dan multisectoral. Hal ini tidaklah mudah karena harus memperhatikan strategi yang tepat, pendekatan kewilayahan dan ketersediaan anggaran. Selain kebijakan, bantuan program dan aplikasi tata kota seperti *Urban Performance*, *Suitability*, dan *APEX* dapat menolong pemerintah kota untuk menyusun prioritas pengembangan kota dan investasi potensi kota. Data dibutuhkan untuk dasar pengambilan keputusan dan yang paling utama adalah memahami perspektif dari seluruh pemangku kepentingan.
2. Semua dikembalikan ke alam. *Nature-based Solutions* (NbS) seperti *green roofs* dan *rain garden* adalah contoh penerapan aksi adaptasi yang sangat efektif untuk mengurangi efek panas perkotaan dan juga banjir bandang. Perencanaan NbS harus mengikuti kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) dengan mendengarkan kebutuhan dan keinginan dari komunitas dan lingkungan sekitar.
3. *Low-Carbon* membutuhkan kesediaan dan kemauan secara aktif dari seluruh penduduk kota. Oleh karena itu disusun organisasi komunitas baru dengan melakukan ekperimental sosial yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Bangunan lama tetap diperhitungkan dengan cara kegiatan pemeliharaan dan operasional sehari-hari yang mendukung program *low carbon* seperti pemasangan Air Conditioner yang low NCC, hemat air dan hemat listrik dengan kegiatan mematikan lampu di siang hari. Sedangkan untuk bangunan baru harus mengikuti prosedur pembangunan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkait *green* dan *resilient housing*.

Lesson Learned for Climate change Action: Futako-Tamagawa

Futako-Tamagawa adalah area pemukiman dengan jarak sekitar 10 menit menuju kota Tokyo, sangat dekat. Kota ini mengembangkan empat aksi yaitu: (1) *Transit-Oriented Development*; (2) *Urban Greening*; (3) *Waterfront Space*; (4) *Urban Flood Control*.

Rooftop Greening in Futako-Tamagawa City:



Contoh **Urban Greening** **Kyoto City Downtown** adalah yang membangun ekosistem *Nature-based solutions* seperti **rain garden**

dan **rooftop greening**. Spot yang dapat diambil pelajaran adalah Kyoto Gyoen Park dan Shijo Horikawa Intersection.

Salah satu rumah yang menerapkan NbS adalah *Sugimoto Residence* yaitu *town house* yang menerapkan *Kyoto-style Wooden* dengan menerapkan penerangan alami, menggunakan air hujan dan angin alami dengan banyak bukaan untuk memberikan kesegaran pada rumah. Selain itu, Stasiun Kyoto JR juga menggunakan *green initiatives* pada seluruh bagian stasiun selain juga menerapkan model *Transit-Oriented Development*.

Waterfront Space in Arashiyama



Kota ini **menerapkan dinding kedap air** yang dapat ditutup dan buka (*retractable watertight wall*) sepanjang sungai Katsura. Selain itu penerapan "*bamboo grove path*" atau penanaman pohon bambu di sepanjang jalan karena bambu adalah salah satu jenis pohon yang kaya dengan penyerapan karbon dioksida sekaligus sebagai usaha preserconsi lahan.

Di sekitar sungai Katsura juga dilakukan aksi seperti pembangunan dam atau waduk (*upstream dams*), *early warning system* untuk koordinasi banjir kota, kolaborasi dengan seluruh pemerintahan seperti Kabupaten Kyoto dan kota Kyoto dan mengusahakan pendanaan melalui investasi dari luar.

Kesimpulan:

1. Tata kota yang baik harus terus direncanakan tidak saja untuk adaptasi terhadap akibat negatif dari *climate change* yang sedang kita rasakan saat ini tapi juga aksi mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut.
2. Belajar dari dua kota di Jepang yaitu Kyoto dan Tokyo yang telah merencanakan dan mengembangkan konsep *green city*, kota lain juga dapat mengikuti metode tersebut dengan tetap mempertahankan kearifan masyarakat (*local wisdom*).
3. Metode yang diterapkan kota Kyoto dan Jepang telah terbukti berhasil dalam beradaptasi dan memitigasi resiko dan dampak dari perubahan iklim.



Sumber: Dinpar Provinsi Kepri

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pulau Senua, Kabupaten Natuna

Pulau Senua, pulau mungil nan elok yang berada di Laut Cina Selatan ini secara administratif berada di Desa Sepempang, Kabupaten Natuna. Pulau Senua dipilih sebagai geosite atau warisan geologi yang bernilai tinggi karena keanekaragaman hayati dan keragaman budaya menyatu di dalamnya. Geosite dikembangkan dengan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal.





Conclusions and Recommendations

- Kesimpulan Kajian Fiskal Regional
- Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat
- Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
- Rekomendasi bagi Stakeholders Lainnya



V. I Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau periode triwulan II 2024 sebagai berikut:

Analisis Ekonomi Regional

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau secara kumulatif (*ctc*) tumbuh positif dan menjadi provinsi dengan **pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera**. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan ekonomi** Kepri triwulan II 2024 tumbuh positif sebesar 4,90 persen (*yoy*) dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 di regional Sumatera, setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi ini dorong oleh fenomena HKBN Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha pada triwulan II, dan momentum libur anak sekolah diakhir bulan Juni 2024. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** triwulan II 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menyentuh angka Rp86,76 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp51,56 triliun. Dari sisi PDRB berdasarkan Pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri didominasi oleh komponen **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi** dengan *share* sebesar 44,33 persen dari total PDRB dan tumbuh 8,56 persen (*yoy*). Dari sisi Lapangan Usaha, struktur PDRB Kepri masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yakni **sektor industri pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar (40,97 persen), sektor konstruksi sebesar (19,64 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar (9,46 persen).
2. Tingkat **inflasi** Kepri pada Bulan Juni 2024 mencapai 3,54 persen (*yoy*). Angka inflasi ini diperoleh berdasarkan perhitungan tekanan inflasi pada 2 (dua) kota dan 1 (satu) kabupaten (kota Batam, kota Tanjungpinang dan kabupaten Karimun). Tingkat inflasi terbesar di bulan Juni 2024 masih didominasi oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memiliki andil inflasi sebesar 1,87 persen (*yoy*). **Meningkatnya harga pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama pada komoditas Beras dan Cabai Merah** masih dipengaruhi oleh ketidakstabilan iklim di daerah produsen beras yang menyebabkan gagal panen, sedangkan Provinsi Kepri masih mengimpor beras dari daerah produsen beras dari dalam negeri (pulau Jawa) dan luar negeri (Thailand).
3. **Neraca perdagangan luar negeri** Kepri pada bulan Juni 2024 menghasilkan Surplus Perdagangan sebesar US\$171,76 juta. Jika dihitung secara kumulatif, neraca perdagangan Kepri pada periode triwulan II 2024 juga mencapai Surplus Perdagangan sebesar US\$1.309,65 Juta. Angka tersebut diperoleh dari total nilai Ekspor Kepri di bulan Mei dan Juni yang tinggi, khususnya dari golongan barang Komoditas Gas Alam, Hasil Tambang dan Hasil Industri (Non Migas).
4. Tingkat **kemiskinan** di Kepri pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 138,30 ribu jiwa atau 5,37 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,32 persen bila dibandingkan dengan bulan Maret 2023 sebesar 142,50 ribu orang. **Garis kemiskinan di Kepri per Maret 2024 adalah sebesar Rp787.211,-** atau naik 6,02 persen. Sampai dengan periode Maret 2024, **angka kemiskinan di Perkotaan** sebesar 4,85 persen dan **di Perdesaan** sebesar 9,94 persen.
5. Tingkat **ketimpangan** kesejahteraan Kepri diukur dengan indikator **Gini Ratio**, per Maret 2024 tercatat sebesar 0,349 meningkat 0,009 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 0,340, angka tersebut masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang berada di angka 0,379. **Angka Gini Ratio Kepri per Maret 2024 berada pada peringkat pertama tertinggi di regional Sumatera**. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan





sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepulauan Riau tidak dirasakan secara merata. Hal ini disebabkan majunya kota Batam sebagai pusat bisnis kurang mampu memberikan efek domino peningkatan aktivitas ekonomi pada kabupaten lainnya.

6. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Kepri bulan Februari 2024 tercatat 6,94 persen; dengan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** mencapai 67,14 persen. Angka TPT tersebut turun sebesar 0,67 persen poin dibanding dengan Februari 2023 (*yoy*). Kepri berada pada peringkat pertama tertinggi di Regional Sumatera dan tertinggi ke-dua tertinggi Nasional, setelah Banten dengan angka TPT sebesar 7,02. Di sisi lain, **persentase penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri juga menjadi yang terbesar di Sumatera**. Adanya penurunan TPT tersebut menjadi sinyal positif bahwa masyarakat di Kepri telah memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.
7. **NTP** Kepri pada bulan Juni 2024 sebesar 105,55 dan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,50 persen (*mtm*). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (118,77), hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian.
8. **NTN** Kepri pada Juni 2024 sebesar 104,05 mengalami penurunan sebesar 0,73 persen (*mtm*), Turunnya Nilai Tukar Petani subsector Perikanan disebabkan penurunan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 0,51 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) naik sebesar 0,23 persen. **Penurunan Indeks Harga yang Diterima Nelayan Tangkap** disebabkan oleh turunnya harga komoditi ikan duri sebesar 6,53 persen; kembung sebesar 5,55 persen; rajungan sebesar 5,06 persen; selar sebesar 5,00 persen; golok-golok sebesar 3,47 persen; baronang sebesar 1,69 persen; dan kakap sebesar 1,13 persen. **Kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan Budidaya** (It) sebesar 0,80 persen disebabkan oleh naiknya harga komoditas gurame tawar sebesar 3,93 persen; patin tawar sebesar 0,97 persen; dan kerapu laut sebesar 0,89 persen.
9. Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, **angka IPM Kepri pada tahun 2023 dengan tingkat IPM tertinggi ke-tiga Nasional** sebesar 79,08 dan tumbuh sebesar 0,76 persen (*yoy*). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut.

Analisis Fiskal Regional

Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

1. **Alokasi Pendapatan APBN** tahun 2024 sebesar Rp14.139,81 miliar, terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp11.474,64 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.665,34 miliar.
 - **Realisasi Penerimaan Perpajakan** sampai dengan triwulan II 2024 sebesar Rp5.368,60 miliar mengalami pertumbuhan 8,83 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut didorong oleh *extra effort* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menggali potensi PPh di daerah yang tumbuh 22,51 persen (*yoy*). Penerimaan PPh tersebut didominasi oleh pengenaan tarif progresif PPh 21 tumbuh 38,40 persen (*yoy*)
 - **Realisasi Pendapatan PNBP** sampai dengan triwulan II 2024 sebesar Rp1.583,22 miliar tumbuh signifikan sebesar 71,00 persen (*yoy*).
2. **Alokasi Belanja APBN** tahun 2024 sebesar Rp17.646,59 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp9.603,43 miliar, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.043,16 miliar.





- **Realisasi Belanja Pemerintah Pusat** sampai dengan triwulan II 2024 sebesar Rp3.469,66 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 18,04 persen (*yoy*). Persentase realisasi belanja tertinggi ada pada Belanja Pegawai sebesar 55,42 persen dari Pagu, atau sebesar Rp1.192,89 miliar secara nominal.
- **Alokasi Belanja TKD** sebagian besar dialokasikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.817,40 miliar (59,89 persen dari total Pagu TKD), dan DAK Non Fisik sebesar Rp1.239,24 miliar (15,41 persen dari total Pagu TKD).
- **Realisasi Belanja TKD** dengan persentase penyaluran tertinggi adalah Dana Desa sebesar Rp156,33 miliar (71,44 persen dari Pagu) didorong oleh perubahan mekanisme Dana Desa yang sebelumnya disalurkan 3 tahap pada tahun 2023, menjadi 2 tahap pada tahun 2024.

Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

1. **Pendapatan Daerah** dapat direalisasikan sebesar 5.083,67 miliar atau 35,00 persen dari Target dan mengalami peningkatan 47,59 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp3.186,87 miliar (62,68 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp1.893,69 miliar (37,25 persen dari realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu berupaya menggali potensi daerah lainnya agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mencapai kemandirian fiskal di Provinsi Kepri.
2. **Pendapatan Asli Daerah** dapat direalisasikan sebesar Rp1.893,69 miliar atau 39,36 persen dari target realisasi. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp1.768,82,01 miliar atau 93,40 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar berturut-turut adalah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 55,38 miliar, Retribusi Daerah sebesar 53,83 miliar dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 15,66 miliar. Pemerintah daerah perlu memperhatikan potensi daerah demi meningkatkan PAD.
3. **Pajak Daerah** tumbuh sebesar 54,35 persen (*yoy*) didorong oleh pertumbuhan pada realisasi komponen Pajak Daerah sebagai dampak dibentuknya beberapa kebijakan daerah melalui Perkada maupun turunannya, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kepri tumbuh 9,92 persen (*yoy*), BBNKB Kepri tumbuh 19,02 persen (*yoy*), BPHTB Batam tumbuh 23,43 persen (*yoy*), dan Pajak Hiburan Karimun tumbuh 16,36 persen (*yoy*). Meskipun demikian, kontraksi pada Pajak Hotel di Bintan sebesar minus 65,73 persen (*yoy*) perlu menjadi perhatian.
4. **Pendapatan Transfer** dapat direalisasikan sebesar Rp3.186,87 miliar atau hanya 33,16 persen dari Target. Realisasi terbesar terdapat pada DAU yaitu sebesar Rp2.354,62 miliar atau 62,17 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer. DAK menempati posisi kedua dengan realisasi sebesar Rp597,36 miliar atau 15,77 persen total realisasi Pendapatan Transfer, dan DBH SDA pada posisi ketiga sebesar Rp451,73 miliar atau 11,93 persen dari total realisasi Pendapatan Transfer. **Pendapatan Lainnya** telah terealisasi sebesar Rp3,10 miliar atau 0,37 persen dari Target.
5. **Rasio Perpajakan Daerah terhadap PDRB** sebesar 2,29 persen. Rasio tersebut menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar 0,71 persen.
6. **Indeks Kemandirian Fiskal I** (PAD/Total Pendapatan) beberapa daerah berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian" dengan angka tertinggi ada pada Provinsi Kepri sebesar 0,48 kemudian Kota Batam sebesar 0,46 dan Kabupaten Karimun sebesar 0,27. Sedangkan Kabupaten Bintan (0,12), Kabupaten Natuna (0,07), Kabupaten Lingga (0,08), Kabupaten Kepulauan Anambas (0,04), dan Kota Tanjungpinang (0,14) berada pada klasifikasi "Belum Mandiri". Dapat disimpulkan bahwa mayoritas daerah pada triwulan II 2024 berada pada klasifikasi "Belum Mandiri." **Indeks**





Kemandirian Fiskal II (PAD+DBH/Total Pendapatan) Kota Batam (0,57) dan Provinsi Kepri (0,53) masuk pada klaster "Mandiri." Adapun Kab. Karimun (0,44), Kab. Natuna (0,31), Kota Tanjungpinang (0,30), Kab. Lingga (0,26), dan Kab. Kep. Anambas (0,26) berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian" sedangkan Kab. Bintan (0,18) berada pada kategori "Belum Mandiri". Dari hasil IKF II periode triwulan II 2024, dapat disimpulkan bahwa banyak kabupaten/kota berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian" dibandingkan pada klasifikasi "Mandiri" dan "Belum Mandiri".

7. **Belanja Daerah** dapat direalisasikan Rp5.449,84 miliar atau 35,78 persen dari Pagu. Belanja Daerah tumbuh 24,74 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya hampir seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasi yang tumbuh sebesar 149,30 persen (*yoy*), Belanja Barang dan Jasa yang tumbuh 28,16 persen (*yoy*) dan Belanja Modal yang tumbuh sebesar 14,98 persen (*yoy*). Belanja Pegawai merupakan belanja dengan realisasi berdasarkan nominal tertinggi yaitu sebesar Rp2.772,66 miliar, disisi lain **Realisasi Belanja Modal** sangat rendah, yaitu sebesar Rp317,03 miliar atau 14,98 persen dari Pagu. **Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB** meningkat pada triwulan II 2024 sebesar 3,16 persen dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar 2,70 persen (*yoy*).

Pelaksanaan Anggaran Konsolidasi

Hasil konsolidasi antara pelaksanaan anggaran pusat dan daerah lingkup Kepri menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp9.352,50 miliar dan tumbuh 19,38 persen (*yoy*), jumlah Belanja Konsolidasi sebesar Rp9.083,23 miliar dan tumbuh 19,13 persen (*yoy*), dan jumlah Transfer Konsolidasi sebesar Rp517,16 miliar dan tumbuh 108,47 persen (*yoy*) sehingga terjadi Surplus sebesar Rp242,27 miliar. Jumlah Pembiayaan Konsolidasi sebesar Rp254,38 miliar sehingga terbentuk SiLPA sebesar Rp496,64 miliar.

Pengembangan Ekonomi Daerah

1. **Hasil monev belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik tahun 2024** dilakukan terhadap 6 (enam) bidang yang telah disinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran. Hingga bulan Juni 2024, Rincian Output (RO) yang telah diselaraskan oleh DJA dan DJPK menunjukkan bahwa realisasi anggaran serta capaian RO Harmonis telah digunakan secara efektif. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan di beberapa bidang harmonis yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu aspek penganggaran, penyaluran DAK Fisik, SDM, pengelolaan kegiatan PBJ, dan faktor eksternal lainnya.
2. **Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan di lapangan** akan dipengaruhi oleh faktor luar meliputi cuaca dan lokasi yang sulit mobilitasnya, pedoman umum atau juknis yang baru terbit bulan April, Mei, hingga Juni, sehingga menghambat mulainya pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, pelaksanaan yang melibatkan pihak luar perlu dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan.
3. **Aspek penganggaran** mengalami beberapa tantangan meliputi blokir dan revisi anggaran, blokir *automatic adjustment*, dan kegiatan yang masih memerlukan koordinasi ke unit Eselon 1 karena belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)** pengelola keuangan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti kemampuan penggunaan aplikasi, pengetahuan terkait rencana kegiatan dan pemahaman terhadap bidang tugas pekerjaan.
5. **Pengelolaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)** mengalami beberapa tantangan seperti terhambatnya proses lelang karena spesifikasi barang yang belum sesuai dengan kebutuhan, kurangnya variasi pihak penyedia, terdapat gangguan pada sistem PBJ, dan tidak dapat diaksesnya *e-catalog* karena sistem PDN terganggu.





6. **Penyaluran DAK Fisik** mengalami beberapa hambatan, yaitu juknis dari Kementerian Kesehatan yang baru terbit bulan Juni, tidak terdapat alat kesehatan yang memenuhi spesifikasi TKDN, Pemko Batam dan Pemkab Karimun terlambat melaksanakan revisi RK untuk memaksimalkan Pagu, kurang personil SDM pada APIP untuk melakukan reviu, OPD yang lambat melakukan *upload* dokumen penyaluran DAK Fisik, serta kondisi geografis dan cuaca di wilayah kepulauan seperti Kepri yang dapat menghambat pengerjaan proyek DAK Fisik.
7. **Pembangunan bidang jalan di Kepri** dilaksanakan pada enam proyek strategis melalui forum Musrenbangnas tahun 2024, antara lain pembangunan jembatan penghubung Batam-Bintan, penggantian jaringan distribusi utama (JDU) Perumda Tirta Kepri di Kota Tanjungpinang, dan pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional Pulau Bintan.
8. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepri bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepri merumuskan **Kebijakan Merdeka Belajar** untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kepri.
9. Pemprov bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri menyusun RKPД mengenai **peningkatan layanan air bersih dan sanitasi** yang layak bagi masyarakat.

Analisis Tematik

1. Hasil Analisis Tim Kanwil DJPb Kepri menemukan bahwa **Temperature Humidity Index (THI) di Provinsi Kepulauan Riau** dari tahun 2013 -2021 didominasi oleh kategori kurang nyaman atau diakumulasi berlangsung selama hampir 8 tahun (suhu 25-27°C) dan kategori tidak nyaman diakumulasi berlangsung selama 6 bulan (suhu diatas 27°C). Di sisi lain, THI kategori nyaman (suhu 21-24°C) hanya berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. **Kenaikan suhu udara** merupakan sinyal terjadinya perubahan iklim pada suatu daerah, di **Tanjungpinang rata-rata mengalami peningkatan suhu udara mencapai 0,003°C per tahun**, hal tersebut disertai dengan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca dan frekuensi intensitas durasi cuaca ekstrem, seperti **intensitas hujan wilayah Tanjungpinang, terdapat tren kenaikan curah hujan mencapai 0,05 mm per tahun**.
2. **Kenaikan permukaan air laut** berpotensi membuat pulau-pulau kecil di Kepri tergenang, bahkan beberapa di antaranya mengalami abrasi yang menyebabkan pulau tenggelam. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terdapat **pulau tenggelam di Kepri**, meliputi Pulau Terumbu Daun, Lereh, Tikus, Inggit, dan Begonjai.
3. **Peningkatan suhu air laut, keasaman laut, dan perubahan pola arus laut** dapat merugikan **sektor kelautan perikanan**, ekosistem laut, melambatkan pertumbuhan budidaya perikanan dan mengurangi hasil tangkapan perikanan. Hal ini dapat berdampak pada pendapatan nelayan dan industri perikanan regional Kepri.
4. Faktor **perubahan iklim sangat mempengaruhi infrastruktur transportasi dan mobilitas** masyarakat di daerah Kepulauan Riau yang mengandalkan transportasi laut untuk mobilitas antar kabupaten/kotanya. Dampak tersebut juga dapat merusak tempat tinggal masyarakat pesisir.
5. **Perubahan iklim meningkatkan risiko penyakit** seperti demam berdarah, penyakit pernapasan (ISPA), diare dan hepatitis di Kepri. Khusus daerah yang sering mengalami banjir, penyakit diare, demam tipus, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A adalah beberapa penyakit menular yang terbawa air yang harus diwaspadai.
6. Masih banyak **masyarakat belum memiliki pengetahuan akan perubahan iklim yang dan dampak** yang dapat ditimbulkan di masa mendatang, masih terdapat masyarakat yang kurang "aware" terhadap kelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan dengan baik.
7. **Pemerintah pusat melakukan upaya mengatasi perubahan iklim dengan meningkatkan alokasi anggaran mitigasi perubahan iklim** pada satker Satuan Kerja Distrik Navigasi (Disnav),





Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), Radio Republik Indonesia (RRI), Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PPLP) **dan peningkatan alokasi anggaran adaptasi perubahan iklim** pada satker Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan BMKG Tanjungpinang.

8. **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah melaksanakan kebijakan** meliputi, **gerakan sedekah sampah** untuk mengurangi sampah anorganik yang tidak dapat terurai, **pengelolaan pesisir dan laut** untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut, serta promosi ekowisata.
9. **Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 – 2026**, telah dilaksanakan beberapa kebijakan, yaitu **pemetaan kluster daerah pertanian** secara terpadu untuk mengatasi kerawanan pangan akibat perubahan iklim, **program untuk mengurangi deforestasi** dan meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, **praktik pertanian berkelanjutan** untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, **pemulihan kawasan hutan**.

V.II Rekomendasi

Analisis Ekonomi Regional

1. Pemerintah daerah agar **meningkatkan belanja pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)** dalam rangka meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) yang memiliki kontribusi paling besar yaitu 44,33 persen terhadap PDRB Kepri, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri 4,90 persen pada triwulan II. Penambahan alokasi belanja pada sektor strategis pendukung PDRB diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan aktivitas ekonomi kedepannya pada triwulan III dan IV tahun 2024.
2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan memperkuat **kolaborasi antar instansi pusat dan daerah di Kepri dalam rangka menjaga kestabilan target inflasi** dengan menerbitkan kebijakan dan program yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan moneter, melalui berbagai upaya meliputi operasi pasar murah untuk mengatur keterjangkauan harga, pemantauan kesediaan pasokan pada Bulog, distributor serta pasar, pelaksanaan program budidaya pertanian dan memastikan kelancaran rantai distribusi bahan pangan.
3. **Surplus Perdagangan Luar Negeri** dapat ditingkatkan melalui upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menggencarkan pemasaran yang lebih agresif dan partisipasi dalam pameran dagang internasional untuk menarik pasar ekspor potensial baru khususnya komoditas gas alam, hasil tambang dan hasil industri (Non Migas) yang menjadi produk ekspor andalan.
4. Pemerintah daerah agar melaksanakan **Program pengentasan kemiskinan** dengan cara:
 - a. Dinas Sosial perlu **memperkuat Jaring Pengaman Sosial dengan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial** di daerah dengan data pusat agar pelaksanaan penyaluran Bansos dapat menjangkau keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran.
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar **melaksanakan pelatihan keterampilan wirausaha dan pendampingan** untuk memunculkan umkm baru yang akan meningkatkan pendapatan rumah tangga (mandiri secara ekonomi) dan meningkatkan UMKM naik kelas.
5. Aspek pemerataan menjadi fokus pemerintah daerah, **Pemprov Kepri agar melakukan upaya memperkecil ketimpangan (gini ratio)** dengan cara meningkatkan Belanja Infrastruktur dan kegiatan perdagangan untuk menstimulus aktivitas ekonomi pada daerah terpencil/pedesaan. Di





sisi lain, pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pemprov dalam menumbuhkan program pelatihan kerja, *entrepreneurship*, serta menambahkan alokasi fasilitas pinjaman Pemprov Kepri dengan bunga 0 (nol) persen kepada pelaku usaha.

6. Pemerintah daerah agar lebih **menggencarkan program pemberdayaan ekonomi untuk menurunkan tingkat pengangguran** melalui pelatihan keterampilan, memudahkan akses terhadap modal usaha, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). **Pemerintah Kota Batam** yang masih memiliki isu tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan untuk menyediakan lebih banyak sekolah vokasi setingkat SMK dan Politeknik, melakukan kerja sama dengan industri (program *link and match industry*) sehingga tercipta kualitas tenaga kerja *high-skilled worker* yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Batam.
7. Dalam upaya **meningkatkan Nilai Tukar Petani**, Dinas ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan agar menyediakan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dengan tambahan insentif berupa benih unggul, pupuk organik, dan teknik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga meningkatkan nilai jual.
8. Untuk **meningkatkan Nilai Tukar Nelayan** agar Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk koperasi nelayan atau kelompok usaha bersama dengan memfasilitasi akses nelayan ke pasar yang lebih besar dan stabil. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mempromosikan produk ikan lokal, dan membuka akses ke pasar ekspor membangun kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan pengolahan ikan, restoran, hotel, dan ritel, untuk memastikan pasokan ikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
9. Kepulauan Riau telah berhasil meraih angka **IPM tertinggi di Sumatera dan tertinggi ketiga Nasional** pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 79,08. Untuk meningkatkan angka IPM tsb, Pemprov Kepri agar meningkatkan formasi tenaga pendidik (guru) sampai ke pulau perintis, kesehatan (fasilitas kesehatan sampai ke pelosok) dan penguatan keterampilan lapangan usaha sesuai dengan kondisi daerah kepulauan, seperti pelatihan budidaya rumput laut, perikanan dan sektor kelautan.

Analisis Fiskal Regional

Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

1. Kanwil DJP Kepri agar meningkatkan **extra effort melalui edukasi, kerjasama dan layanan langsung pada perusahaan potensial**. Di samping itu, pengawasan perpajakan juga perlu digiatkan terhadap pengenaan tarif progresif PPh 21 yang mulai berlaku efektif di Januari 2024.
2. Pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar **meningkatkan pengawasan pada pelabuhan-pelabuhan kecil yang sering dijadikan sebagai tempat keluar masuk barang illegal** yang menghindari pungutan cukai, bea masuk ataupun pajak ekspor.
3. Badan Layanan Umum (BLU) di Kepri agar terus menggali dan meningkatkan potensi pendapatan PNBPN di Kepri, baik melalui **optimalisasi tarif dan diversifikasi layanan** yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peningkatan kualitas dan efisiensi layanan juga terus dioptimalkan melalui **digitalisasi layanan, pelatihan dan pengembangan SDM**, serta **optimalisasi aset** yang dapat dilakukan melalui **kerja sama dengan pihak ketiga**.
4. KPPN dan Kanwil DJPb Prov. Kepri agar secara aktif **mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan dokumen administrasi dalam mempercepat pencairan Dana TKD** setelah terbitnya juknis dan Peraturan Menteri Keuangan tentang DAK Fisik. Selanjutnya, mengkonsolidasikan perubahan mekanisme penyaluran Belanja TKD dan melaksanakan bimbingan kepada pemerintah daerah.





Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu mencapai **kemandirian fiskal**, atas dasar tersebut pemerintah daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1. **Mengoptimalkan PAD dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** mengingat realisasi masih rendah sampai dengan triwulan II, yaitu masing-masing sebesar 53,83 miliar (8,07 persen dari target) dan 15,66 miliar (23,53 persen dari target), atau hanya memberikan kontribusi 3,7 persen terhadap PAD. Pemda daerah perlu memetakan BUMD yang belum optimal dalam menghasilkan profit dan menemukan permasalahan serta solusi konkrit hingga menghasilkan profit yang akhirnya dapat memberikan dividen bagi pemda.
2. **Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LLPAD)** mengalami kontraksi 33,37 persen (yoy), Penurunan ini terjadi disebabkan oleh penurunan pendaparan BLUD sebagai kontributor mayoritas pada LLPAD yaitu sebesar 68,13 persen. **Pemerintah daerah agar memetakan BLUD yang mengalami penurunan pendapatan dan menemukan permasalahan** serta solusi konkrit. Hal tersebut penting dilakukan mengingat seharusnya BLUD merupakan salah satu penyumbang potensial pendapatan bagi pemerintah daerah.
3. **Penurunan penerimaan pajak hotel pada Kabupaten Bintan** disebabkan oleh menurunnya wisman singapura yang menjadi kontributor terbesar mencapai 60,62 persen wisman di Provinsi Kepri. Penurunan kunjungan wisman Singapura mencapai tersebut disebabkan oleh **kenaikan harga tiket ferry Singapura-Batam** sebesar 66,67 persen, menjadi Rp840 ribu (tiket pp). Selanjutnya, **Pengajuan Visa on Arival (VoA) Kepri belum di setujui** Kemenparekraf dan Ditjen Imigrasi. Skema baru VoA memberi pilihan bagi wisman non-ASEAN yang hanya ingin berkunjung singkat untuk menggunakan *short term visa* selama 7 hari dengan tarif Rp100 ribu dibandingkan harus mengurus visa 30 hari dengan tarif Rp500 ribu.
4. Dinas DPMPSTP berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga agar **menyusun mapping terhadap potensi sumber daya alam** yang dapat ditawarkan kepada investor sehingga mampu memberikan bagi hasil kepada Kabupaten Lingga. Masih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil karena Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang, KPP dan KPPN **belum rutin melakukan rekonsiliasi pajak sebagai syarat salur** DBH Pajak.
5. Untuk meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB, pemerintah daerah agar melakukan **diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor potensial** dengan memberikan insentif kepada investor, mendukung pengembangan UMKM meningkatkan promosi produk lokal.
6. Berdasarkan **Indeks Kemandirian Fiskal I dan II**, Pemerintah Kabupaten Bintan masuk kedalam kategori 'Belum Mandiri'. Hal ini disebabkan penurunan kunjungan wisatawan Singapura ke Bintan akibat kenaikan tiket ferry Singapura-Batam, penurunan BPHTB karena program gratis bagi rumah subsidi dan kenaikan Pajak Hiburan membuat beberapa tempat hiburan menutup perusahaannya. **Pemerintah Kabupaten Bintan agar menyusun insentif fiskal jangka pendek untuk menstimulus aktivitas perdagangan di wilayahnya**
7. Dalam rangka meningkatkan realisasi Belanja Daerah, pemerintah daerah agar **menyusun rencana kerja secara matang dengan prioritas daerah** melalui analisis kebutuhan, konsultasi dan koordinasi kepada semua OPD untuk mendiskusikan rencana bersama menggapai tujuan, sasaran dan tahapan realisasi yang tepat waktu.
8. **Surplus sebesar Rp242,27 miliar** merupakan **peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau membiayai proyek-proyek strategis daerah** sehingga mampu meningkatkan





aktivitas ekonomi di daerah. Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan yang matang dalam penggunaan surplus tersebut.

Pengembangan Ekonomi Daerah

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan di lapangan agar **mempersiapkan mitigasi permasalahan dengan memperhitungkan perubahan musim** di wilayah Kepulauan seperti Kepri, melalui koordinasi bersama pihak Stasiun Meteorologi. Penyelesaian mengenai pedoman umum/juknis yang lama terbit, agar **satker berkoordinasi dengan unit Eselon 1** untuk menanyakan juknis terkait dan memperhitungkan waktu tambahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam memperbaiki aspek penganggaran, satker perlu **mencermati proses penganggaran, serta membangun koordinasi antara pelaksana kegiatan dan bagian perencanaan** sehingga meminimalisir penyesuaian dan revisi anggaran. Selanjutnya, Satker agar terus menjalin komunikasi bersama unit Eselon 1 untuk pembukaan blokir anggaran dan blokir *automatic adjustment* serta mengawal pembukaan blokir agar tidak terhambat.
3. Instansi agar **meningkatkan kapasitas SDM melalui workshop dan pelatihan** aplikasi. Selanjutnya, untuk mengantisipasi pergantian tugas kerja operator/pengelola keuangan, agar diterapkan sistem **transfer knowledge dari operator lama ke operator yang baru**, sehingga operator dapat segera menyesuaikan dengan pekerjaan.
4. Terkait kendala pada aspek PBJ, agar satker melakukan refreshment berkala dan melaporkan apabila terjadi gangguan pada sistem PBJ.
5. Agar Dinas Kesehatan Provinsi Kepri **berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong percepatan penerbitan juknis bidang kesehatan**. Selanjutnya, Pemerintah daerah **membuat tim percepatan pemenuhan dokumen penyaluran DAK Fisik** meliputi penyusunan RK dan penyelesaian syarat dokumen salur.
6. Agar pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepri bersinergi dengan satuan kerja K/L dalam rangka **meningkatkan harmonisasi pengawasan dan pelaksanaan kegiatan** dalam penyelesaian *project* DAK Fisik.
7. Agar BPMP **memperkuat koordinasi dan kolaborasi** dengan Dinas Pendidikan, sekolah, serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan implementasi **kebijakan program Merdeka Belajar** yang efektif dan sinergis.
8. Agar Pemprov Kepri **memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih dan sanitasi** yang layak, terutama di daerah perdesaan dan pulau-pulau kecil, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air bersih dan sanitasi, seperti **penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG)** untuk pemetaan wilayah pelayanan.

Analisis Tematik

1. Dalam **mencegah peningkatan suhu udara** yang terjadi di Kepri, Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) agar mendorong implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon industri dan mengontrol pencemaran udara serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya, mendorong program pengelolaan sumber daya efisien, *green energy* dan energi terbarukan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar **menggiatkan rencana kebijakan strategis untuk pengelolaan pesisir** yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut, termasuk rehabilitasi terumbu karang dan pengelolaan zona lindung. Dengan terjaganya lingkungan pesisir dapat mendorong pengembangan ekowisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal.





3. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri juga akan **berkoordinasi dengan BPBD Kepri untuk menyusun langkah-langkah penanganan abrasi** pada pulau-pulau terdampak sehingga tidak menambah daftar pulau tenggelam di Kepri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut ialah dengan menanam mangrove di sepanjang pesisir, membuat *breakwater* (struktur pemecah gelombang) dan *revetment* (struktur pelindung pantai yang terbuat dari batu atau beton).
4. Agar satker Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) berkolaborasi dengan Dinas PUPR mendorong **pembangunan infrastruktur tahan bencana**, investasi dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana seperti fasilitas pelabuhan, tanggul laut dan sistem drainase yang lebih baik untuk mengurangi risiko akibat kenaikan permukaan air laut. Di sisi lain juga membutuhkan peremajaan kapal laut penumpang yang sudah usang karena dikhawatirkan kesulitan menghadapi kondisi gelombang laut dari angin utara di Kepri.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau agar **menggiatkan kampanye dan edukasi melalui RRI dan media dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat** tentang perubahan iklim melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan kesehatan kepada masyarakat untuk menjaga sanitasi selalu bersih, mencuci tangan dan mengelola sampah dengan baik, hal ini mampu menurunkan beberapa penyakit menular yang terbawa air saat banjir, seperti diare, demam tipus, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar **menggiatkan kewaspadaan dan cara penanggulangan diri melalui RRI dan media dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran** masyarakat tentang perubahan iklim yang berdampak pada bencana daerah
7. Pemerintah Pusat agar **mengalokasikan penambahan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada Belanja Modal atau pembangunan infrastruktur** untuk penyediaan fasilitas publik seperti pelabuhan, bandara dan akses-akses pendukung transportasi lainnya.
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu **menggencarkan dan mendorong seluruh kota/kabupaten untuk melaksanakan kebijakan Gerakan Sedekah Sampah** yang efektif mengurangi timbunan sampah dan pengelolaan sampah daur ulang menjadi barang bernilai.
9. Dalam **mewujudkan peningkatan hasil pertanian daerah**, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan **agar berkolaborasi dengan expert di bidang pertanian** untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan pertanian dengan **metode pertanian modern** seperti produksi pada rumah kaca dan hidroponik.



List of Reference

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

------. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta: Kementerian Keuangan.

------. 2014. Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Laporan dan Buku

Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2024. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2024. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Februari 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2024. *PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan II 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2024. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan II 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

------. 2024. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

------. 2024. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.



List of Reference

DAFTAR PUSTAKA

- , 2024. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2024. *Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2024. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani Kepulauan Riau Juni 2024*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2024. *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Juni 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2024. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2022. *Laporan Inflasi IHK Bulan Juni 2024*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Jurnal

Haryono, S., & P. Wardoyo. 2012. *Struktural Equation Modelling Untuk Penelitian Manajemen Menggunakan Amos 18.00*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.

Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford Publications.

Cahyo, R. D. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 95 Dan Rata-Rata Lama Prndidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009-2014*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2).

Ramiayu, D.D. (2016). *Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4 (2), 1-16.

Berita

1. <https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=288>
2. <https://bpbatam.go.id/en/kepala-bp-batam-bangun-22-infrastruktur-jalan-hingga2024-mendatang/>
3. <https://kepri.batampos.co.id/pemprov-siapkan-empat-program-strategis-utnuk-tekan-angka-kemiskinan/>

Sumber Lain

SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia)

Aplikasi MEBE dan SINTESA <https://ditpa.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi OMSPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi SIMTRADA <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>

Data Dinas LHK Kepri

Data Stasiun Meteorologi Kota Tanjungpinang dan Kota Batam

Data Kementerian PUPR



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kepulauan Riau

TRIWULAN II 2024

 Kanwil DJPb Kepulauan Riau

 @djpbbkepri

 @djpbbkepri

Konten Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024 dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Kanwil DJPb Kepri. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari Kanwil DJPb Provinsi Kepri.

